



Arie Sujito

Negara Sibuk Rakyat Terpuruk

Kata Pengantar: Dr. S. Bayu Wahyono

Editor: Aksan Susanto



NEGARA Sibuk
RAKYAT TERPURUK

ARIE SUJITO

NEGARA Sibuk RAKYAT TERPURUK



Negara Sibuk Rakyat Terpuruk

Penulis : Arie Sujito

Editor : Aksan Susanto

Kata Pengantar : Dr. S. Bayu Wahyono

Sampul : Ipank

Ilustrasi : Ipank

**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)**

Sujito, Arie

Negara Sibuk Rakyat Terpuruk; Yogyakarta: IRE,
2012; Editor: Aksan Susanto; Kata Pengantar: Dr. S. Bayu
Wahyono; Cetakan Pertama, 2012.

15,5 x 23 cm.

xx + 168 hlm.

ISBN 978-979-8198-84-7

©2012 Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

All rights reserved. Dilarang memperbanyak atau mengutip dalam bentuk dan cara apapun, baik dengan cara mekanik atau elektronik, termasuk mengkopi, atau dengan cara *information storage and retrieval system*, tanpa izin tertulis dari IRE Yogyakarta.



IRE Yogyakarta

Dusun Tegalrejo RT.01 RW.09 Desa Sariharjo, Ngaglik
Jalan Palagan Tentara Pelajar km 9,5 Sleman Yogyakarta 55581
Telp/Fax +62-74-867686 E-mail : office@ireyogya.org
<http://www.ireyogya.org>

Teruntuk:

*Fenty Ariani
Panji Merah Balakosa
Saguna Marhaen Bajrayekti*

Tentang Penulis

Arie Sujito



Lahir di Madiun 12 September 1972 dari keluarga petani di Madiun Jawa Timur. Menyelesaikan studi tingkat sarjana (1997) dan master (2004), kini tengah menyelesaikan disertasi doktoral di Program Studi Sosiologi UGM. Semenjak tahun 1999 sampai sekarang mengajar di almamaternya dengan memfokuskan kajian sosiologi politik, tema *local democracy*, serta resolusi konflik dan perdamaian.

Selain mengajar, sosiolog UGM ini juga menekuni riset dengan bergabung pada Institute for Research and Empowerment (IRE), sebuah NGO di Yogyakarta yang konsen pada kajian *governance reform, village and local democracy*, serta penanganan masalah kemiskinan. Di lingkungan kampus UGM, ia mengabdikan diri sebagai peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, dan peneliti di Youth Study Center (YouSure) UGM.

Selama mahasiswa, aktif di Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, serta pers kampus. Pengalamannya sebagai aktivis dikembangkannya sampai kini dengan melibatkan diri pada organisasi massa “Pergerakan Indonesia” yang sejak 2010-2013 menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional. Sejak tahun 2012, ia juga tergabung dalam Dewan Nasional sekretariat nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Aktif menulis di media massa, jurnal dan buku. Di antara buku dan jurnal yang pernah ditulisnya adalah: *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi* (sebagai penulis dan editor, 2002); *Refleksi dan Aksi untuk Rakyat* (2004); *Membangun Aceh dari Gampong* (2007); “Kebijakan Sosial di Daerah” (*Jurnal Sosdem*, FES 2008); *Mendahulukan si Miskin* (penulis dan editor, 2008); serta buku-buku lain yang ditulis secara bersama, yakni *Jalan Panjang Advokasi Kebijakan* (FPPM, 2009), *Pemuda Pasca Orba* (2012).

Alamat email: ariedjito@yahoo.com

Ucapan Terima Kasih



Pendokumentasian artikel analisis dalam bentuk buku ini, tentu terwujud atas peran berbagai pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak.

Pertama, kepada Redaksi Harian *Republika* yang telah mengizinkan penerbitan naskah-naskah analisis yang pernah dimuat tiap hari Selasa selama lebih dari 2 tahun. Semoga pendokumentasian ini bermakna untuk perluasan wacana dan menambah khasanah pemikiran kritis yang bisa diakses publik secara lebih luas.

Kedua, kepada pengurus dan kolega di Institute for Research and Empowerment (IRE), serta The Asia Foundation yang memfasilitasi penerbitan dokumen analisis ini sebagai bagian dari komitmen mengembangkan program *knowledge sector*.

Ketiga, untuk Mas Bayu Wahyono yang bersedia memberikan pengantar buku dengan perspektif tajam dan kritis. Salam selalu buat persahabatan ini.

Keempat, peran Mas Aksan Susanto, sebagai editor yang cukup cepat dan kreatif dalam mengompilasi, mengedit dan menata tulisan saya sehingga bisa terbit.

Kelima, juga untuk Ipank Sumarmo dan Mas Yahya (Tiara Wacana), atas bantuan mereka pekerjaan ini bisa kelar.

Salam,

Arie Sujito

Pengantar Editor



Perubahan sosial bukan hanya menjadi bagian dari gerak dan kesadaran untuk terus-menerus meningkatkan kualitas hidup. Tetapi juga sebagai imbas dari proses ekspansi dan intervensi berbagai bentuk kapitalisasi yang hadir bersama arus globalisasi. Namun upaya menjawab persoalan tersebut, yang seharusnya dilakukan oleh para pemegang kuasa, seringkali hanya menciptakan kegaduhan politik di panggung kekuasaan.

Dalam pandangan Sosiolog UGM, Arie Sujito, negara terlalu *fragmented* peran dan pola kerjanya, sehingga mengakibatkan masalah yang tidak terlalu besar, tetapi gara-gara cara penanganannya tidak efektif, membuat beban menjadi berat. Tak dapat dihindari, masyarakatlah yang akhirnya turut menanggung beban. Negara sibuk dan rakyat terpuruk, menjadi kalimat yang mewakili kondisi tersebut.

Dinamika sosial itu pula yang dipotret secara tajam oleh Arie Sujito melalui tulisan-tulisan pada kolom “Analisis” Surat Kabar Harian *Republika* yang terbit setiap hari Selasa. Dalam rentang tahun 2010-2012 telah terkumpul lebih dari seratus tulisan yang merupakan telaah kritis Arie Sujito terhadap peristiwa keseharian di sekitar kita. Setelah diseleksi secara tematik, akhirnya terbitlah buku ini.

Meskipun berada dalam rentang waktu yang panjang dan mengulas beberapa peristiwa atau momentum yang sama, namun Arie Sujito selalu mampu menghadirkan sudut pandang yang bervariasi.

Sehingga ketika membaca tulisan-tulisannya, pembaca semakin kaya dengan perspektif dalam mencerna fenomena sosial yang tengah berlangsung.

Buku sebagai karya intelektual seseorang dapat dipastikan kelak menjadi tumpukan kertas karena perjalanan waktu. Tapi boleh jadi, pemikiran masa lalu akan menjadi referensi saat menapaki masa depan. Hal itu mengingatkan kita pada ungkapan Bung Hatta yang disampaikan ketika menerima penghargaan Doktor HC pada Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada tahun 1956 (Anhar Gonggong, 2002), yang masih sangat relevan hingga hari ini.

Bung Hatta mengatakan, “Apa yang kita alami di Indonesia sehari-hari sekitar kita, merupakan seolah-olah Pancasila itu diamalkan di bibir saja, tidak menjadi pelita di dalam hati untuk membangun masyarakat yang baru. Tiap-tiap golongan berkejar-kejar mencari rezeki. Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan.

Dalam teori kita mengikuti kolektivisme, dalam praktik dan perbuatan memperkuat individualisme. Dalam teori kita bela demokrasi sosial, dalam praktik dan perbuatan menghidupkan semangat demokrasi liberal. Partai yang pada hakikatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar supaya rakyat belajar merasai tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat, partai itu dijadikan tujuan dan negara dijadikan alatnya. Dengan itu dilupakan, bahwa imoril dan bertentangan dengan Pancasila, istimewa dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa, apabila rakyat dirugikan untuk kepentingan partai, yaitu golongan.”

Selamat membaca!

Yogyakarta, September 2012

Aksan Susanto

Negeri Penuh Ironi



Memperhatikan bagaimana refleksi Arie Sujito atas Indonesia, sketsanya ada tiga pihak yang saling berhubungan yaitu negara, rakyat, dan satu lagi adalah perantara. Banyak sebutan yang ditujukan untuk perantara, mulai dari broker, komprador, makelar, hingga calo, dan sepertinya sebutan terakhir itulah yang paling pas atau telah mengkultur. Jadi tidak heran jika negeri ini adalah negeri para calo, karena calo telah menjadi bagian dari kultur kita dalam hubungan-hubungan ekonomi, politik, sosial, dan bahkan hubungan spiritual keagamaan. Karena itu di setiap arena aktivitas sosial selalu muncul kegiatan percaloan, sehingga di mana-mana ada calo mulai dari calo tiket, tanah, mobil, calo politik, calo birokrasi, calo akademik dan bahkan calo agama.

Dalam dinamika hubungan antara negara dan rakyat, karakternya vertikal dan eksploitatif dengan negara berada pada posisi dominan, sedangkan rakyat senantiasa dalam posisi subordinan. Inilah yang dikenal sebagai hubungan dominatif dan sebagian juga patrimonialistik yang merambah ke berbagai arena kehidupan sosial-politik. Pada karakter hubungan seperti itu logikanya negara tampil begitu perkasa karena menjadi pihak yang senantiasa untung, sementara rakyat pihak yang rugi. Tetapi ternyata tidak demikian, justru negara rugi dan lemah makin keropos, sedangkan rakyat, jelas tambah rugi. Lalu siapa yang mengambil untung dalam karakter hubungan seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah para calo.

Di situlah sumber ironi, yang kemudian menjadikan negeri ini penuh ironi, atau lebih tepat lagi “negeri katanya.” Artinya, katanya

negeri berkultur agraris-maritim, tetapi impor beras, jagung, kedelai, dan bahkan garam. Bagaimana tidak, para petinggi di jajaran birokrasi yang memiliki kewenangan mengambil keputusan lebih banyak yang bermental calo. Namanya saja calo karena itu memang tidak visioner, hanya berorientasi hasil, tidak menghargai proses, dan yang penting lagi cepat dapat untung meski tanpa berkeringat. Ketika ditawari komoditas pertanian strategis oleh jajaran negara kapitalis global misalnya, maka menerima begitu saja tanpa mempertimbangkan nasib petani di negeri agraris ini. Watak calonya mendominasi, tawaran seperti itu senantiasa diterima karena ada iming-iming sogokan atau yang sering diungkapkan secara eufimistik dengan istilah fee.

Maka lebih baik impor komoditas pertanian, daripada mengeluarkan kebijakan aksi afirmatif yang memproteksi petani agar lebih produktif lagi. Akhirnya cerita ironi itu berlanjut, ketika produksi kedelai di Amerika Serikat menurun karena faktor iklim, tetapi yang kelaparan dan kehilangan pekerjaan adalah para bakul tempe di Indonesia. Demikian pula petani garam, nasibnya setali tiga uang. Mereka terus bergulat dengan kemiskinan meski negeri ini memiliki pantai terpanjang di dunia. Sedangkan harga garam cuma Rp 250 per kilogram. Diperlukan setengah kuintal garam bagi petani untuk sekadar membeli pulsa seharga sepuluh ribu rupiah.

Katanya negeri demokrasi, tetapi kenyataannya di sana-sini penuh tindakan anarkis, baik di kalangan bawah maupun di kalangan atas. Karena persyaratan dasar nilai demokrasi seperti toleransi, menghargai pendapat orang lain, tradisi mendengar, dan mengakui kekalahan, tidak pernah dipenuhi. Jadi yang marak adalah munculnya demokrasi prosedural, pseudo demokrasi, demokrasi semu, dan bukan demokrasi substansial. Mengapa demikian? Persis yang dikatakan Arie Sujito, karena adanya sabotase demokrasi atau ada semacam pembajakan demokrasi oleh elite.

Siapa elite dalam konteks ini, tidak lain adalah para calo demokrasi yang gemar menerapkan politik representasi. Sebuah praktik politik pengatasan nama rakyat oleh elite, tetapi sesungguhnya demi kepentingan mereka sendiri. Mereka ini sering melakukan praktik di berbagai arena seperti Pemilu, Pemilu legislatif, dan juga sering melakukan politisasi pada dunia olahraga, birokrasi, dan bahkan

agama, yang ujung-ujungnya adalah mencari keuntungan pribadi atas nama publik. Oleh karena praktik politik representasi itu terus marak, maka negeri ini terus berada dalam proses transisi demokrasi tak berujung.

Katanya negeri religius, tetapi kenyataannya tingkat kriminalitas tinggi, konflik agama di mana-mana dan korupsi merajalela. Begitu ironisnya negeri ini, sampai-sampai pengadaan kitab suci saja juga dikorupsi. Sepertinya hipokrisi itu merasuk ke alam pikiran dan kesadaran bangsa ini, sehingga hipokrisi itu sendiri telah menjadi sebuah kultur. Bangsa munafik sebagaimana dikatakan Mochtar Lubis empat puluh tahun lalu, masih belum berakhir dan sepertinya sulit berakhir. Mengapa ini bisa terjadi? Karena di arena moral-spiritual ini juga tidak luput dari calo, yang diperankan secara efektif oleh para elite penafsir agama. Mau berkomunikasi dengan Tuhan saja, di negeri ini harus lewat loket-loket buatan para elite penafsir agama, tidak boleh langsung ke Tuhan. Akibatnya mobilisasi umat beragama di negeri ini terjadi di mana-mana, yang sebenarnya demi kepentingan membela elite agama, dan bukan membela kepentingan agama itu sendiri sebagai sumber nilai kemanusiaan universal.

Katanya bangsa besar, tetapi kenyataannya masih saja mentalitas sebagai bangsa kuli sering memperlihatkan diri. Sudah sekian dekade bangsa ini menjadi penyuplai terbesar tenaga kerja otot ke negeri orang, atau yang populer dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sudah menjadi cerita lama nasib TKI kita penuh dengan duka nestapa, mengalami penyiksaan, pelecehan sosial, dan pembunuhan dan pulang tinggal mayat. Negara mestinya tampil perkasa dalam mengurus dan memberikan perlindungan terhadap warganya di negeri orang yang disebutnya sendiri sebagai pahlawan devisa negara. Akan tetapi ironisnya, negara seringkali tidak hadir, absen, bahkan terkesan menjalankan politik pembiaran terhadap nasib TKI. Semua itu bersumber pada ketidakberdayaan negara terhadap para calo TKI yang senantiasa mengontrol nasib para pahlawan devisa itu.

Begitulah sekilas cerita di negeri penuh ironi. Lantas pertanyaannya, tidak ada cerita sukseskah di negeri ini? Rakyat harus minta tolong pada siapa? Tidak ada yang menolong, kecuali menolong dirinya sendiri, melalui gerakan sosial yang jelas dan terorganisir. Untuk itu

mesti memenuhi persyaratannya, yaitu kelas menengah yang sadar akan perannya, dan massa yang kritis (*critical mass*). Kelas menengah di negeri ini perlu memiliki kesadaran sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mendorong ke arah berkembangnya proses kewarganegaraan (*citizenship*).

Kecenderung kelas menengah yang selama ini terseret ke gaya hidup konsumtif dan tidak kritis terhadap narasi-narasi besar yang dominatif, perlu dicegah melalui gerakan revitalisasi kelas menengah. Lebih dari itu perlu mencegah kelas menengah menjadi bagian dari suburnya praktik percaloan dalam berbagai hubungan sosial, politik, ekonomi, dan mental-spiritual, melalui gerakan penyadaran kembali akan peran vitalnya dalam proses demokrasi.

Bersamaan dengan itu gerakan yang menuju terciptanya massa yang kritis perlu terus diupayakan, dengan peran intelektual di belakangnya. Karena itu seperti himbauan Arie, peran intelektual harus terus menerus dipertanyakan. Karena itu munculnya berbagai jenis intelektual bernuansa calo, seperti intelektual pengasong, intelektual bazaar, segera diminimalisir. Kalaulah kita bangsa Indonesia boleh optimistik, maka gantungannya pada kaum intelektual yang oleh Gramsci disebut intelektual organik. Jenis intelektual ini masih banyak di negeri ini, karena itu saatnya tampil ke depan dengan dukungan kelas bawah.

Melalui peran optimal dari para intelektual organik inilah membangun massa yang kritis akan dapat diwujudkan. Hanya dengan massa yang kritis, representasi rakyat adalah representasi yang sesungguhnya, sehingga demokrasi pun menjadi lebih substansial. Transformasi ini akan lebih cepat jika mentalitas calo yang telah membudaya segera ditekan surut, sehingga negeri ini tidak lagi terjebak pada sejarah negeri yang penuh ironi. Tetapi kalau menegok ke jendela empirik, ironi itu memang masih banyak sebagaimana yang direkam dengan baik oleh Arie Sujito dalam buku ini.

Yogyakarta, September 2012

Dr. S. Bayu Wahyonot

Daftar Isi



Tentang Penulis	vii
Ucapan Terima Kasih	ix
Pengantar Editor	xi
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xvii

Bagian I

MORALITAS PALSU

1. Perlawanan Sandal	3
2. Beban Berlapis TKI	5
3. Solidaritas Terbelok	7
4. Perlindungan pada TKI	9
5. Pemiskinan Baru	13

Bagian II

NEGARA SIBUK SENDIRI

1. Solidaritas Sosial	17
2. Pengetahuan Bencana	21
3. Pendekatan Alternatif Pengungsi	25
4. Negara Sibuk Sendiri	29
5. Kerentanan Masyarakat	31
6. Prita dan Rezim Medik	33
7. Rantai Kemiskinan	35
8. Marginalisasi Sosial	37

Bagian III

MEMAKNAI MOMENTUM

1. Komodifikasi Lebaran	43
2. Tahun Pembaruan	45
3. Memperkuat Solidaritas	47
4. Memberi Makna Maaf	51
5. Tahun Baru	53
6. Nasionalisme Beradab	57
7. Sang Pahlawan	59
8. Involusi Reformasi	61

Bagian IV

DISTORSI MEMORI POLITIK

1. Mencari Pahlawan	67
2. Reformasi Tercabik	71
3. Sumpah Pemuda	73
4. Kemerdekaan Sejati	75
5. Perlawanan Simbolik	77
6. Nasionalisme Bola	79
7. Perpindahan Ibukota?	83

Bagian V

DELEGITIMASI NEGARA

1. Pembangkangan Sipil	89
2. Distribusi Risiko	91
3. Korupsi Alquran	95
4. Rekening Gendut PNS	97
5. <i>High Cost Politic</i>	99
6. Politisasi Olahraga	101
7. Membela Desa	103
8. Disorientasi Birokrasi	105

Bagian VI

KEKERASAN DAN SABOTASE DEMOKRASI

1. Politik Perhatian Bom	111
2. Tragedi Mesuji	113
3. Aparat Represif	115
4. Sengketa Agraria	117
5. Politisasi Mental Komunal	119
6. Identitas dan Problem Struktural	123
7. RUU Intelijen	125
8. Bahasa Kekuasaan	127

Bagian VII

PARADE TEROR

1. Diskusi Tanpa Represi	133
2. Bom Bunuh Diri	135
3. Cuci Otak Anak Muda	137
4. Negara dan Teror	139
5. Teror Politik	141
6. Premanisme	143
7. Geng Motor Brutal	145
8. Anarkisme Hukum Rimba	147

BAGIAN VIII

MEMPERTANYAKAN PERAN INTELEKTUAL

1. Tanggung Jawab Intelektual	151
2. Hardiknas	153
3. Pergunjangan	155
4. Revolusi PSSI	157
5. Pemimpin Bangsa	159
6. Lembaga Ekstra Negara	161
7. Muktamar Muhammadiyah	165

Bagian I

Moralitas Palsu



I. Perlawanan Sandal



Rentetan peristiwa ketidakadilan terjadi di mana-mana. Mereka dari golongan atau kelas bawah begitu sering mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dan terjebak dalam represi hukum yang didistorsi oleh kepentingan aparatnya.

Baru-baru ini mencuat peristiwa ketidakadilan yang menimpa seorang siswa SMKN 3 Palu berinisial AAL (15), anak di bawah umur yang dituduh mencuri sepasang sandal jepit milik seorang anggota Brimob Polda Sulteng. Lalu ada pula kasus yang menimpa Amar, korban tindak kekerasan hanya gara-gara menendang pagar rumah seseorang karena kaget ada anjing, kemudian dipukuli pemilik rumah sampai matanya rusak. Anehnya, justru korban ditahan gara-gara perbuatan tidak menyenangkan.

Beberapa tahun dan bulan lalu kasus-kasus serupa pernah terjadi, misalnya derita yang dialami mBah Minah yang dituduh mencuri kakao dan diadili di Cilacap. Begitupun kasus yang dialami Basar-Kholil dituduh mencuri satu buah semangka dan dituntut oleh jaksa dengan hukuman lima tahun penjara, serta nasib Ibu Amirah (30) seorang pembantu rumah tangga dituduh mencuri sarung di Pamekasan yang kemudian dihukum. Kemungkinan masih banyak lagi kasus serupa yang belum terekspose.

Kisah sedih semacam itu mengindikasikan betapa hukum masih secara sepihak mendesak dan memojokkan posisi kaum miskin. Kita dapat komparasikan, begitu banyaknya kasus korupsi yang jelas-jelas melibatkan para pejabat dengan kroni-kroninya, berakibat kerugian uang negara miliaran rupiah, *toh* ironisnya mereka begitu mudah dibebaskan oleh pengadilan.

Faktanya, kaum miskin tidak memiliki ruang, sekaligus lemah dalam kemampuan menegosiasikan haknya demi membela diri agar mendapatkan keadilan. Hukum berdalil positivistik berproses secara asimetrik, di mana aparatnya abai dimensi etik dan nilai-nilai keadilan saat mengoperasikan pasal-pasal peraturan. Sudah menjadi rahasia umum jika mafia hukum yang diisi kasus suap menyuap dan perdagangan kasus masih marak berlangsung.

Pemenuhan unsur prosedural dengan pembuktian administrasi dalam peradilan jelas menyembunyikan hak yang pantas untuk menopang keadilan. Modusnya, prosedur hukum selalu disiasati bahkan dibajak oleh *interest* dan otorisasi yang melekat atau berisikan pada posisi aparat hukum. Tafsir hukum tidak memperhatikan keadilan dalam pengertian substansi, karena moralitas hukum dipalsukan oleh dominasi kepentingan sepihak sang penguasa.

Ketidakadilan penanganan kasus-kasus tertentu yang condong menyudutkan posisi kaum lemah (miskin) membuktikan praktik hirarki penindasan masih berlangsung di negeri ini. Ketidakadilan semacam ini berproses secara sistemik, mulai dari masalah struktur, konten dan kultur yang saling mengait. Problem sistemik itu diperjelas dengan ulah aparat hukum yang mengambil langkah dan keputusan konyol.

Perlawanan publik menanggapi peristiwa ketidakadilan yang menimpa kaum miskin sejauh ini terus menguat, solidaritas kian menjalar menjadi gerakan sosial. Gerakan pengumpulan sandal sebagai bentuk gugatan pada aparat hukum atas kasus AAL dapat menjadi pelajaran penting, bentuk akumulasi kemarahan rakyat. Itulah tamparan nyata pada aparat negara, agar memperbaiki praktik hukum secara benar dan adil. Karenanya, jika tidak ditanggapi dengan perbaikan nyata kemungkinan ledakan kemarahan dan protes sosial kian membesar bahkan radikal.

REPUBLIKA, 10 Januari 2012

2. Beban Berlapis TKI



Peristiwa tragis yang dialami Ruyati, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dihukum pancung di Arab Saudi menjadi keprihatinan yang mendalam. Hingga kini negara juga harus bertindak cepat dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan sekitar 23 TKI yang tengah mengalami ancaman hukuman mati di negara lain.

Kejadian kekerasan, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan yang dialami para TKI sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Ibarat gunung es, kasus-kasus itu senantiasa terjadi, menumpuk dan tidak ada penyelesaian secara memadai.

Masyarakat bawah yang mengalami dan menyaksikan ekspose kasus ini tentu saja bersedih dan prihatin. Tetapi, rangkaian peristiwa semacam itu toh tidak menyurutkan niat para pencari kerja untuk tetap berangkat ke negara tujuan yang dianggap bisa mengubah kehidupannya. Beberapa alasan dapat disebut.

Pertama, kemiskinan memaksa mereka nekat untuk mencari penghasilan demi menopang ekonomi keluarga ke negara lain betapa pun risiko begitu berat. Kedua, di dalam negeri lapangan kerja relatif terbatas, sementara jumlah pengangguran terus bertambah. Ketiga, kapasitas sumber daya TKI yang rata-rata dikategorikan *low skill* terus tertampung oleh peran PJTKI yang begitu aktif menyalurkannya dalam pencarian kerja, dengan segala 'iming-iming' yang menggoda.

Sayangnya kondisi semacam ini, tidak diikuti oleh sistem perlindungan TKI secara kuat. Peran diplomatik pemerintah dalam hal kerja sama penyaluran tenaga kerja, secara umum dapat dikatakan masih buruk dan lemah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyelenggaraan penyaluran TKI ke luar negeri diliputi mafia, di mana

pencarian rente oleh 'oknum-oknum' dengan jumlah banyak dalam pola jaringan di birokrasi maupun swasta telah memperparah kelangsungan pemerasan atas TKI.

Begitu banyak kritik dan kecaman bertubi-tubi atas penyelenggaraan pengiriman TKI. Namun semua itu tidak segera diikuti pembenahan sistematis baik oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, maupun Kementerian sosial. Ini sungguh ironis.

Pemerintah telah mengambil langkah jangka pendek berupa moratorium pengiriman TKI. Sebagai reaksi awal, kebijakan ini perlu diikuti beberapa langkah strategis. Pertama, harus ada evaluasi menyeluruh sistem rekrutmen dan pengiriman TKI dari hulu sampai hilir, serta koreksi pada lembaga-lembaga penyelenggara baik pemerintah maupun swasta.

Kedua, sejalan dengan moratorium dilakukan, mereka yang telah ditampung dan dalam proses pengiriman hendaknya segera diberi konsesi cara cepat berupa pengembalian uang yang telah dikeluarkan selama ini, serta menyalurkan mereka pada pekerjaan yang bisa mereka dapatkan. Ketiga, kasus-kasus yang tengah dialami TKI yang belum diselesaikan, harus segera ditangani dengan sistematis dan serius untuk mencari akar masalah, mengurangi beban berantai serta mencari formula strategis yang tepat.

Keempat, dalam jangka menengah negara harus segera menyusun *blue print* dan skema besar pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat agar mereka betul-betul terjamin di dalam negeri, sehingga tidak nekat pergi menjadi TKI ke luar negeri dengan segala risikonya.

REPUBLIKA, 28 Juni 2011

3. Solidaritas Terbelok



Kisah duka tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri selalu menjadi perhatian, meskipun belum tuntas diselesaikan. Hingga kini, problem mereka seputar kemiskinan, penipuan, tindakan kekerasan, ancaman hukuman mati, dan seterusnya.

Kini, ada cerita terbaru kontroversial yang dialami Darsem. Seperti diketahui, Darsem, tenaga kerja wanita asal Subang, Jawa Barat, lolos dari hukum pancung di Arab Saudi. Sebagai TKW, Darsem lebih beruntung dibanding Ruyati yang akhirnya merengang nyawa karena di hukum Pancung. Pengadilan Arab Saudi membebaskan Darsem dari hukuman mati setelah Pemerintah Indonesia membayar denda atau *di'yat*.

Saat proses advokasi berlangsung, sejumlah aksi simpati masyarakat akhirnya sempat mengumpulkan uang untuk penyelamatan Darsem. Sungguh fantastik, secara komulatif sumbangan telah terkumpul dari pemirsa TvOne sebesar Rp 1,2 miliar. Sebagai catatan, apa yang dialami Darsem tidak sendiri, karena masih banyak TKW yang juga terlunta-lunta dan mengalami beban penderitaan yang hampir mirip.

Namun uniknya, dalam perkembangannya, Darsem dituding telah membeli banyak harta dengan uang yang diperolehnya dari sumbangan masyarakat tersebut, dan terkesan menjadi orang kaya baru (OKB). Lepas benar atau tidaknya perilaku Darsem, kita perlu kritis dalam memaknai gejala semacam ini, untuk menemukan jalan keluar.

Jika kita tengok ke belakang, bahwa upaya positif yang digalang media massa untuk membantu memecahkan masalah yang dialami TKW, telah banyak mendapat dukungan. Kepedihan nasib warga negara Indonesia yang mengadukan nasibnya ke luar negeri, yang

rata-rata perempuan, diekspose oleh media massa, dan menjadi keprihatinan banyak orang karena rentetan kasus yang membebani mereka.

Secara normatif, negara sebenarnya paling bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan tenaga kerja, termasuk TKW di luar negeri. Mereka kadang disebut pahlawan, tetapi beberapa kasus justru menjadikan mereka sebagai korban. Selain diperas oleh mafia pengiriman tenaga kerja, perlindungan hukum yang lemah, serta perlakuan sewenang-wenang sang majikan, membuat beban yang dialaminya menjadi berlapis.

Dengan konteks semacam itu, baik derita yang dialami (alm) Ruyati, Darsem, maupun para TKW lainnya adalah nasib yang hampir sama yang perlu mendapatkan perhatian negara khususnya, dan masyarakat umumnya. Jika cara pandang ini dipakai, maka solidaritas atas Darsem yang digalang TvOne berupa pengumpulan sumbangan pemirsa dimaknai sebagai merepresentasi rasa empati masyarakat pada TKW-TKW lain yang juga sedang mengalami masalah yang sama dan sampai sekarang belum terselesaikan.

Untuk memberi makna positif atas solidaritas dan tidak terbelokkan sekadar solidaritas bersifat pribadi, perlu kiranya pihak pengelola sumbangan seperti TvOne misalnya, bisa meyakinkan kepada Darsem dan keluarganya, agar memaknai sumbangan pemirsa itu terkait dengan rasa solidaritas pada derita TKW yang sampai saat ini masih terkatung-katung nasibnya. Jangan sampai kasus Darsem ini berdampak menurunkan solidaritas sosial warga, karena pihak yang dibantu justru tidak tumbuh rasa solidaritas yang sebanding.

REPUBLIKA, 9 Agustus 2011

4. Perlindungan pada TKI



Peristiwa tragis penganiayaan yang menimpa Sumiyati dan tewasnya Kikim Komalasari di Arab Saudi menjadi keprihatinan kita bersama. Kasus itu merupakan rentetan masalah nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, khususnya perempuan, yang selama ini telah membanting tulang mengais rejeki dihadapan risiko begitu besar.

Anehnya, begitu banyak jumlah korban kebiadaban kelakuan para majikan di negara lain terhadap TKI, namun upaya untuk mencegahnya tidak dilakukan secara serius. Pendekatan yang selama ini dilakukan pihak-pihak pemerintah maupun lembaga pengirim TKI ibaratnya seperti ‘pemadam kebakaran’.

Reaksi atas masalah hanya begitu kencang pada saat ada kasus semata. Padahal potensi berulangnya peristiwa yang sama tidak diantisipasi. Wajar jika langkah pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada masalah ini senantiasa dipertanyakan. Mari kita analisis masalah ini dari sisi alasan-alasan para TKI itu memilih kerja di luar negeri, di antara sejarah panjang kekerasan yang pernah dialami para pekerja sebelum-sebelumnya.

Pertama secara struktural, rata-rata kemiskinan menjadi daya dorong dan latar belakang mengapa para TKI harus mengambil tantangan bekerja di luar negeri dengan segala beban berat yang membayangnya. Sementara hal itu dihadapkan kenyataan sempitnya lapangan kerja di Indonesia. Karena pendidikan formal yang rendah dengan mengandalkan *skill* terbatas maka peluang struktur kerja bagi mereka demikian sempit.

Kedua, gambaran kerja menjadi TKI di negeri orang gajinya dianggap lebih memadai, paling tidak yang nampak secara kuantitatif dan

formal, dibandingkan kerja di Indonesia dengan standar kapasitas yang sama. Daya tarik itu sangat kuat, karena pengalaman mereka yang pernah bekerja di luar negeri konon gajinya bisa ditabung sehingga mampu menopang ekonomi keluarga.

Ketiga, begitu aktifnya para lembaga jasa pengiriman TKI memengaruhi dan membujuk masyarakat, khususnya di pedesaan, dengan segala gambaran yang muluk-muluk terkait masa depan ekonomi yang bakal diperolehnya. Hanya sayangnya, manajemen pengiriman tenaga kerja serta perlindungan yang semestinya didapatkan oleh TKI tidak sebanding dengan harapan dan beberapa alasan para pekerja itu.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa para pengelola jasa pengiriman tenaga kerja, bagaimanapun jelas mendapatkan keuntungan dari industri usaha tenaga kerja ini. Begitupun negara, juga mendapatkan pajak dari kegiatan dengan segala label pungutan resmi maupun liar.

Selama ini urusan nasib TKI ini telah ditangani Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Namun kompleksitas yang melekat dari masalah TKI juga tidak kunjung usai. Tidak habis pikir pula, peran diplomat sebagai wakil negara di luar negeri, selalu terlambat mendiagnosis.

Lagi-lagi, fungsi diplomasi sangat lemah untuk mendesak agar penuntasan kasus ini secara adil. Bukan hanya mengatasi kasus, tetapi bagaimana strategi mengantisipasi agar tidak terulang kembali peristiwa yang sama.

Banyak penilaian muncul, bahwa duta besar tidak peduli dan condong kurang peka pada nasib TKI. Mereka hanya sibuk urusan tamu negara yang tidak ada kaitannya dengan nasib rakyatnya yang bekerja di negara dimana dirinya menjadi perwakilan.

Kementerian Tenaga Kerja wajib menuntaskan masalah ini, secara diplomatik mengupayakan seoptimal mungkin agar proses hukum pengusutan pelaku kekerasan pada TKI diselesaikan dengan tuntas, adil dan transparan pada negara dimana kasus ini terjadi.

Begitupun BNP2TKI perlu menjadikan momentum penanganan kasus ini untuk segera mengevaluasi secara mendasar, menata ulang sistem dan manajemen perlindungan TKI secara komprehensif, sekaligus menjalankannya secara konsisten dengan kontrol efektif. Penerbitan pengelola jasa TKI harus dilakukan secara ketat dan disiplin.

Tantangan besar dalam jangka panjang adalah bagaimana bangsa ini berjuang menciptakan lapangan kerja yang terbuka untuk rakyat kecil, berorientasi kesejahteraan, agar mampu mencegah mobilitas TKI ke luar negeri dengan segala risiko begitu berat tersebut.

REPUBLIKA, 23 November 2010

5. Pemiskinan Baru



Sudah sekian lama pembangunan mengalami mitologisasi. Cara pandang normatif menekankan bahwa pembangunan merupakan proses transformasi dari keterbelakangan ke arah yang lebih maju. Tetapi dalam kenyataan sejarahnya, pembangunan seringkali justru terjebak memproduksi ketidakadilan, keterbelakangan, dan kesenjangan baru. Ironi semacam ini telah diperlihatkan pada banyak kasus.

Pada satu sisi pihak elit politik dan ekonomi mengklaim begitu rupa keberhasilan program pembangunan, tetapi di situ pula jika ditelisik ternyata tersimpan pembengkakan kemiskinan, pengangguran, masalah sosial sejenis. Koreksi atas konstruksi semacam ini juga dilakukan, baik dalam tradisi akademik maupun level praksis kebijakan. Muncullah model baru pendekatan pembangunan sebagai antitesis konsep lama yang dianggap tidak relevan lagi, misalnya saja apa yang populer dengan sebutan pemberdayaan.

Sebagai konsep dan pendekatan alternatif, pemberdayaan akhirnya dipakai hampir semua pihak. Dulu lebih dipromosikan dan diinisiasi oleh para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi kampus. Tetapi lama-kelamaan pemerintah pun menggunakan konsep pemberdayaan melekat pada program atau kebijakan, rancang bangun kelembagaan lengkap dengan skema sumberdaya keuangan.

Alhasil, konsistensi pembangunan dan pemberdayaan tidak berlangsung lama. Rangkaian program yang tersaji tidak membawa terobosan atau perubahan baru secara signifikan, kecuali sebarang label atau jargon semata. Itupun kadang menjadi komoditas dan mengalami politisasi.

Sebut saja program penanggulangan kemiskinan. Pada dokumen perencanaan dan implementasi program prioritas penanggulangan

kemiskinan yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah, penuh kisah paradoksal. Misalnya, rata-rata budget yang tersedot untuk program mengatasi kemiskinan dari tahun ke tahun meningkat 200-250 persen. Tetapi anehnya, penurunan angka kemiskinan tidak lebih dari 2-5 persen semata.

Klaim keberhasilan tak segaris dengan kenyataannya, kemiskinan dan ketidakberdayaan masih merebak sedemikian rupa dirasakan masyarakat. Neraca program pembangunan begitu timpang, antara dokumen administratif birokratik dengan fakta empirik. Maka itu tidak mengherankan jika penyebutan keberhasilan di atas kertas bersifat administratif tentang keberhasilan pembangunan perlu ditelaah secara kritis.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan rata-rata masih *mainstream* tata kelola programnya masih belum bergeser dari paradigma lama. Kemiskinan juga masih termaknai sebatas komoditas proyek dalam disain birokrasi yang korup.

Bahkan yang perlu mendapat perhatian serius saat ini adalah, kecenderungan begitu banyaknya program 'pemiskinan baru'. Yakni adanya kebijakan pembangunan hasil keputusan teknokrasi (birokrasi) dan politik (parlemen) dengan rute prosedural-formal demokratik, tetapi justru substansinya menstimulasi lahirnya kemiskinan baru.

Hal itu terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Pola program pembangunan yang hanya berorientasi pada praktik neoliberalisme, dikelola dengan corak oligarkis yang mematkan sektor ekonomi kerakyatan. Pemiskinan gaya baru inilah yang sekarang terus mengisi mitos pembangunan, yang berlanjut menjadi mitos kapitalisme global.

REPUBLIKA, 13 September 2011

Bagian II

Negara Sibuk Sendiri



I. Solidaritas Sosial



Dalam tahun-tahun belakangan ini, Indonesia diguncang rentetan peristiwa bencana alam. Mulai dari gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan bencana sejenis. Hal ini berakibat pada kerugian materi, korban nyawa, serta beban rusaknya institusi sosial. Berbagai analisis menunjukkan, bahwa posisi geografis wilayah Indonesia berada pada jalur lempengan yang dianggap rawan dalam struktur perubahan gerak bumi.

Situasi ini menuntut negara dan masyarakat terus menerus harus mengatasi dan mengantisipasi berbagai risiko yang ditimbulkan ancaman bencana alam tersebut. Mulai dari pembuatan regulasi yang mengatur prosedur penanganan bencana, pembentukan tata kelembagaan yang menangani masalah itu, sampai penyiapan kemampuan masyarakat untuk peka mengurangi risiko bencana.

Belajar dari pengalaman sejauh ini, salah satu faktor penting penanganan bencana adalah kemampuan dan kesadaran masyarakat sebagai bentuk solidaritas sosial dalam menolong para korban. Peristiwa bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Papua, Sumatra Barat, NTT, Sulawesi, serta beberapa daerah lainnya mengindikasikan kuatnya solidaritas sesama warga mengambil inisiatif dapat membantu mengurangi beban para korban.

Masa tanggap darurat, dimana peran negara kadang lamban akibat birokratisasi yang berbelit, justru warga masyarakat secara cepat bergerak. Mulai dari terlibat langsung membuat pos komando (posko) lapangan, penggalangan dana sumbangan di berbagai daerah, kampanye di media massa sebagai pusat *up-dating* informasi, serta

munculnya relawan-relawan tenaga lapangan yang terjun langsung membantu para korban.

Ekspresi solidaritas sosial ini mulanya menjadi praktik budaya dan berkembang khususnya di level komunitas, apa yang dikenal dengan tradisi gotong-royong. Peradaban yang terus meningkat makin meyakinkan perluasan kesadaran solidaritas sosial itu di tingkat daerah, nasional sampai dunia.

Betapa kekuatan mereka menimbulkan rasa haru yang begitu besar, spirit berkorban demi sesama. Bantuan mengalir begitu cepat dari berbagai pihak, saat media massa memberitakan peristiwa bencana alam yang terjadi di lokasi tertentu. Mereka itu mengasosiasikan diri di dalam ormas, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, lembaga agama, jaringan kerja profesional, parpol, komite-komite yang terbentuk secara *ad hoc* berbagai kelompok apapun, bahkan individu-individu yang dihimpun oleh media massa. Sumberdaya semacam itu sungguh luar biasa besarnya, begitu tak ternilai.

Bayangkan saja, jika semua masalah itu harus semata ditangani oleh negara sebagai mandat konstitusi agar memenuhi hak-hak warga negara serta memberikan perlindungan atas berbagai ancaman apapun. Sangat sulit dibayangkan akan teratasi semua beban tersebut. Sebaliknya, justru peran masyarakat yang ditunjukkan dengan banyak cara itu, dapat dikatakan telah melampaui kapasitas negara.

Jiwa kebersamaan warga tidak lain adalah *social capital* yang ditransformasikan menjadi semen perekat terbangunnya kohesi sosial. Tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adalah, bagaimana mereka mampu memelihara dan mengembangkan nilai itu pada rentang sejarah yang dinamik untuk saat ini dan kedepan. Perubahan sosial yang terus berlangsung, bagaimanapun telah mendorong pola kreatif memperkuat kerjasama.

Struktur masyarakat Indonesia begitu majemuk (*plural*) baik karena perbedaan etnik, agama, suku dan ras, afiliasi politik, serta jangkauan geografis yang secara fisik jauh, menuntut terus dipupuknya spirit kebersamaan untuk saling memperkuat ikatan kemanusiaan. Terkhususkan sebagai entitas bangsa, komunitas besar 'keindonesiaan' perlu belajar dari pengalaman solidaritas sesama dalam peristiwa penanganan bencana ini.

Seperti diketahui, praktik kemanusiaan adalah cermin peradaban sebuah bangsa. Oleh karenanya, kemampuan menjaga nilai dan ikatan solidaritas sosial alangkah berharganya jika mampu pula dikembangkan kedalam praktik nyata mengisi *nation building* di negeri ini, sehingga karakter solidaritas sosial menjadi jati diri kuat bangsa Indonesia, sebagaimana pernah tergariskan dalam sejarah awal negeri ini berdiri.

REPUBLIKA, 2 November 2010

2. Pengetahuan Bencana



Peristiwa bencana alam, letusan Gunung Merapi khususnya, telah menelan korban begitu besar. Bukan saja rusaknya rumah, harta benda, maupun infra struktur. Namun, lebih dari itu adalah banyaknya derita pedih luka-luka di tubuh para korban akibat terbakar, bahkan merenggut nyawa ratusan orang.

Tragedi letusan Merapi ini sebagai sinyal nyata mengenai perlunya memperhatikan risiko pada manusia akibat perubahan alam yang terjadi besar-besaran. Semenjak gempa bumi sering melanda berbagai daerah di Indonesia, secara beruntun gunung berapi mulai menunjukkan intensitas keaktifannya secara luar biasa.

Kondisi dan posisi geografis Indonesia begitu banyak gunung api aktif, telah menciptakan situasi rentan. Analisis yang berkembang sejauh ini tidak mudah memprediksi dan memecahkan misteri gempa bumi, terutama tektonik secara presisi. Bahkan sampai berlangsungnya tsunami.

Begitupun bencana alam gempa vulkanik gunung Merapi, analisis pola dan dampaknya belum sepenuhnya mendekati titik presisi. Perubahan struktur alam besar-besaran selama ini nampaknya belum diikuti akurasi data dan perspektif komprehensif. Termasuk keterbatasan alat pendukung analisis. Kecuali itu, masyarakat juga masih terbatas kemampuannya dalam hal pengurangan risiko bencana.

Menyimak peristiwa bencana Merapi, di antara berbagai analisis terlihat berlangsung pertarungan cara pandang. Antara paham rasional dan mistisisme, yang satu sama lain saling berebut pengaruh mengisi situasi ketidakpastian. Misalnya saja, mitos letusan Merapi serta perangkat keyakinannya berhasil direproduksi demi menjelaskan dan membangun justifikasi berlebihan.

Spekulasi mistisisme Merapi ini makin masuk pusaran informasi yang begitu carut-marut (*crowded*). Sebaran rumor dan isu mengenai gempa, letusan, ataukah kecacauan *misinformation* melalui sms dan berita, begitu liar. Dampaknya, muncul reaksi kepanikan masyarakat, makin terombang-ambing diliputi ketidakpastian informasi.

Inilah situasi cukup memprihatinkan. Apalagi, kadangkala media massa cekatan ikut mereproduksi hal semacam itu. Sementara pengetahuan kebencanaan yang dibangun dengan nalar ilmiah, melalui prediksi atas kecenderungan pola perubahan Merapi juga berupaya meyakinkan masyarakat agar lebih waspada, responsif dan aktif mencari informasi secara baik. Analisis empirik menggunakan instrumen terpasang di beberapa sudut dan area Merapi, paling tidak telah membantu menjadi petunjuk bagi masyarakat. Merekapun mulai belajar rasional memahami peristiwa letusan Merapi.

Upaya pemerintah dan masyarakat, serta topangan peran aparat militer dan kepolisian telah berhasil membantu pengungsi dan menolong para korban. Untuk ukuran penyiapan penanganan bencana, sistem kerja dalam penanggulangan bencana Merapi dapat dikatakan begitu memadai. Tetapi sayangnya, memang tidak mudah secara cepat membangun pikiran rasional secara instan untuk urusan mengatasi soal Merapi ini.

Beberapa kasus dimana masyarakat enggan mengungsi, kendati pun telah dibujuk dan bahkan dipaksa mengungsi, merupakan hal memprihatinkan. Rangkaian alasan kultural biasanya berisi keyakinan diri dalam ikatan komunal, yakni hubungan diri dengan Merapi yang tak terpisahkan. Akibatnya keyakinan ini memunculkan kenekadan ambil risiko.

Namun, ada pula yang enggan pergi oleh karena alasan struktural. Mereka tidak rela jika sumber produksi utamanya, yaitu ternak sapi dan kambing akhirnya hilang atau mati saat ditinggal mengungsi. Golongan masyarakat semacam ini mudah dipahami keberaniannya menantang maut, justeru karena belum ada jaminan atas ternak-ternaknya yang selama ini sebagai sumber penghidupan.

Pemerintah pernah menyatakan bahwa seluruh ternak yang jadi korban Merapi akan diganti. Tetapi itupun belum mampu mengikat masyarakat untuk cepat mengungsi. Tantangan serius yang perlu

mendapatkan perhatian saat ini dan kedepan adalah, bagaimana produksi dan pengembangan pengetahuan rasional dan kesadaran kritis harus diorientasikan sebagai kekuatan utama mengatasi bencana, kendatipun senantiasa dihiasi pendekatan atau ragam cara pandang kultural.

REPUBLIKA, 9 November 2010

3. Pendekatan Alternatif Pengungsi



Kira-kira sudah lebih dari sepuluh hari, para pengungsi bencana Gunung Merapi harus tinggal di posko-posko atau barak pengungsian sementara. Sejauh ini, betapapun ledakan eksplosif telah berlalu, tetapi belum ada garansi secara pasti kapan Gunung Merapi ini tidak menjadi ancaman penduduk jika kembali ke kampungnya pada lintasan dekat. Kalkulasi pengetahuan rasional menggunakan alat deteksi, menunjukkan aktivitas erupsi merapi masih aktif dan belum menentu.

Hal ini tentu menjadi pertimbangan, perlunya menyusun skenario agar beban para pengungsi tidak makin berat di tengah ketidakpastian kondisi yang mereka alami. Secara empirik, para pengungsi selama ini relatif sudah ditangani oleh pemerintah dan berbagai inisiatif masyarakat secara mandiri, bahkan ditopang lembaga donor melalui berbagai cara. Mulai dari pemberian bantuan berupa nasi bungkus, baju layak pakai, peralatan masak, MCK, serta kelengkapan dasar buat mereka.

Bahkan sejumlah pihak juga berinisiatif memfasilitasi aktivitas berorientasi *trauma healing* untuk menumbuhkan semangat baru dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Beban para pengungsi memang sangat kompleks. Bukan saja mereka membutuhkan keperluan sehari-hari terkait kebutuhan dasar sebagaimana dapat direspons secara cepat oleh pihak-pihak yang punya otoritas dan daya voluntarisme masyarakat sebagaimana digambarkan di depan. Lebih dari itu, kebutuhan mereka menyangkut aktivitas sosial dan ekonomi dimana menjadi bagian dinamika kehidupan dirinya.

Disitulah menjadi penyebab daya *stress* cukup besar, karena dirinya harus tercerabut (*disembedded*) dari struktur sosial ekonomi dimana

mereka berasal. Wajar saja jika mereka secara diam-diam kembali ke kampungnya, meskipun daerah tersebut statusnya masih diputuskan rawan oleh pihak otoritas. Hal ini tentu berisiko, karena dengan satu Merapi masih dinyatakan rawan bagi penduduk yang tinggal dalam radius tertentu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Tetapi apa mau dikata. Tindakan mereka untuk kembali itu, dapat dipahami dalam konteks kebutuhan sosial, diluar kalkulasi risiko yang masih membayangnya. Keinginan dan kenekadannya dapat dimaknai sebagai cara mereka untuk menembus sekapan beban selama di pengungsian yang kian menumpuk.

Pikiran mengenai keadaan rumah yang rusak disapu oleh awan panas dan debu, ternak mereka yang mati, peralatan yang porak poranda, nasib sekolah anaknya yang terkatung-katung, mata pencaharian rutin untuk penghidupan juga hilang, bahkan relasi bertetangganya harus koyak karena perpisahan akibat bencana.

Tahapan untuk berfikir dan menyusun skenario *recovery* pasca bencana juga belum sepenuhnya operasional, karena status bencana masih belum pasti. Ini tantangan serius, yang berarti sampai kapan para pengungsi itu diperkenankan kembali juga belum jelas pula.

Nampaknya kita perlu menyusun skenario-skenario baru diluar model posko yang terkonsentrasi di tempat tertentu yang ada selama ini. Perlu kiranya dipikirkan, bagaimana membangun institusi sosial kewargaan demi mengatasi problem pengungsi ini.

Salah satu alternatif, hal ini juga beberapa kasus telah dipraktikkan, adalah mengembangkan disain pengungsian terintegrasi dengan komunitas warga. caranya, dengan bertumpu pada kesadaran warga, nasib pengungsi diintegrasikan dengan komunitas desa, dimana tiap keluarga dipersilahkan menampung pengungsi semampunya.

Tentu pendekatan ini ditopang oleh dasar hubungan kekerabatan, pertemanan, pengenalan, atau semata rasa solidaritas sosial secara terbuka. Interaksi semacam ini mensaratkan perlunya saling pengertian antara pihak yang ditempati secara sukarela dengan pengungsi. Keadaan dan beban sosial menjadi dasar kohesi komunitas. Jika model ini dilakukan, pemerintah dan pihak-pihak lain yang membantu bisa mengkoordinasikan berbasis desa.

Saya yakin cara ini lebih berorientasi pelebagaan sosial dan tidak sekadar darurat, ditengah situasi ketidakpastian bencana yang berlangsung sejauh ini. Yogyakarta dan lingkungan masyarakat Jawa Tengah memiliki *social capital* yang besar untuk mengembangkan model pengungsian integrasi komunitas tersebut. Semoga cara ini bisa mengurangi beban sosial mereka.

REPUBLIKA, 16 November 2010

4. Negara Sibuk Sendiri



Simaklah betapa lembaga elemen negara seperti pemerintah, DPR, dan aparat peradilan (yudikatif) terlalu sibuk dengan segala kontroversi. Sementara masyarakat dengan beban dan deritanya, nyaris tidak tertangani dengan baik dan sistematis.

Tiap hari, ekspose media massa, baik cetak atau elektronik, berisi ketegangan kepentingan antarpolitis yang pemegang otoritas, yang rata-rata begitu menciptakan kegaduhan. Kadang masalah bersifat substansial, tetapi lebih sering masalah yang 'remeh-temeh'.

Representasi isu yang menyeruak dalam perbincangan publik, mengisyaratkan dominasi sekelompok elit politik, seolah itulah masalah besar yang melanda bangsa ini. Padahal, itu bagian dari konstruksi elit, hanya karena mereka menguasai alat-alat produksi informasi, lalu menyemburkan hasrat berpolemiknya ke publik.

Tidak ada kaitannya secara langsung dengan urusan rakyat kebanyakan. Sebut saja saja beberapa hal. Misalnya, urusan ketegangan dalam koalisi sekretariat gabungan pemerintahan, *reshuffle* kabinet, kontroversi pemutaran video di DPR, migrasi politisi ke parpol lain, tawar menawar kekuatan berkuasa dan oposisi, manuver saling serang antar elit di DPR, hasil polling lembaga survei tentang popularitas tokoh, serta ulah-ulah konyol elit politik dan hukum. Peristiwa itu menciptakan ketidakpercayaan publik pada dinamika yang berlangsung.

Sementara di sisi berbeda, masalah-masalah serius yang dihadapi masyarakat tidak terartikulasikan pada wacana publik, apalagi mampu memengaruhi perubahan dan perbaikan kebijakan. Beberapa contoh dapat disebut. Peristiwa banjir dan tanah longsor, bencana gempa dan korban letusan gunung berapi, kelaparan dan kekeringan, kemiskinan

dan bentrokan masyarakat pinggiran, penggusuran pedagang kaki lima, serta ragam ancaman disintegrasi sosial oleh menguatnya politik identitas yang menghantui bangsa ini, kurang mendapatkan tanggapan serius.

Kalaupun para elit politik merespons masalah krusial, rata-rata mereka itu mengedepankan nafsu orientasi citra dibanding menumpukkan komitmen buat rakyat. Baik itu yang sedang berkuasa, maupun oposisi, baik tingkat nasional maupun level lokal, pola-pola yang dipakai relatif sepadan. Kontroversi, seringkali menjadi ajang eksistensi diri mempengaruhi daya jangkau membangun popularitas.

Idealnya, mereka yang memiliki otoritas di bidang masing-masing, mengambil peran proporsional, menautkan apa yang dilakukan dengan tuntutan publik. Di bidang hukum, antara aparat kepolisian dengan kejaksaan, serta hakim saling bertengkar di media massa, itupun kadang dengan segala gaya emosional. Antara Parpol di DPR saling menyudutkan, kadang sangat pribadi dan terjebak pada wilayah yang tidak ada hubungannya dengan peran strategis lembaga parlemen.

Negara terlalu *fragmented* peran dan pola kerjanya. Akibatnya, masalah negeri ini kadang tidak terlalu berat, tetapi gara-gara cara penanganannya tidak efektif, membuat beban menjadi besar. Kerisauan ini tentunya harus menjadi bahan refleksi bagi aparat negara, untuk senantiasa mengubah cara kerjanya.

REPUBLIKA, 7 Juni 2011

5. Kerentanan Masyarakat



Negeri ini tengah ‘galau’ mengalami beragam ujian, dengan segala kerumitan untuk mengurai rangkaian masalah. Diyakini, bahwa reformasi yang berangkat pada 1998 lalu, menjadi titik awal melakukan pembaharuan menuju perbaikan. Karenanya, episode demi episode perubahan dilangsungkan. Cita rasa dan imaji mengubur keadaan ke-lam politik masa lalu telah meyakinkan kehendak menyongsong era baru.

Bahkan menjadi narasi besar, yang diucap atau digaungkan di tiap mimbar, forum, janji mulia, serta eksemplar berita yang membanjiri jagat informasi. Bukan saja didendangkan para aktivis demokrasi yang sejak awal memang menjadi motor gerakan reformasi. Tetapi para pejabat dan penguasa baru pun begitu fasih mengeja kata demi kata, untaian kalimat yang kesemua meyakini perbaikan keadaan itu bakal hadir.

Seiring berjalannya waktu, harapan itu menyusut. Perbaikan substansial yang diharapkan tidak kunjung tiba, kecuali aroma wangi citra dan polesan yang tidak memberi arti sebagai ‘pembeda’ sebagai produk perubahan. Apatisme menjadi gejala jamak hampir menjangkiti sebagian besar masyarakat. Sejatinya, apatisme itu sebagai reaksi keadaan yang tidak menentu, meskipun gelagatnya menuju frustrasi sosial.

Akhir-akhir ini, sering bermunculan fenomena perselisihan antarwarga dengan ragam dalih dan modus. Rata-rata mengarah pada pembentukan sentimen kelompok yang berlebihan. Atau egoisme diri yang terus menjadi ledakan tanpa kendali, dengan menemukan dalil pembenar karena ketidakmampuan lembaga-lembaga pemegang otoritas menjaga keteraturan dan keadilan.

Sebutlah misalnya anarkisme geng motor yang marak dan meresahkan masyarakat, perselisihan antar milisi sipil pamer kekerasan, arogansi 'jagoan' di jalanan dengan membengkakkan sikap sok hebat, serta tindakan konyol korupsi politik, dan seterusnya. Kisah-kisah itu terekam, terpublikasi, dan direproduksi dengan mudahnya di media massa sehingga melahirkan sejumlah kecenderungan paradoksal. Ada keprihatinan, ketakutan, maupun kemarahan. Tetapi ada pula yang terprovokasi untuk bertindak dengan makna serupa.

Tiba-tiba saja masyarakat begitu mudah kehilangan pegangan. Dirinya sebagai warga negara terombang-ambing tidak mendapatkan jalan keluar mengatasi sengkabut itu. Saat di mana negara sebagai pemilik otoritas, seperti pemerintah, parlemen, institusi hukum, aparat keamanan, tentara, dan lembaga lainnya yang diberi mandat konstitusi bertanggung jawab melindungi warganya atas beragam ancaman itu ternyata tidak responsif.

Ironisnya, aparat negara justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Tidak diingkari jikalau suasana ketidakpastian itu terdistorsi pada jalan belok munculnya tindakan main hakim sendiri, atau terjadi praktik penggandaan kekerasan tanpa beban. Perselisihan begitu mudah tercebur pada kekerasan dan anarkisme konyol.

Masyarakat dalam situasi begitu rentan. Kita perlu menumbuhkan kesadaran kritis agar mampu keluar dari 'rasa pemakluman' atas situasi tersebut. Kerentanan jangan sampai dimanipulasi atau dikomodifikasi demi mempertebal hasrat pragmatis, apapun wujudnya. Tetapi, sebaliknya membangkitkan energi kolektif memecahkan rangkaian problem itu demi cita-cita bangsa.

REPUBLIKA, 08 Mei 2012

6. Prita dan Rezim Medik



Kisah pedih masyarakat sipil di hadapan institusi hukum adalah realitas yang masih terus berulang. Prita, sosok ibu yang demi nasib anaknya mengungkapkan kekecewaan atas pelayanan rumah sakit swasta di Jakarta, ternyata harus dikalahkan oleh ‘rezim medis’ yang menggunakan jalur hukum konservatif. Hukum yang hanya bertumpu pendekatan legal di dalam mengatasi masalah sosial.

Kasus yang menimpa Prita sebenarnya sudah berlangsung beberapa bulan lalu. Tahapan awal proses hukum di Pengadilan Negeri dan Tinggi, kemenangan diperoleh Prita berupa bebas murni dengan topangan solidaritas sosial bertajuk ‘koin prita’. Namun, saat Jaksa menaikkan proses ke Mahkamah Agung (MA), ternyata justru MA membatalkan putusan bebas murni Prita Mulyasari.

Karuan saja, keputusan MA sebagai lembaga yang dijuluki ‘benteng terakhir keadilan’ ini melahirkan kontroversi, sekaligus menjadi gejala ironis. Putusan MA, dengan nalar legalistik-konservatif semacam itu dapat dikatakan mengabaikan prinsip *justice value and sense of law*. Hukum hanya bergerak pada lintasan dan tafsir sempit, demikian abai dari pemihakan pada mereka yang tidak berdaya (*powerless*) atau korban.

Ekspresi ‘curhat’ Prita melalui surat elektronik saat mengalami ketidakberesan pelayanan kesehatan rumah sakit yang menimpa pada anak kesayangannya, tentu hal yang wajar. Seorang ibu berupaya berbagi resah, tujuannya agar mendapatkan dukungan moral, sosial, atau advokasi agar kasus yang sama tidak menimpa pasien lainnya.

Bahkan, keresahan itu perlu dimaknai sebagai input agar rumah sakit mampu merefleksikan dirinya dalam pelayanan kesehatan.

Dengan begitu, curhat adalah bagian sikap kritis, hak pasien sebagai warga negara yang dilindungi konstitusi. Hampir sama dengan kolom surat pembaca tertulis di media massa, email Prita adalah bagian komunikasi kritis untuk membenahi suatu kebijakan, yang bisa dialamatkan pada insitusi negara, atau lembaga sosial ekonomi, terlebih pada lembaga bisnis.

Karena itu tidak sewajarnya, bahkan disebut melanggar hak pasien sebagai warga negara, jika kritik Prita itu justru dikriminalisasi oleh pihak rumah sakit. Itupun hanya dengan dalih 'pencemaran nama baik'. Nalar bisnis industri kesehatan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi, seharusnya justru memosisikan pasien 'sebagai raja'. Karenanya, para pasien wajib diberi pelayanan profesional, humanis, dan beradab. Ketidakpuasan konsumen, sebagaimana diekspresikan Prita memiliki ruang untuk disampaikan pada publik.

Prita wajib protes karena anaknya mendapatkan perlakuan yang tidak memadai saat berobat. Siapapun yang menjadi orangtua, tentu tidak rela jika nasib anaknya dalam ancaman, yang dibungkus dalam rezim medis. Disebut rezim medis, karena jika pasien tidak kritis, maka petugas kesehatan bisa memperlakukan pasien seenaknya atas nama 'ilmu kedokteran'.

Sebagaimana diketahui, interaksi antara pasien dengan dokter atau pengelola industri kesehatan menyembunyikan relasi kuasa yang timpang, karenanya rawan didistorsi. Tantangan kita adalah, hukum seharusnya berpihak pada golongan tidak berdaya, atas nama kemanusiaan dan hak sosial warga negara, agar tujuan keadilan tercapai.

REPUBLIKA, 12 Juli 2011

7. Rantai Kemiskinan



Kisah pilu masyarakat soal kemiskinan begitu banyak terjadi di desa, tentu dengan banyak kasus. Beberapa waktu lalu, saya sempat *assessment* untuk memetakan masalah dan pengalaman *survive* di beberapa desa di Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait problem kemiskinan yang dialaminya dengan segala risiko sosial yang terjadi. *Assessment* yang menjadi bagian skema program Plan Indonesia (lembaga internasional yang peduli pemenuhan hak-hak anak) itu secara khusus adalah berupaya mengalkulasi risiko kemiskinan di aras lokal, serta bagaimana mendorong *governance reform* dalam rangka perwujudan kehidupan sosial yang layak dan ramah anak.

Perlu disadari bahwa anak-anak di Indonesia secara umum tergolong sebagai kelompok rentan, selain perempuan miskin, dengan kecenderungan menjadi korban dari belitan kebutuhan sosial ekonomi. Tema ini begitu menarik, karena diantara rangkaian kebijakan pembangunan lokal, seringkali masih luput atau kurang sensitif pada pemenuhan kebutuhan hak-hak anak.

Pengertian anak adalah mereka yang berusia mulai dari 0 sampai 18 tahun. Hak mereka bisa hidup dan tumbuh kembang secara layak sesuai ukuran kemanusiaan. Di antaranya, kemampuan mengenyam pendidikan, hidup sehat, serta terhindar dari risiko ketidakadilan dan kekerasan dari manapun.

Minimnya sumber daya alam, keterbatasan jangkauan akses pada pusat ekonomi dan kegiatan pelayanan publik, serta kurangnya respons negara dalam menjawab beban masyarakat adalah deretan faktor krusial penyebab kemiskinan makin parah dialami golongan sosial *grass root*. Terkait kebutuhan dasar seperti pemenuhan pangan,

layanan pendidikan, dan kesehatan adalah ukuran nyata bagaimana kelayakan hidup masyarakat dapat dinilai.

Desa-desa yang terisolir dan tergolong miskin, rata-rata kondisinya hampir terputus akses mengembangkan kegiatan sosial ekonomi dengan desa atau daerah lainnya. Termasuk terbatasnya mendapat layanan publik sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penghasilan ekonomi yang bertumpu kegiatan pertanian semata, sementara dihadapkan situasi tanah tandus dengan risiko ber-penghasilan kecil, maka hal itu tidak sebanding dengan kebutuhan warga desa dalam mengikuti mobilitas sosialnya karena mereka harus bertaruh dengan beban transportasi yang mahal.

Jalan rusak atau infrastruktur terbatas mempersulit gerak sosialnya saat berinteraksi menjelajahi daerah lain guna memenuhi kekurangannya. Situasi demikian diperparah oleh kenyataan negara, yang direpresentasi oleh pelayanan publik yang jarang hadir masuk sampai pada pelosok desa. Di situlah rantai kemiskinan bisa dilacak. Soal gizi buruk, kematian bayi dan ibu saat melahirkan, layanan sarana dan prasana pendidikan tidak memadai, putus sekolah, mudahnya wabah penyakit, sampai ancaman kekerasan pada anak-anak. Bahkan bukan mustahil perluasan risiko terjadi, yakni *trafficking* anak saat di mana perlindungan mereka begitu minimal.

Bagaimanapun juga, upaya Pemerintah Pusat dan daerah masih terbatas dan membutuhkan perhatian banyak pihak. Meskipun jika dicermati hal ini sungguh ironis. Saat di kota besar metropolis seperti Jakarta begitu ekspresi kemewahan dipergelarkan, pejabatnya kaya begitu royal merayakan hasrat ekonomi dan status, ternyata kemiskinan di aras lokal berlangsung dalam durasi waktu yang telah lama.

Pengalaman kemiskinan sebagaimana dijelaskan di atas, kemungkinan besar juga terjadi di beberapa desa di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kendatipun beragam pola. Tentu kita butuh perhatian, tidak sekadar memahami kemiskinan sebatas angka statistik, tetapi perlunya memutus rantai dalam struktur kemiskinan untuk upaya kesejahteraan masyarakat yang lebih nyata.

REPUBLIKA, 14 Februari 2012

8. Marginalisasi Sosial



Jika diperhatikan secara seksama, meningkatnya pola modernisasi ekonomi Indonesia saat ini makin melahirkan marginalisasi besar-besaran. Mari kita simak gejala itu di daerah. Makin maraknya pasar-pasar modern seperti hipermarket, mall, maupun supermarket ternyata tidak saja memenuhi kawasan kota. Namun, justru merangsekian cepat masuk ke pelosok desa. Seolah-olah itu tanda kemajuan, karena cita rasa pasar dikonstruksi penuh layanan yang mewah dan serba kecukupan.

Kehadiran pasar modern itu, mulai nyata semenjak pemerintah provinsi dan kabupaten terdorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era otonomi daerah. Melalui cara mobilisasi investor agar membangun layanan fasilitas pasar, demikian cepat mengoyak tata ruang kota dan desa. Bahkan bangunan cagar budayapun harus dikorbankan, demi citra modernisasi ekonomi.

Lahan-lahan pertanian tiba-tiba kian menyempit dan disulap menjadi perumahan mewah. Toko-toko ukuran kecil dan beragam bangunan lama dibabat habis, lalu diganti bangunan mall. Jalan protokol yang dulunya dihiasi pohon-pohon rindang atau pemandangan langit kota begitu terbuka, tiba-tiba harus tertutup baliho iklan besar produk industri sabun, rokok, baju dan perangkat elektronik segala macam.

Tak pelak, jika jalanan di seputar perempatan mall dan pasar modern makin macet karena badan jalan termakan parkir yang menghambat lalu-lintas. Konsekuensinya, di kota-kota kini mulai mengalami krisis ruang dan lahan publik yang bisa dinikmati bagi interaksi yang bebas.

Tragisnya, pasar-pasar tradisional juga makin menyusut kehadiran para pembeli, karena umumnya mereka mengalir dan menyukai datang

ke mall, atau supermarket. Toko-toko dan warung kelontong di desa yang selama ini eksis menjadi agen ekonomi memenuhi kebutuhan masyarakat komunitas juga makin menjerit, oleh kehadiran *franchise* bergaya instan. Secara bertahap pedagang kecil yang mengais rejeki dari kegiatan ekonomi kian tersudut.

Fakta semacam ini tentu menjadi masalah serius, mengingat gerak pasar modern yang bersentrum pada ekonomi raksasa telah menjadi ancaman eksistensi ekonomi lokal dan tradisional. Betapa tidak. Ruang ekonomi di daerah bukan lagi dinikmati bagi berperannya kekuatan masyarakat setempat untuk memproduksi dan berdagang. Namun, diambil alih pemilik modal besar.

Bahkan, hampir semua produk itu impor, sementara masyarakat lokal dipaksa untuk menjadi konsumtif. Kita bisa menghitung betapa keuntungan yang dihasilkan dari mall dan supermarket itu jelas akan mengalir keluar daerah. Akumulasi keuntungan perdagangan itu akan dinikmati kaum kapitalis besar yang bernaung di kota-kota besar dan di luar negeri.

Anehnya, para kepala daerah dan politisi DPRD menganggapnya sebagai hal biasa dengan dalih tren ekonomi modern dan sistem pasar yang tidak bisa dibendung. Ini sungguh ironis. Mereka umumnya menganggap bahwa sumbangan perdagangan modern dirasa lebih signifikan, dibanding pasar tradisional atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasar modern dianggap merekrut tenaga kerja yang banyak. Padahal semua argumen dan alasan itu sungguh ilusi.

Pasar tradisional, UMKM, dan kegiatan ekonomi informal yang begitu beragam faktanya lebih mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan karakter produktif. Meskipun pemerintah daerah mendapatkan pajak pasar modern sebagai pendapatan asli daerah (PAD), namun, biaya yang harus dikorbankan dan dibebankan pada masyarakat jauh lebih besar dibandingkan keuntungannya.

Pemerintah cenderung mengalkulasi keuntungan ekonomi diatas kertas, dan bersifat administratif. Sementara, kerugian sosial dan beban ekonomi yang ditanggung masyarakat tidak masuk dalam skema itu. Dalam konteks inilah, sikap beberapa kepala daerah yang

terlalu permisif dan bernafsu memproyeksi ekonomi lokal berorientasi modern tidak lebih sebagai bagian represi sosial dengan segala akibat marginalisasi masyarakat. Sementara keberanian kepala daerah untuk melarang, atau paling tidak membatasi kehadiran pasar modern tentu menjadi tindakan politik ekonomi yang sangat penting demi proteksi sosial. Inilah tantangan serius yang kadang luput dari perhatian publik.

REPUBLIKA, 20 Juli 2010

Bagian III

Memaknai Momentum



I. Komodifikasi Lebaran



Sebagai gejala sosial, mudik Lebaran (bagian perayaan hari besar Idul Fitri) merupakan bagian dari praktik kultural tahunan. Kedatangan Idul Fitri bagi umat Islam di Indonesia, bukan saja dijalani sebagai tahapan peristiwa teologi semata. Setelah sebulan berpuasa Ramadhan mengekang hawa nafsu, Lebaran adalah fase ‘kemenangan’.

Secara normatif dikonstruksi sebagai arena pembebasan dosa, masuk kehidupan mental kesucian sebagai konsekuensi bagi umat Muslim yang mampu menjalani ibadah Ramadhan dengan baik. Lebih dari itu, peristiwa Lebaran juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi, yakni berkunjung kepada sanak saudara, teman, serta relasi, atau kolega kerja. Mereka saling memaafkan, merekatkan jarak sosial. Bahkan dimanfaatkan sebagai reuni setelah lama jeda waktu tidak jumpa.

Lebaran akhirnya menjadi ritus budaya yang direproduksi dan relevan bagi kegiatan memperkuat kohesi sosial. Dalam kaitan itulah nilai positif Lebaran begitu terasa, dan memiliki makna mempererat tali persahabatan dan sungguh manusiawi. Di antara proses itulah, kita tidak bisa pungkiri pula, saking kuatnya perayaan Lebaran, muncul sejumlah kecenderungan terjebak pada meledaknya hasrat konsumsi.

Dari perayaan budaya terseret menjadi pesta konsumsi yang menyedot daya beli dan ekonomi masyarakat. Karena menjadi ajang pesta, lebaran diidentikkan dengan ‘baju dan celana baru’, kendaraan tampil bagus, memoles rumah, serta santapan menu makanan yang disiapkan sedemikian rupa. Begitu pula, berbagai tempat wisata dipenuhi pesta musik dengan mengundang artis, hotel dijejali penginap, serta arus lalu lintas mudik begitu penuh sesak dengan segala risiko yang seringkali menelan korban.

Akibat gebyar konsumsi Lebaran, tidak heran citra konsumsi melampaui substansi Lebaran sebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini. Gejala tersebut rata-rata merasuki golongan kelas menengah ke atas atau *the have*, yang menjalani aktivitas Lebaran dalam kemewahan.

Tentu golongan yang ekonominya rendah (kelompok miskin) sekalipun kadang 'terprovokasi' masuk arus konsumerisme tetapi terbatas secara struktural. Kelompok yang paling berperan atau berkepentingan mengomodifikasi Lebaran adalah pihak swasta atau industri.

Apapun jenis produknya, mereka memanfaatkan momentum Lebaran ini dijadikan ajang mengeruk keuntungan ekonomi. Kreasi produk barang atau jasa, dengan mengondisikan agar hasrat konsumsi masyarakat meningkat direkayasa sedemikian rupa. Targetnya, masyarakat membelanjakan uangnya untuk berkonsumsi dan ditumpulkannya nalar kritisnya.

Konsumerisme Lebaran menenggelamkan substansi 'kemenangan hati dalam bersuci sebagai sikap teologi dan kemanusiaan' karena masuk perangkat kemenangan pesta konsumtif. Bagaimanapun juga kapitalisasi atau komodifikasi momen hari raya seperti Lebaran (juga terjadi dalam natalan untuk umat kristiani) akan terus berlangsung. Selalu saja Lebaran tergoda, berpotensi tergelincir dalam pesta kemewahan yang dibimbing anarkisme pasar.

Untuk bisa mengatasi dan membendung laju konsumerisme, salah satu caranya adalah perlu gerakan sosial yang memompa kesadaran kritis warga, untuk melawan praktik kolonisasi ekonomi dalam balutan budaya. Keluarkan Lebaran dari konstruksi 'konsumerisme', mengembalikannya menjadi media kultural membangun kohesi dan solidaritas sosial.

REPUBLIKA, 14 Agustus 2012

2. Tahun Pembaruan



Bunyi terompet dan dentuman kembang api serta petasan senantiasa dihadirkan untuk menandai pergantian tahun baru. Seolah telah menjadi ritual, perayaan tahunan itu menyedot perhatian khalayak. Ditandai kegiatan atraksi, beragam cara diekspresikan. Di kampung-kampung digelar aktivitas *lek-lekan* (kumpul informal warga komunitas pada malam hari) untuk sekadar berbincang atau *ngobrol-ngobrol* ditemani makanan ringan dan minuman hangat, tradisi yang begitu lama dilakukan mereka.

Sementara di kota-kota kemegahannya diisi pawai anak-anak muda, pesta musik dan segala warna di café atau restoran serta hotel yang begitu mewah. Tempat-tempat wisata bisanya begitu ramai dipenuhi pengunjung untuk melewatkan pergantian tahun. Apa yang bisa dijelaskan dari gejala itu?

Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari malam pergantian tahun, kecuali hanyalah batas administratif dari angka 2011 menjadi 2012. Namun cara mengisi aktivitas menjadi begitu berbeda, rupa-rupa bumbu entertain terekspresikan. Bahkan telanjur dikonstruksikan sebagai pesta hura-hura.

Momentum itu diolah para pengusaha atau *event organizer* melalui sentuhan musik, histeria, gemerlap lampu, rangkaian suara ledakan dan kejutan yang tujuannya 'memanjakan dan mengeksploitasi.' Di balik itu, *toh* penyelenggara mengais keuntungan ekonomi. Pergelaran konsumsi jika dikalkulasikan telah menghabiskan uang miliaran rupiah. Semua tidak lebih dari mengejar dan memenuhi hasrat hedonistik, dibalik kata 'kepuasan.'

Terlalu mewah jika perayaan tahun baru dipatok sebagai ekspresi hura-hura. Semestinya apapun cara menggairahkan tiap momentum,

jangan sampai melampaui makna, apalagi sampai menghilangkan arti pada peristiwa itu. Bagaimanapun juga pergantian tahun boleh saja dirayakan, namun pesan mendalam momentum hanya didapat jika ruang refleksi memberi makna jejak satu tahun kelangsungan kehidupan berbagai aspek dilakukan.

Pelajaran berharga bisa dikutip dari rekaman pengalaman masa lalu, baik itu peristiwa politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Tidak sekadar keberhasilan yang dipelajari, tetapi kegagalanpun bisa ditelisik. Terutama fenomena yang menjadi penanda perubahan di lingkungan keluarga, level komunitas, lokal, nasional, bahkan peristiwa global. Di situlah dapat menjadi basis pijak, paling tidak bahan berharga memproyeksi di tahun selanjutnya agar lebih baik.

Karena itu terlalu sayang jika pesta pamer kemewahan dan kesenangan —kendatipun dibalut dengan istilah ‘ritual tiap tahun’— diekspresikan berlebihan, sementara di seberang lain kemiskinan dan kesenjangan sosial masih membayangi bangsa ini. Ekspose media massa, cetak maupun elektronik yang memotret dan merekam histeria konsumsi merayakan tahun baru, tentu begitu kontras dihadapkan pada rintihan masyarakat terbelit beban yang sering disebut ‘krisis ekonomi.’

Masalah bangsa ini pada tahun sebelumnya begitu menumpuk. Mulai dari urusan kelaparan, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, korupsi merajalela, konflik dan kekerasan, ketidakadilan, serta demokrasi yang tercabik-cabik. Semoga pesan reflektif masalah bangsa ini mampu menyusup dalam kesadaran publik sebagai bahan renungan untuk perlu dipecahkan pada 2012 sebagai tahun resolusi. Pada saatnya nanti kita perlu melakukan pembaruan, menggeser praktik hura-hura dalam momentum tahun baru menjadi ekspresi sederhana yang penuh makna positif.

REPUBLIKA, 3 Januari 2012

3. Memperkuat Solidaritas



Kebahagiaan mewarnai masyarakat muslim dunia, saat selesai menjalani puasa Ramadhan dan merayakan Idul Fitri 1431 H. Momentum seperti ini senantiasa dimanfaatkan untuk saling memaafkan atas segala salah sesama manusia, siapapun mereka. Spirit menyucikan diri, setelah selama sebulan penuh berpuasa dengan segala ujian berhasil dilaluinya, yakni menundukkan segala nafsu yang menjadi bagian kehidupan manusia.

Tindakan-tindakan yang salah selama bergaul, mengharuskannya untuk membuka diri secara inklusif, karena memang manusia penuh keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Sikap saling memaafkan tersebut, bukan saja semata digariskan dalam syariah sebagaimana umat muslim menjalaninya pada kehidupan praksis, namun, lebih-lebih hal ini sudah menjadi kultur yang melekat sekaligus dipraktikkan pada kesehariannya.

Demikian pula soal berbagi, atau saling membantu sesama manusia. Umat muslim juga diwajibkan memberikan sebagian hartanya agar disantunkan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya pada kaum miskin atau kelompok marginal. Itulah yang disebut dengan solidaritas. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, telah memberi landasan cukup kuat untuk menjawab problem itu dengan segala bentuknya. Misalnya, sifat dan rasa kedermawanan diwujudkan berupa keharusan umat muslim yang mampu secara sosial agar berbagi rezeki yakni membayarkan zakat fitrah saat menjelang Lebaran.

Memupuk jiwa solidaritas ini sangat penting artinya, saat di mana sebagian kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan posisi sama secara materi atau sosial-ekonomi, wajib hukumnya mengangkatnya

dalam posisi setara. Karena kita tahu, di hadapan Allah SWT, antar umat manusia posisinya sama, dan yang membedakan adalah derajat ketaqwaannya.

Pada tiap episode berinteraksi sesama manusia, nampak nyata bahwa kesempatan atau akses mendapatkan sumberdaya ekonomi begitu berbeda-beda, yang kerap kali memunculkan beban struktural. Problem struktural seperti ini tentu melahirkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, bahkan membentuk sekat-sekat, dengan kecenderungan tergelincir pada praktik diskriminatif. Orang miskin adalah golongan sosial yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil hanya karena posisi sosial yang tidak sepadan. Rangkaian peristiwa ketidakadilan yang dialami kaum *dhuafa* ini tentu bentuk pengingkaran kemanusiaan, yang ditentang oleh Islam.

Begitupun, terbentuknya formasi sosial karena ekspresi kultur yang beragam baik itu bersumber karena perbedaan etnik, agama, maupun afiliasi politik yang *fragmented* tak pelak juga berisiko munculnya gesekan konflik, bahkan kekerasan. Tidak heran jika, soal alasan struktural maupun kultural, berujung pada hubungan antar masyarakat yang retak, bahkan terjadi disintegrasi sosial.

Bangsa ini tentu perlu mengambil hikmah yang lebih mendalam. Hari Raya Idul Fitri 1431 H kali ini, di mana umat muslim sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, hendaknya mampu dijadikan sebagai momentum besar dalam rangka mengatasi belitan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang menimpa negeri ini. Lalu, secara optimis menatap masa depan ke arah yang lebih baik dan mulia.

Lebaran bukan sekadar ekspresi simbolik eratnya berjabat tangan saling memaafkan, berbagi harta dan uang dalam konstruksi zakat, atau romansa keakraban dalam keluarga. Akan tetapi lebih dari itu, agar nilai-nilai solidaritas sosial hendaknya terus tertanam, tumbuh dan berkembang dipraktikkan pada kegiatan bermasyarakat dan bernegara, dengan landasan ikatan sebagai bangsa secara lebih luas.

Dengan demikian, berbekal rasa solidaritas sosial, negeri ini harus mampu menjawab bagaimana membuat langkah besar mengatasi kemiskinan, menutup jurang kesenjangan sosial, serta berpadu mewujudkan keadilan bagi sesama. Bertumpu pencapaian keadilan sosial

itulah, sekaligus membangun relasi kemajemukan kultur antar umat manusia demi menciptakan tatanan masyarakat yang kohesif, sebagai tahapan mencapai peradaban bangsa.

REPUBLIKA, 14 September 2010

4. Memberi Makna Maaf



Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Disebut manusiawi pula jika tiap mereka dituntut kerelaannya bersedia meminta dan memberi maaf pada sesama manusia atas segala kesalahan. Tujuannya, agar deretan dosa yang melekat dalam dirinya dapat terhapuskan secara ikhlas, serta mempererat tali solidaritas sosial atau kebersamaan. Itulah kira-kira inti tiap khotbah yang disampaikan para khotib, saat umat Islam merayakan Idul Fitri, di mana pun di belahan dunia.

Makna terpenting yang perlu dicerna adalah bahwa perayaan hari besar agama hendaknya mengilhami praktik keseharian. Dalam bidang apapun. Tidak berhenti sekadar ritualitas, atau simbolik semata. Ketegangan atau perselisihan antar pihak, konflik yang menciptakan jarak dalam kegiatan politik, ekonomi, maupun sosial adalah hal biasa terjadi saat interaksi di masyarakat.

Karenanya, jika berfikir rasional, kecerdasan dan kejujuran manusia menjadi modal utama menyelesaikan masalah itu dengan cara elegan. Baik ditempuh melalui dialog atau musyawarah, divoting, atau melalui peradilan sekalipun. Dengan begitu, kesalahan, perselisihan atau kompetisi secara relatif dapat diatasi dengan baik, berorientasi keadilan.

Dalam kenyataan sehari-hari, memang tidak mudah meminta atau memberi maaf semacam itu, terutama karena mekanisme atau proses penyelesaian masalah belum tentu bisa diterima oleh sesama. Apalagi terkait urusan gengsi, harga diri, atau soal eksistensi. Tidak jarang jika nafsu dan emosi lebih mendahului dibanding nalar saat memahami perselisihan. Hal itu bisa terjadi dalam keluarga, di lingkungan kerja,

atau di tengah masyarakat. Akibatnya terjadi keretakan relasi sosial. Persaingan mencari akses ekonomi, perebutan kekuasaan, atau perselisihan saat pengambilan keputusan meninggalkan bekas dan jejak buruk.

Ironisnya, justru perseteruan awet terjadi di kalangan atas, terutama mereka yang menyandang elit kekuasaan. Misalnya antar mantan presiden, politisi dan mantan ketua partai, atau pejabat. Perselisihan perebutan kuasa kadang tidak luput dari dendam, sehingga urusan silaturahmi dan solidaritas tidak pernah dianggap sebagai bagian proses sosial yang dijalani seorang pemimpin.

Kadang yang konyol dan salah kaprah adalah, di antara para elit kekuasaan tidak saling memaafkan saat selesai persaingan merebut kekuasaan, tetapi justru memberi maaf pada para koruptor. Misalnya mengurangi hukuman, apalagi remisi pembebasan. Bagaimana mungkin para pemimpin menyerukan menjaga persatuan dan kesatuan, sementara di antara mereka kadang tidak dewasa dan kurang cerdas bersikap. Penguasa tetapi tidak memiliki jiwa keteladanan sebagai pemimpin.

Coba simak pelajaran berharga di lingkungan masyarakat *grass root*. Sikap terbuka saling memaafkan, budaya silaturahmi merupakan praktik otentik didalam menjaga kerekatan hubungan diantara mereka. Bahkan pada sejumlah bukti —yang saya anggap istimewa— kebiasaan silaturrahi tidak hanya terbatas sesama umat Islam.

Namun, pada perayaan Idul Fitri itu mereka yang berbeda agama juga saling berkunjung, berjabat tangan membangun rasa solidaritas sosial untuk menjaga kebersamaan. Itulah jiwa pluralisme yang dipraktekkan penuh makna dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Mungkin para penguasa perlu belajar banyak pada rakyatnya, sekalipun itu hanya soal membangun solidaritas sosial untuk hal-hal yang positif.

REPUBLIKA, 6 September 2011

5. Tahun Baru



Pada tiap pergantian tahun, dengan beragam cara masyarakat merayakannya. Ada menggelar ritualitas, ada pula yang melewatkannya dengan perilaku hura-hura. Kegiatan apapun digelar. Mulai dari potong tumpeng selamat, doa bersama, tirakatan, atraksi ritual dengan bumbu mistik.

Banyak pula merayakannya dengan pawai motor, bakar petasan, pentas musik, sampai dengan gelar pesta di cafe-cafe dan sudut-sudut kota. Disisi dan cara yang berbeda, pergantian tahun ada yang memanfaatkan untuk refleksi, membuat perenungan perjalanan waktu dengan ekspresi meromantisasi kisah.

Pergantian tahun hal yang biasa, sama halnya pergantian bulan atau hari. Hanya saja, karena umumnya dibumbui oleh konstruksi yang begitu berlebihan, maka pergantian tahun menjadi seolah istimewa. Mengapa demikian? *Interest* untuk mengkomodifikasi momentum dengan menjadikannya sebagai lahan subur mengais untung. Sebutlah secara berturut-turut, mulai dari pedagang sampai pemilik modal yang memiliki industri yang selalu pintar memanfaatkan kesempatan.

Berapa jumlah petasan yang terjual, ribuan botol minuman di cafe-cafe, produk-produk makanan ringan sampai berat, asesoris pesta, ramainya penjualan kamar hotel, kebangisan pengusaha travel menaikkan harga tiket transportasi, sampai yang paling nyata berapa juta liter bensin yang terbakar oleh pawai sepeda motor, dan seterusnya. Siapa yang untung? Yang pengusaha dan pemilik modal.

Bagi kaum kapitalis dengan watak mencari untung, jelas tidak peduli apa saja akan dilakukan dan disuguhkan, yang penting bisa mengeruk uang. Meledaknya hasrat konsumtif yang berkembang tiap

akhir dan awal tahun di masyarakat jelas lahan basah tak pernah dilewatkan.

Citra tahun baru adalah belanja dan memuja konsumsi. Inilah fakta tragis, dimana masyarakat dikondisikan untuk membuang-buang uang mengikuti rekayasa konsumsi yang dibentuk oleh para pemilik modal. Media cetak memberitakan gempita dan riuh orang-orang menghabiskan uang, dan media elektronik secara langsung menayangkan pesta pora begitu mewahnya. Bahkan tragisnya, peristiwa perkelahian, kecelakaan, sampai bencana-bencana kadang muncul mewarnai proses itu.

Sementara itu, yang terlupakan adalah ekspose berhamburnya uang pesta pora konsumsi itu telah menyayat hati kaum miskin yang selalu terkikis oleh perubahan sosial. Memarginalisasi posisi dirinya adalah fakta yang tak terbantahkan.

Masyarakat pinggiran yang tinggal di desa, kaum miskin kota, atau mereka yang tengah menderita akibat tekanan sosial jelas hanya mampu melihat. Meskipun kadang dianggap dan dipaksa harus menyaksikan dan kadang larut keramaian itu. Suasana ini sungguh paradoks, dan senantiasa berulang tiap tahun.

Pergantian tahun tidak musti harus dikonstruksi melalui pembiasaan seperti itu. Namun bisa sebaliknya. Adalah memanfaatkan pergantian tahun sebagai bagian dari proses kehidupan. Penting kiranya mengisinya dengan pikiran reflektif dan tindakan resolusif. Tak perlu mewah jika sekadar membangun tradisi. Memanfaatkan momentum dibimbing oleh nalar rasional dan cerdas.

Bagaimanapun bangsa ini memang tengah sakit, dan kini terus berupaya membangun dirinya menuju pencapaian peradaban yang lebih baik. Anggaplah pergantian tahun sebagai titik sentral proses memahami jejak masa lalu selama setahun. Disitu pula perlu menemukan hikmah dan pelajaran berharga, yang secara transformatif berfungsi sebagai tonggak penanda perbaikan diri.

Memperkuat keyakinan menuju perbaikan diri, dan secara kolektif menjadi inspirasi buat membangun bangsa. Refleksi akhir tahun adalah fase transisional yang tak sekadar ritualisme kosong, tetapi tahapan menghasilkan resolusi peradaban perbaikan kehidupan.

Memang tidak mudah menjalankannya. Karena semua itu menjadi bagian ujian membangun kematangan diri. Kemampuan mendalami tiap gejala, realitas sosial, serta mencari sisi substansi tiap momentum sebagaimana tahun baru, tentu menjadi salah satu ukuran kedewasaan sebagai bangsa. Kita tentu harus optimis atas semua itu.

REPUBLIKA, 4 Januari 2011

6. Nasionalisme Beradab



Minggu lalu, pada acara refleksi kemerdekaan RI ke 65, di sebuah kampung di Karanglobaru Sleman warga masyarakat saling bertutur mengenang kemerdekaan Indonesia. Acaranya cukup sederhana, namun maknanya begitu dalam. Hasrat untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan sebagai bagian anak bangsa demikian luar biasa. Tak sekadar bertutur romantisme saat para pejuang '45 mendedikasikan diri untuk melawan para kolonial masa itu. Mereka juga mengajak merenungi, seberapa jauh bangsa ini benar-benar merdeka dari segala bentuk penindasan, terutama nasib yang dialami rakyat. Mengapa harus ditegaskan nasib rakyat?

Hampir semua warga menyadari, elit ekonomi dan politik di pusat kekuasaan dan daerah umumnya merasakan kenikmatan hidup yang berkecukupan. Tetapi, warga negara di arus bawah masih saja menderita, khususnya mengalami beban kemiskinan dan keterbelakangan. Itulah alasan mendasar buat mereka untuk tiap tahun bertanya, siapa *sih* yang benar-benar menikmati kemerdekaan ini?

Tapi urusan loyalitas dan nasionalisme jangan ditanya. Masyarakat di akar rumput (*grassroot*) benar-benar patut dibanggakan soal cintanya pada bangsa. Betapapun kesengsaraan menyelimuti dirinya, selalu saja mereka bisa bersyukur. Menurutny, apa yang dialami saat ini konon jauh lebih baik dibandingkan masa-masa para pejuang '45 menderita saat membebaskan diri dari penjajahan.

Sikap nasionalisme sebagai anak bangsa ini penting terus berkembang, mengingat itulah modal besar negeri ini agar terus memaknai dan mencapai cita-cita mulia saat kemerdekaan dideklarasikan, yang tergariskan dalam konstitusi UUD'45. Tak ayal saat merenungi

perjalanan bangsa itu, lintasan sedih mencuat. Seharusnya diusia ke-65, bangsa ini lebih matang dan dewasa menjaga kebersamaan, solidaritas, persatuan menghadapi pertarungan global.

Namun, kenyataannya justru godaan untuk perselisihan antar kelompok bahkan sampai kekerasan, selalu saja menghantui. Entah itu atas nama etnik, agama, ataupun afiliasi politik yang sempit dan picik. Renungan kemerdekaan akhirnya harus mengulas pula bagaimana bangsa ini bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Aneh juga, seharusnya bangkit mengatasi neokolonialisme seperti melawan kapitalisme global, *toh* kita masih terkurung oleh perang saudara sesama anak bangsa. Karena perubahan zaman, jelas meniscayakan buat kita agar merumuskan paradigma baru dalam membangun nasionalisme. Seperti apa itu?

Jika di zaman kemerdekaan '45, nasionalisme berarti melawan penjajahan fisik eksploitasi negara asing pada bumi nusantara. Sementara pada masa Orde Baru, nasionalisme dikonstruksikan berwujud loyalitas warga pada rezim berkuasa, dengan segala risiko distorsi yang luar biasa. Kini, dizaman reformasi nasionalisme semestinya diwujudkan memperkuat dan memperdalam demokratisasi agar mencapai kesejahteraan masyarakat. Nasionalisme, di alam demokrasi berarti memperkuat aspek humanisme dan peradaban bangsa. Jika kita sebagai bangsa yang merdeka, berarti harus mampu menjamin terlindunginya warga negara dari segala bentuk ancaman apapun dan dari manapun, terbangunnya struktur kekuasaan yang akuntabel dan amanah, serta menciptakan masyarakat yang cerdas dalam format *civil society* yang tangguh.

Itulah kira-kira sekilas makna penting yang terbersit dalam perayaan refleksi kemerdekaan di sebuah kampung beberapa waktu berlalu, yang seringkali tidak terartikulasikan di publik. Acara renungan di komunitas semacam itu, memang tak segagah upacara bendera di istana negara, atau beragam simbol pemberian remisi pada para terpidana koruptor. Namun, sekali lagi, jika rakyat bawah bertutur tentang bangsanya di hari ulang tahun kemerdekaan, ternyata cita-cita dan harapannya begitu besar, sebagaimana tekatnya menjaga persatuan buat negeri ini. Dirgahayu Republik Indonesia.

REPUBLIKA, 24 Agustus 2010

7. Sang Pahlawan



Begitu risau menyaksikan jejak negeri ini yang senantiasa dihantui masalah. Mulai soal kelaparan dan kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, konflik dan kekerasan, sampai sederet urusan krisis multi sektor. Belitan problem berujung pengakuan ketidakmampuan mengatasi masalah yang dialami. Sebagai bangsa yang tergolong besar, terasa begitu kerdil.

Uniknya, para tokoh yang mengaku pemimpin atau penguasa sekalipun, kadang juga larut dalam kegalauan. Gejala itu terlihat dari ulah mereka yang begitu seringnya mengumbar kecemasan di publik, bahkan saling tuding menyalahkan. Padahal, sebagai pemimpin harusnya menunjukkan jalan keluar, berani bertindak dengan risiko apapun demi melindungi warganya.

Bertepatan hari Pahlawan 10 November 2011 ini, layak buat kita untuk bertanya pada diri kita, masihkah mental pahlawan tersemat dan menjadi spirit di negeri hingga kini? Tengoklah sejenak bagaimana rekaman kisah heroik sang pahlawan di kala mereka begitu gigihnya berjuang mengusir kolonialisme dari bumi nusantara. Spirit nasionalisme, harga diri dan kemartabatan sebagai bangsa dipertaruhkan untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa merdeka. Semangat kepahlawan terekspresi berupa pengorbanan ‘tanpa pamrih personal,’ agar mampu menegakkan kemuliaan sebagai bangsa berdaulat. Kuncinya adalah kerelaan diri berkorban untuk kemanusiaan.

Mungkin tidak perlu latah memberi makna hari pahlawan itu dengan sekadar mengungkit romansa kegagahan sang pahlawan masa lalu. Tetapi, paling tidak dapat mengutip spirit pengorbanan mereka saat

bangsa dalam belitan beban. Itulah esensi yang perlu kita kedepankan. Tidak perlu dipungkiri, betapa kini makin minim menemukan sosok atau ‘figur yang mengaku tokoh’ bermental pahlawan.

Begitu langka ditemukan pemimpin gigih berani untuk bertindak, berinisiatif, serta membuat langkah-langkah besar sekalipun dengan risiko tidak ringan demi memajukan bangsanya. Rata-rata, seseorang justru mendahulukan *interest* berkuasa dengan segudang ‘pamrih’ dibandingkan mengedepankan semangat berjuang untuk bangsa.

Sebuah sindiran *hari gini berkorban tanpa pamrih, mana ada?* Ledekan semacam itu muncul karena menyaksikan kecenderungan watak paradoks, mengaku pahlawan tetapi perilakunya justru menggeroti bangsa demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sampai-sampai negeri terancam bangkrut, terancam disintegrasi. Hal semacam ini tentu bukan soal sepele, karena pada akhirnya menciptakan ironi dan masa depan bangsa yang mengkhawatirkan.

Jargon yang selalu didengungkan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan perlu diperdalam dan ditelaah secara seksama. Makna jargon itu bukan sekadar memberikan penghargaan berbentuk bintang tanda jasa, atau menguburkan jasad sang pejuang di taman makam pahlawan.

Tetapi, lebih dari itu menghargai pahlawan adalah ketika seluruh komponen bangsa ini mampu memproduksi, mendalami serta mengembangkan spirit dan nilai kepahlawanan atau nasionalisme buat membangun masa depan negeri. Tugas kita adalah melahirkan pahlawan -pahlawan baru, yakni seseorang yang masih mempraktikkan nilai pengorbanan, mendedikasi kemampuannya demi bangsa secara nyata. Bisa jadi mereka tinggal di kampung dan pelosok desa, atau kota-kota pinggiran yang ‘tidak diperlihatkan jasanya.’ Karenanya, pahlawan sejati tidak identik dengan penguasa yang suka pamer, seolah berjasa.

REPUBLIKA, 8 November 2011

8. Involusi Reformasi



Sejak pemerintahan Orde Baru tumbang pada 1998 lalu, tiap tahun dinamika politik Indonesia selalu terbersit kenangan sejarah perubahan yang diperingati tiap tgl 21 Mei. Kisah monumental gerakan reformasi yang berhasil menggulingkan kekuasaan otoriter yang ditandai jatuhnya Soeharto dari jabatan presiden setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun.

Terbitnya harapan baru dampak reformasi, kala itu, kian menumbuhkan energi kolektif hampir seluruh komponen bangsa ini atas suatu cita-cita mulia, bahwa agar Indonesia menjadi lebih baik. Liberalisasi politik, paling tidak, telah menstimulasi meningkatnya partisipasi warga untuk giat aktif memengaruhi, terlibat, dan menjadi bagian pembentukan struktur kekuasaan. Begitu pula, kebebasan arus informasi dan ruang gerak yang kian terbuka bagi media massa menjadi bagian terpenting penanda nadi demokrasi.

Kisah sukses mengawali babak baru terbangunnya kekuasaan dan politik nasional, juga berproses merayap di aras lokal. Di daerah bergeliat berbagai langkah perubahan, dengan sejumlah dinamika yang melekat di dalamnya. Namun, dalam prosesnya kisah gemilang gerakan reformasi tidak mampu berjalan mulus. Ketegangan, perselisihan, dan sulitnya membangun konsensus arah dan substansi reformasi terus menyedot perhatian begitu besar, saat fase transisi demokrasi berlangsung.

Capaian formal politik yang begitu mewah dan meriah, terekspresikan dalam tiap pesta dan pentas politik Pemilu, Pemilukada, dan perebutan kuasa politik di semua lini yang rata-rata begitu kolosal. Rutinitas rotasi kekuasaan dengan segala kelangsungan 'damai', serta

maraknya program pembangunan sering dicatat sebagai buah reformasi.

Apa yang digambarkan sebagai capaian formal itu sayangnya tidak dibarengi dengan kelangsungan mendasar dari urusan nilai dan etika, moralitas, kemanusiaan, kebebasan, integritas pemimpin, serta segenap cita-cita konstitusional atas sebuah bangsa. Terjadi simplifikasi, bahkan distorsi makna perubahan. Dalam konteks ini, perubahan dikonstruksi tidak lebih sekadar berganti kekuasaan secara rutin. Berarti kian menjelaskan betapa reformasi telah terjebak pada situasi mandeg, atau disebut involusi. Perubahan tata politik tanpa makna mendasar.

Cita-cita mewujudkan kekuasaan yang bebas dari korupsi, tetapi yang terjadi justru penyalahgunaan uang negara makin menjalar semenjak dibongkar oleh KPK dan seruan keras dari organisasi masyarakat sipil. Koruptor tampil dengan generasi baru, mewarisi pola kekuasaan lama yang penuh mafia di eksekutif, parlemen dan aparat yudikatif.

Di bidang penegakan hukum, reformasi kurang berhasil memotong jalur mafia kasus yang masih saja tumbuh di hampir semua lini kelembagaan hukum. Tujuan agar reformasi politik menghasilkan kebijakan strategis di sektor ekonomi yakni menyejahterakan masyarakat, mengalami hambatan serius. Membengkaknya struktur dan arus neo-liberalisme yang menghegemoni tata kelola kebijakan ekonomi negara, berisiko menyusutkan kemandirian nasional dalam mengatasi segala krisis yang dialami.

Masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakberdayaan, serta kemerosotan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan, tidak terpecahkan dengan baik dengan strategi yang diterapkan selama ini. Alih-alih, *mainstream* kebijakan ekonomi makin mengamputasi kapasitas sosial masyarakat, menonjolkan pola pembangunan dengan derajat pembiyakan golongan marginal.

Kita sadari, refleksi reformasi tidak sekadar romansa perubahan berakar cita-cita masalalu. Namun ini adalah momentum mengingatkan kembali amanat perubahan untuk memperbaiki bangsa Indonesia

menuju kondisi yang lebih berdaulat secara politik, beradab secara budaya, bermartabat secara sosial, dan berdaya secara ekonomi.

Reformasi dengan demikian, adalah radikalisasi perubahan yang bertumpu pada nilai dan prinsip mendasar sesuai konstitusi dan cita-cita bangsa, yang secara kontekstual dan relevan menjawab tantangan saat ini dan ke depan.

REPUBLIKA, 22 Mei 2012

Bagian IV

Distorsi Memori Politik



I. Mencari Pahlawan



Layaknya seorang pahlawan, adalah tokoh panutan bangsa yang mendedikasikan diri untuk membangun negeri. Tiap rentang sejarah selalu saja ada pahlawan. Baik berjasa urusan pendidikan, lingkungan, perempuan, agama, kesehatan, budaya, ekonomi, politik, maupun bidang lainnya. Pahlawan itu ada yang dinampakkan, terpotret oleh publik dalam kemasan media. Namun ada pula pahlawan yang bekerja keras dan berperan memajukan kehidupan, tetapi mereka tidak dinampakkan.

Soeharto, sang tokoh rezim otoriter Orde Baru itu, kini diusulkan untuk menjadi pahlawan. Publik jelas memperdebatkan, karena usulan ini dianggap kontroversial. Ada baiknya kita merenungkannya, sebagai bagian sumbangan pikiran untuk menanggapi. Pada masanya, Soeharto ibarat menjadi dinasti kuasa yang begitu besar. Selama 32 tahun berkuasa, semua hal yang dilakukannya telah diklaim dalam sejarah versi Orde Baru sebagai keberhasilan lalu dijuluki bapak pembangunan. Karena dianggap berhasil merubah keadaan negeri ini menjadi modern dengan membenamkan romansa politik orde lama.

Melalui tajuk ekonomi sebagai panglima, negeri ini juga disulap dengan hingar bingar pertumbuhan ekonomi. Soeharto juga berhasil mengunci rapat kerajaan politiknya dengan narasi dominatif di hadapan rakyat. Tidak mengherankan, jika kroninyapun hingga kini masih banyak, sekaligus memujanya.

Sejarah telah dibongkar. Segala hal yang palsu terpendam sekaligus terawetkan sepanjang Orde Baru (orba) didongkrak oleh gerakan reformasi. Citra kehebatan Soeharto pada akhirnya tidak lebih sebagai gundukan 'borok' yang membawanya jatuh tahun 1998 lalu. Sejak demokratisasi berlangsung, segala polesan lama terus terkikis.

Mata publik terbuka, menyadarkan bahwa sejarah lama terkait kekerasan dan militerisasi, pelanggaran HAM, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta perampasan hak sipil dan politik, adalah cerita nyata yang dialami masyarakat kelas bawah maupun golongan kritis pada kekuasaan Orde Baru. Fakta itu menjadi energi untuk mengingatkan diri masyarakat, bahwa Orde Baru penuh masalah.

Kini lebih satu dasa warsa proses perubahan tengah berlangsung. Ada capaian positif, meskipun pekerjaan menuntaskan reformasi belum optimal. Wajar saja jika pengalaman ketidakpuasan atas demokratisasi yang masih tergolong lamban itu, kadang memunculkan romansa masa lalu. Saat suasana tegang karena urusan keamanan, belitan beban ekonomi, sampai soal tata pemerintahan yang begitu rumit, halusinasi masa lalu di zaman Orde Baru dipanggil ulang. Itulah imajinasi sempit yang terus menghantui hingga kini. Seolah-olah Orde Baru lebih baik.

Bagaimanapun, kesepakatan reformasi adalah fakta sejarah, sekaligus titik tolak membangun negeri untuk saat ini dan dimasa mendatang ke arah yang lebih baik. Konstruksi berfikir yang dianggap relevan buat membangun negeri harus visioner, memandang tantangan ke depan. Termasuk tiap pilihan kebijakan yang diambil oleh negeri ini.

Oleh karenanya, debat apakah Soeharto layak jadi pahlawan atau tidak, tentu perlu dikaitkan cara pandang kita ke depan serta pilihan nilai kemanfaatannya seperti apa atas makna pahlawan itu. Betapapun Soeharto dianggap berjasa oleh kroninya dan para alumni Orde Baru (Golkar misalnya), namun faktanya reformasi itu sesungguhnya lahir sebagai *counter* atas otoriterisme Orde Baru.

Artinya, jika ada sejumlah pihak nekat mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan dalam arus reformasi dan demokratisasi, hal itu berarti secara tidak sadar telah mendekonstruksi sekaligus menenggelamkan reformasi itu sendiri, karena sejarah mencatat bahwa gerakan reformasi saat itu ditandai dengan penggulingan Soeharto. *Nah*, apa kata generasi selanjutnya jika sejarah Indonesia yang berisi kontroversi, dimana seseorang yang dijatuhkan oleh reformasi, justru diangkat sebagai pahlawan di zaman reformasi.

Alangkah baiknya, tuntaskan dulu status hukum, soal HAM, konsistensi TAP MPR tentang penuntasan KKN Soeharto, dan seterusnya sebagai mandat reformasi dibandingkan meneguhkan tokoh yang kontroversial menjadi pahlawan. Bangsa yang tengah dirundung banyak masalah ini, sebaiknya jangan memperbanyak kontroversi yang pada akhirnya menjadi beban sejarah dikemudian hari.

REPUBLIKA, 26 Oktober 2010

2. Reformasi Tercabik



Reformasi telah berusia 13 tahun, tepatnya 21 Mei 2011. Semangat untuk membenahi keadaan negeri ini, senantiasa menghadapi cobaan. Catatan secara umum, transisi demokrasi memang tidak berjalan mulus. Demokrasi masih tersandera oleh watak politik oligarki, otonomi daerah dan desentralisasi masih dimanipulasi elit lokal.

Yang memprihatinkan adalah, negara beserta para pengelola kekuasaan di legislatif, eksekutif dan yudikatif, justru mengalami *distrust* di mata warganya. Pokok masalah yang menjadi sorotan yakni pudarnya etika sosial, dan makin hilangnya karakter tanggung jawab sebagai pemimpin pada umumnya.

Sebagian besar merasakan, demokratisasi belum mampu menghadirkan kesejahteraan sebagaimana cita-cita reformasi. Reformasi ‘tercabik’. Begitu kira-kira suasana bathin masyarakat menyaksikan pengingkaran agenda perubahan, yang rata-rata di berbagai sektor mengalami kemandegan. Tidak heran jika muncul tudingan miring bertubi-tubi diarahkan pada pemerintahan *post authoritarianism* ini. Sejumlah kalangan berspekulasi, seolah zaman Orde Baru di bawah penguasa Soeharto, lebih baik dibandingkan era reformasi.

Sebuah jajak pendapat oleh lembaga survey Indo Barometer menemukan ‘data’, bahwa Soeharto lebih populer dibandingkan presiden-presiden lain yang berkuasa di zaman reformasi. Ini tentu ironis, dan dapat dikatakan simpilikasi yang berlebihan.

Penyimpulan politik bergaya *snap shoot* seperti itu, telah meringkus kesadaran kritis, dan tentu bisa menjadi beban baru demokrasi. Ketidaktepatan reformasi, kemudian dialirkan dengan memanggil ‘roh orbaisme’ mengisi memori baru untuk dijadikan penghibur goncangan demokratisasi. Secara tak sadar berhalusinasi politik masa lalu.

Meskipun belum sempurna cita-cita itu terwujud, tetapi harus kita akui, beberapa capaian reformasi, berupa perubahan politik dan struktur sosial, telah berlangsung. Kebebasan berasosiasi bagi warga negara, keluasaan media massa menyerap dan menyebarkan informasi, agenda pemberantasan korupsi, serta penegakan HAM yang terus berproses adalah fakta-fakta positif reformasi. Kesempatan membenahkan pemerintahan telah terbuka bertajuk *good governance*, masyarakat sipil juga memiliki *space* bernegosiasi untuk memengaruhi kebijakan.

Pada era reformasi ini pula, masyarakat sipil jauh lebih perkasa di hadapan negara. Daya tekan dan kontrol publik bertujuan memberi warna pola kekuasaan di aras nasional dan lokal, juga telah terjadi. Jangan dilupakan, pada era Orde Baru dengan pendekatan *state corporatism*, represi, hegemoni, dan manipulasi, berlangsung dalam sistem birokrasi tatanan pemerintah yang sistematis. Orde Baru memberikan sejengkal pun masyarakat dalam mengimbangi kekuasaan.

Memang belum memuaskan kondisi sekarang ini. Akan tetapi, beban dan problem yang masih harus dituntaskan jangan menjadi jebakan kemunduran negeri ini. Reformasi lahir dengan pengorbanan mahasiswa, dan masyarakat pro demokrasi. Tentu kita tidak rela jika dimanipulasi oleh para alumni Orde Baru untuk menenggelmakan sejarah perubahan, dan peradaban.

REPUBLIKA, 24 Mei 2011

3. Sumpah Pemuda



Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia selalu diingatkan ke-nangan monumental sumpah pemuda. Peristiwa di mana para pemuda dan pemudi kendatipun dalam kungkungan kolonial saat itu, begitu bangkit berpadu dalam tekad bersatu di tengah keragaman suka bangsa dan agama demi membangun Keindonesiaan. Layaknya peristiwa sejarah bangsa, jejak masa lalu itu dapat dianggap bernilai jika kita mampu mencari hikmah dan pelajaran yang dikaitkan dengan situasi kekinian dan kecenderungan ke depan.

Spirit kaum muda dalam konstruksi sejarah kebangsaan condong diidentikkan dengan sikap keberanian mendobrak kemapanan, anti konservatisme. Tekanan kolonial dengan kerakusan menjajah atau mengeksploitasi sumber daya bangsa telah berdampak adanya ke-sensaraan masyarakat.

Di situlah kaum muda merasa terpanggil. Hanya melalui jalan per-satuanlah, diyakini akan diperoleh energi dan kekuatan yang begitu besar demi melawan penjajah. Sikap keinginan dan harapan bersatu dengan tajuk Sumpah Pemuda tentu bukan peristiwa yang sifatnya sesaat atau instan. Akan tetapi, Sumpah Pemuda dipahami sebagai titik pencapaian konsensus dari proses yang panjang meraih cita-cita keindonesiaan yang dimotori para pemuda dari etnis atau suku-suku yang beragama.

Jika peristiwa sumpah pemuda itu ditarik dan direfleksikan dengan kondisi kekinian, tentu tantangan dan situasi sosial telah berubah. Penjajahan bukan lagi diwujudkan berupa kehadiran secara fisik ne-gara-negara asing, atau penguasaan dan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung disertai pola penindasan politik. Akan tetapi,

penindasan bisa berwujud pakta perjanjian ekonomi politik, ditandai pemberlakuan sistem perdagangan yang dikerangkai pola kapitalisme global, yang biasanya berisiko memarginalisasi bangsa-bangsa tertentu.

Keberanian kaum muda menjabol konservatisme, mengekspresikan semangat anti kemapanan kekuasaan begitu banyak disaksikan dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebutlah pengalaman peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dipelopori oleh peran kaum pemuda. Begitupun pada episode perjalanan pergantian rezim dari orde lama, Orde Baru, sampai era reformasi. tonggak-tonggak perubahan tergambar secara jelas bagaimana kaum muda menjadi motor utama pengubah keadaan.

Peran itu terus berkembang, jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Bukan lagi para pemuda berjibaku mengangkat senjata atau bambu runcing sebagaimana simbol alat peperangan masa lalu, zaman tradisional. Namun, peran baru tersimbolisasi berupa tampilnya prestasi kaum muda di berbagai lini, bentuk dan cara baru sesuai zamannya.

Pemuda dengan kecerdasan dan semangat perubahan selalu di-nanti perannya, agar melahirkan cara inovatif demi bangsanya. Jika saja semangat sumpah pemuda adalah simbol sejarah persatuan dalam perjuangan, maka tantangan yang harus dijawab kaum muda saat ini dan kedepan adalah bagaimana pemuda mampu menghidupkan kembali api kepeloporan bertumpu idealisme dan integritas moral, untuk pembangunan bangsa dan perdamaian.

Dengan demikian, mengenang dan memberi makna sumpah pemuda berarti membangun kembali semangat meraih konsensus dan tekad kebersamaan ditengah perbedaan, demi memperbaiki keadaan bangsa beban menuju Indonesia yang demokratis dan sejahtera.

REPUBLIKA, 25 Oktober 2011

4. Kemerdekaan Sejati



Pada Jumat, 17 Agustus 2012 lalu, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Momen memperingati peristiwa pembebasan Indonesia dari praktik kolonisasi itu dilakukan tiap tahun, dan kini memasuki usia ke-63 sejak secara formal Indonesia merdeka tahun 1945. Gairah masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air tentu mengekspresikan romantisme kisah para pejuang saat berhasil mewujudkan cita-cita melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Rekaman sejarah penindasan secara fisik oleh negara-negara Eropa dan Asia pada Indonesia dengan cara eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, serta peluruhan kedaulatan sebagai bangsa telah berdampak kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan adalah risiko berantai yang dialami.

Sebagaimana tersirat secara tegas dalam pembukaan konstitusi UUD '45 bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pernyataan Indonesia merdeka tersebut dimaksudkan sebagai pintu gerbang perwujudan kesejahteraan rakyat, mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa, dan secara otentik melahirkan peradaban baru yang lebih baik.

Sejak kemerdekaan, perubahan struktur sosial, dinamika politik dan tata ekonomi, serta realitas budaya tela berlangsung dengan cepat. Penindasan secara fisik telah berakhir seiring tuntutan keadilan sebagai bangsa di semua tingkat, baik itu lokal, nasional maupun internasional.

Berakhirnya kolonisasi fisik oleh negara Barat, kemudian terselesaikannya pembangunan, telah mengubah wajah dengan pola perbaikan Indonesia yang makin modern. Capaian positif memang tidak

diingkari, baik secara ekonomi politik, maupun sosial budaya. Itulah hasil nyata sifatnya elementer, dan tentu condong kuantitatif buah dari perjuangan kemerdekaan.

Namun seiring berjalannya waktu, kualitas kemerdekaan Indonesia ternyata belum meningkat secara signifikan terutama jika dikaitkan dengan tujuan bernegara sebagaimana cita-cita merdeka dalam babak awal sejarah. Betapapun penjajahan fisik-fomal diakhiri, namun penindasan dalam konstruksi eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja yang tercermin dari sistem perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi politik antar negara justru kian massif dan 'anarki'.

Dampak buruk pasar bebas bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, telah menciptakan penjajahan sistemik yakni pemiskinan. Penindasan tampil dengan pola baru, apa yang diistilahkan oleh Lenin dengan imperialisme, dioperasikan oleh watak hegemoni kapitalisme global yang dimotori negara-negara kapitalis maju.

Sekalipun Indonesia telah 'merdeka secara formal' (diakui kedaulatannya di tingkat internasional sejak 1945), tetapi hingga kini belum merasakan 'merdeka secara substansi', yang ditandai perwujudan kedaulatan sejati. Pertanyaannya adalah, mampukah kita memperkuat kesadaran kritis dan berdaya pada usia kemerdekaan ke-63 tahun ini, untuk menembus jalan baru mencapai kemerdekaan sejati menghadapi kolonisasi global?

Mewujudkan kemerdekaan sejati berarti berjuang untuk memperoleh kedaulatan ekonomi dan politik, ditandai kemandirian dan tidak diperbudak oleh bangsa asing. Mampu menjalani pola budaya yang beradab, menghargai perbedaan identitas dalam struktur masyarakat majemuk dan karenanya menjaga persatuan nasional. Serta senantiasa menjaga amanat mewujudkan keadilan dalam segala hal secara nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia, mengikis kesenjangan sosial.

REPUBLIKA, 28 Agustus 2012

5. Perlawanan Simbolik



Peristiwa tragis aksi membakar diri yang dilakukan Sondang Hutagalung, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), Rabu (7/12/2011) lalu, memiliki makna cukup mendalam. Kita semua tidak mengetahui secara persis motifnya apa, karena sang korban akhirnya meninggal dunia.

Namun beberapa jejak dan konteks yang meliputi tindakan tersebut bisa dijadikan bahan untuk memberi makna atas apa yang terjadi itu. Melihat *track record* Sondang sebagai aktivis mahasiswa dan pengalaman yang digelutinya terkait dengan upaya advokasi HAM, serta pilihan lokasinya di depan istana kepresidenan, tindakan ini dapat ditafsir sebagai politik perlawanan.

Kisah perlawanan sosial untuk tujuan mempengaruhi kekuasaan banyak ditempuh seseorang melalui beragam cara. Mulai dengan menulis, membuat karya seni (teater, puisi, musik, melukis), pernyataan sikap di media, demonstrasi, berdiskusi, tindakan sabotase, dan seterusnya. Bahkan ada pula model radikal yang dianggap 'nekat' dengan bunuh diri. Cara-cara protes ini dipengaruhi kandungan isu dan konteks masalahnya, serta kalkulasi kemampuan untuk mencapai target yang diinginkan.

Akumulasi masalah dari soal kemiskinan, korupsi, pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial, serta rangkaian krisis bangsa ini telah membuat kekecewaan yang dirasakan sebagian besar masyarakat. Para aktivislah rata-rata memiliki kepekaan dan kepedulian untuk bersuara. Mereka itu relatif lebih berani berinisiatif. Rakyat dengan beban derita yang dialami tentu juga mengeluh kesakitan.

Hanya saja, rakyat misalnya kadang tidak mudah berani bertindak dan mampu mengartikulasikan sikap menolak penindasan yang di-

alaminya itu secara terbuka. Kecuali jika mereka sudah *kepepet* dan begitu terpaksa, tentu akan muncul ledakan dahsyat karena keprihatinan yang terpendam begitu lama.

Tindakan membakar diri dengan risiko nyawa melayang memang tergolong berani. Sebagai bentuk perlawanan simbolik, ekspresi tersebut barangkali wujud kulminasi dari sekian sikap protes yang telah ditempuhnya selama ini, tetapi buntu dan tidak berhasil. Atau rasa pesimis jikalau hanya menggunakan strategi konvensional yang condong diabaikan sang penguasa.

Jika demikian, sang penguasa tentu tidak boleh menganggap hal semacam ini sebagai masalah sepele dengan hanya sekadar menunjukkan rasa prihatin atau berduka. Bagaimanapun juga, yang lebih penting dari peristiwa itu adalah, bahwa sebagian masyarakat menunjukkan kekecewaan sampai-sampai berani menjadi 'martir' agar mendapat tanggapan lebih jelas dan konkrit dari berbagai pihak. Karenanya, penguasa seharusnya segera berbenah diri, menelusur secara jernih sehingga menangkap pesan dan maknanya.

Kita memang prihatin atas peristiwa ini. Tetapi lebih memprihatinkan lagi jika kondisi bangsa makin kacau dan masyarakat kian menderita sebagaimana diisyaratkan dalam protes sosial yang terjadi itu. Upaya mencegah cara protes yang radikal dan nekat adalah, penuhilah aspirasi masyarakat. Sang pemegang otoritas, segeralah memperbaiki kondisi bangsa dengan menunjukkan iktikad nyata melakukan perubahan ke arah perbaikan secara konkrit.

REPUBLIKA, 13 Desember 2011

6. Nasionalisme Bola



Pertandingan sepakbola piala AFF, begitu menyedot perhatian publik nusantara. Fokus masyarakat penggemar sepakbola ditujukan pada tim pujaannya, Tim Nasional (Timnas) Garuda, barisan anak-anak muda yang kini ibarat menjadi sang bintang. Sejak mengantongi kemenangan berturut-turut melawan Malaysia (5-1), lalu menundukkan Laos (6-0), kemudian masuk semi final dua kali berturut-turut berhasil membendung Philipina (1-0) kemudian bertanding lagi (1-0). Dipastikan Timnas masuk babak final, bakal berhadapan Malaysia.

Cerita sukses Timnas ini tentu menjadi daya dongkrak lahirnya harapan baru bagi dunia persepakbolaan Indonesia. Setelah sekian lama Timnas ini terpuruk pada berbagai laga, kemenangannya mampu membangkitkan mental juara. Suntikan pemain olahan ‘naturalisasi’ dianggap menjadi salah satu faktor prestasi itu. Paling tidak rasa percaya diri dan jiwa kolektivitas makin menggerakkan daya juang mereka.

Namun, yang juga tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor bakat dan potensi di kalangan pemain Indonesia yang sebenarnya memang begitu besar, daya dukung suporter yang cukup kuat, serta kemungkinan kebangkitan tradisi olah raga massal yang makin meluap. Bahkan, ketika sepakbola telah menjadi industri olah raga, perusahaan atau sektor swasta juga berperan memperkuat dukungan.

Sepak bola, di zaman globalisasi di mana antar bangsa memasuki persaingan di antara mereka bukan lagi dianggap sekadar olah raga. Namun, sepakbola telah menjadi arena produksi identitas sebagai bangsa. Di belahan dunia, sebagaimana terlihat dalam Piala Dunia,

Piala Eropa, Piala Asia, serta ragam pertandingan sejenis telah mampu memompa kolektivitas sentimen beridentitas sebagai bangsa. Heroisme itu selalu muncul, dengan simbol-simbol khas bangsa.

Persaingan global baik itu dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kemajuan tata politik, teknologi dan informasi, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya, arena kejuaraan senantiasa melibatkan spirit entitas sebagai bangsa. Fenomena ini selalu menjadi daya tarik tersendiri. Di Indonesia, sesungguhnya tradisi sepakbola sejak dulu menjadi olah raga turun temurun. Dapat dikatakan sebagai kultur masyarakat.

Sebut saja misalnya, bagaimana masyarakat telah terbiasa memanfaatkan lapangan sepakbola, atau bahkan lahan-lahan kosong yang tersebar di kampung-kampung dan pedesaan untuk berkreasi olah raga massal ini. Sekolah-sekolah, atau *club-club* aktif memompa bakat anak-anak muda juga begitu banyak. Begitupun asosiasi *supporter* kian eksis tersebar di berbagai daerah yang dibina oleh pemerintah, perusahaan, maupun oleh masyarakat secara mandiri.

Sayangnya, sepakbola medan pengembangan bakat nyaris tidak tergarap dengan baik untuk level nasional. Potensi besar atau bibit unggul anak-anak muda, justru tidak terkelola dengan baik. Manajemen asosiasi sepakbola seperti persatuan sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) seringkali dianggap kurang mampu memanfaatkan kapasitas dan peluangnya. Mulai dari urusan profesionalisme, ketidakberesan tata kelola, sampai gugatan atas integritas para pengurusnya karena urusan friksi yang berlarut-larut. Akibatnya, para pemain tidak berkembang, prestasinya pun selalu jeblok. Padahal Indonesia adalah negara yang secara geografis tergolong luas, jumlah penduduknya juga besar dengan keragaman potensi dan bakat terpendam di dalamnya.

Bagaimanapun, rintisan awal kemenangan Timnas Garuda belum usai. Begitu banyak tantangan yang harus dijawab, bahkan menghadapi jalan panjang agar meneguhkan sebagai kekuatan bangsa dimata dunia. Semangat baru para pemain Timnas dan topangan dukungan masyarakat Indonesia pada umumnya, menjadi bagian bibit nasionalisme memperkuat identitas bangsa.

Kejuaraan sepakbola bukan segalanya, namun prestasi itu menjadi suntikan energi baru membangun ikatan bangsa untuk bangkit.

Kelesuan dunia sepakbola Indonesia makin terobati, diharapkan berhasil memperkuat rasa percaya diri dalam bentang arus dan tantangan global. Pengalaman ini dapat dijadikan bahan refleksi untuk terus berbenah, dengan landasan spirit optimis bermetal juara.

REPUBLIKA, 21 Desember 2010

7. Perpindahan Ibukota?



Wacana mengenai pemindahan ibukota negara, dari Jakarta ke daerah lain, makin menguat. Debat soal ini beberapa kali pernah muncul, terutama sebagai reaksi atas terjadinya banyak kasus akibat perubahan sosial yang tidak terkendali di Jakarta. Sebagai ibukota negara, Jakarta menjadi pusat segala hal. Mulai dari pusat pemerintahan dan kegiatan politik, pusat industri, pusat pendidikan, pusat pariwisata, pusat perdagangan, pusat permukiman, dan seterusnya.

Fakta ini menunjukkan betapa rangkaian masalah sosial kerap mengitarinya, kian menumpuk, bahkan berdampak pada gangguan berbagai aspek. Kemacetan jalan, kriminalitas dan anarkisme, pencemaran udara dan air, kesemrawutan tata ruang kota, banjir dan sampah, kawasan kumuh padat penduduk, serta masalah urban lainnya di Jakarta tidak pernah berhenti.

Sejumlah kebijakan telah ditempuh. Urusan meledaknya jumlah penduduk akibat urbanisasi besar-besaran yang hampir terjadi tiap tahun selalu diatasi dengan sekadar razia kartu tanda penduduk (KTP). Kesemrawutan pedagang kaki lima dilakukan penggusuran berbahasa 'penertiban'. Kemacetan arus lalu lintas dibuatlah *three in one*, busway, dan pembatasan jalur.

Kasus mutakhir mengenai kemacetan dan rentetan kecelakaan akibat forider para pejabat, sempat melahirkan perdebatan keras. Demikian pula soal kriminalitas kota. Kasus perampokan, pencurian, copet, pelecehan seksual di *busway*, dan berbagai kejahatan itu menciptakan ketegangan dan ketakutan masyarakat. Sejauh ini pada tiap kasus hanya menggunakan instrumen represif, pendekatan hukum

legalistik, tetapi tanpa mengatasi akar masalah, sehingga potensi berulang kasus demikian tinggi.

Pola-pola penyelesaian semacam itu, umumnya hanyalah mengatasi lapis atas gunung es masalah sosial di Jakarta. Apalagi, tak kurang berbagai siasat bermunculan untuk 'memanipulasi aturan. Antara aturan, aparat, serta yang diatur tidak memiliki kesepahaman memaknai kebijakan, sehingga sebanyak apapun produk hukum pada akhirnya tidak efektif memecahkan masalah. Jakarta memang terlalu *crowded*, jika hanya diselesaikan secara reaksioner semacam itu.

Tentu dibutuhkan ide-ide brilian yang visioner. Sejumlah gagasan menggeser dan mengimbangi pusat-pusat pertumbuhan agar tidak menumpuk di Jakarta, pernah ditempuh. Persebaran industri dan perdagangan ke wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi selama ini dianggap sebagai bagian upaya skema perluasan dan perimbangan ekonomi.

Tetapi, lagi-lagi, karena kebijakan tersebut tidak dibangun dalam *grand design* antara pengembangan infrastruktur, tata kelola, regulasi, sumberdaya manusia, serta kultur yang berorientasi jangka panjang, maka upaya itu selalu terinterupsi oleh improvisasi dan kepentingan pragmatis. Terutama oleh para penguasa politik dan pemilik modal.

Soal tata ruang misalnya, selalu muncul peristiwa yang bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan. Wujudnya pelanggaran aturan main. Bahkan paling menjengkelkan, lembaga pelaksana kebijakan condong tidak konsisten, karena tergoda oleh nalar pragmatis itu. Oleh karena itu wacana pemindahan ibukota negara, betapapun diliputi sejumlah kontroversial, tentu perlu dimaknai sebagai bagian dari mencari jalan keluar yang sifatnya jangka panjang.

Masalah ini perlu didiskusikan secara serius, ditengah keruwetan Jakarta sebagai ibukota negara. Bagaimana memecahkan masalah agar tidak lagi terjadi penumpukan aktivitas politik dan pemerintahan, perdagangan, serta industri dalam satu kantong kota dengan segala risiko yang melekat di dalamnya.

Memang tidak mudah. Selain membutuhkan rancangan dan persiapan serius, kebutuhan sumberdaya juga demikian besar. Mulai dari penyediaan infrastruktur, tata kelola kelembagaan dan sistem

informasi-teknologi yang memadai, penyediaan dana yang besar, penyiapan kultur agar terjadi transformasi pada wilayah-wilayah baru.

Namun, kita perlu berfikir 10 sampai 20 tahun kedepan yang lebih antisipatif. Langkah besar perlu dilakukan, dibandingkan sekadar improvisasi reaksioner tetapi hanya sekadar menutupi masalah yang siap meledak saatnya nanti. Inilah tantangan besar yang perlu dijawab.

REPUBLIKA, 10 Agustus 2010

Bagian V

Delegitimasi Negara



I. Pembangkangan Sipil



Di beberapa tempat pinggiran jalan raya, biasa terpampang baliho besar iklan layanan masyarakat berbunyi: “Warga Bijak Taat Pajak”. Begitupun di televisi, radio, koran, serta ragam media menayangkan kampanye yang berisi himbauan bagi warga negara untuk taat dan disiplin membayar pajak. Tentu saja iklan ini disampaikan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan birokrasi, pelayanan kebutuhan warga negara, kegiatan pembangunan, serta beragam urusan publik dalam hal pembiayaannya bersumber utama dari uang pajak yang ditarik oleh negara dari masyarakat. Pajak dimengerti sebagai bagian kewajiban warga negara, ikatan formal yang termaktub dalam konstitusi atau perundangan. Warga negara yang telah memenuhi kewajiban pajak, akan mendapatkan hak-haknya. Konstitusi telah menjamin imbalan itu berupa hak warga negara mendapatkan perlindungan, atau pemenuhan kebutuhan dasar sebagai manusia.

Di sinilah terjadi ‘korsleting.’ Begitu gencarnya seruan agar rakyat membayar pajak, dari ukuran kelas bawah sampai golongan atas, dipakainya dalil-dalil hukum penguat, janji-janji bahkan ancaman agar pajak dibayarkan. Namun, nyaris tidak ada iklan pembanding yang berisi himbauan agar negara memenuhi kewajibannya pada warganya. Misalnya saja: “negara bijak taat pelayanan publik”. Ini seolah bukan masalah penting. Padahal, jika dilacak nalar bernegara dan konstitusi yang melandasinya, hubungan negara dan warganya harusnya bersifat timbal balik, berimbang.

Pada negara yang menganut sistem otoriter, mungkin hubungan sepihak dan asimetrik bisa dipahami, *toh* negara hanyalah sebetuk representasi penindasan dibalut konstitusi. Dominasi dan hegemoni

pemerintah dengan segenap aparat kepada rakyatnya menjadi hal biasa. Tetapi di zaman demokratisasi sebagaimana dijalani Indonesia, kenyataan yang terjadi tidak sebaik pesan konstitusi. Sejauh ini, hubungan negara dan masyarakat masih terlalu berat sebelah. Kewajiban bernegara dan bermasyarakat secara tegas dijamin konstitusi, dalam implementasinya masih compang-camping.

Pelayanan publik rata-rata masih buruk, birokrasi belum mampu menjalankan agenda reformasi dengan baik. Sumberdaya pajak dan penggunaannya untuk pembangunan yang terumuskan secara rutin pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), atau daerah (APBD), secara umum masih disedot untuk biaya rutin menggaji pegawai negeri sebesar 70 persen, sementara untuk belanja pembangunan 30 persen. Banyak hak warga negara sering tidak terpenuhi, dimana negara absen memenuhi tanggung jawabnya.

Kisah-kisah ironis seperti belitan kemiskinan tak tersentuh pembangunan, gizi buruk, keterbelakangan, serta kesenjangan sosial antara kelompok elit kaya dan kaum miskin adalah fakta-fakta yang memberi pesan penting bahwa terlalu timpang hubungan negara dan masyarakatnya. Antara membayar pajak dan pemenuhan hak warga negara masing *njomplang*.

Jika warga tidak taat pajak, biasanya akan didenda atau dihukum. Hal yang biasa terjadi. Tetapi bagaimana jika negara tidak memenuhi kewajibannya memenuhi kebutuhan warga negaranya? Seharusnya negara juga didenda atau dihukum karena telah lalai atas tugas utamanya. Konstitusi UUD 1945 sekalipun telah menegaskan soal itu, dan digawangi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), lagi-lagi dalam implementasinya masih ingkar.

Jika demikian halnya, maka wajar saja jika warga negara menghukum negara berbentuk 'pembangkangan sipil' (*civil disobedience*). Tindakan politik warga negara membangkang dijamin konstitusi, adalah ekspresi menagih tanggungjawab negara yang telah lalai memenuhi tugasnya. Jika pelayanan publik tidak beres, jangan kaget jika warga negara mempertanyakan atas alasan apa membayar pajak sebagaimana diiklankan itu.

REPUBLIKA, 6 Desember 2011

2. Distribusi Risiko



Jika kita simak berita di media massa, hampir setiap hari ada berita tabung gas elpiji meledak di berbagai pelosok Nusantara. Saking beruntunnya, seolah tiada hari tanpa kabar ledakan tabung elpiji. Ukurannya ada 3 kilogram maupun 12 kilogram. Akibat dari peristiwa itu, selain kerusakan barang-barang, rumah hancur, luka-luka diderita banyak orang, bahkan ada yang meninggal dunia. Ini sungguh tragis dan ironis, saat di mana pada beberapa tahun terakhir Pemerintah dan Pertamina begitu gencarnya melakukan konversi minyak tanah ke gas, justru melahirkan petaka di mana-mana.

Anehnya, luncuran pernyataan para pejabat, selalu menganggap masalah-masalah itu sekadar teknis, kasuistik, dan dengan enaknyanya mengatakan: dapat diatasi! Padahal, pada tiap kejadian, tanpa muncul langkah besar untuk segera mengoreksi, mengevaluasi bahkan mencari akar masalahnya agar tidak terulang kembali. Sementara korban di mana-mana, dan tentu menjadi ancaman siapapun bagi pengguna gas elpiji.

Muncul sejumlah kecenderungan, ini terjadi dalam masyarakat modern yang begitu rentan, petaka modernisasi menyeruak melahirkan risiko yang sulit diatasi oleh kelompok miskin yang secara struktural marginal. Ketika industri makin menguat yang ditopang kebijakan-kebijakan negara dengan ayunan kepentingan pemilik modal, pola distribusi keuntungan yang timpang di satu sisi sementara kerusakan dan akibat yang ditimbulkan dibagi secara massal di sisi yang lain.

Fakta seperti ini mengingatkan pada pikiran Ulrich Beck, seorang sosiolog kesohor dari Jerman yang memberikan analisis, betapa modernisasi dengan kebijakan-kebijakan industri yang terjadi di belahan

dunia condong menumpuk risiko yang dibagi-bagi kepada masyarakat. Golongan kaya dengan pola rakus menikmati “madu” modernitas, sebaliknya kelompok rentan tak berkemampuan kritis terjerembab pada posisi tersudut oleh gilasan roda industri dengan dipaksa melahap risiko. Itulah ketidakadilan.

Dulu, sebelum dikenalkan teknologi yang *high tech*, masyarakat—khususnya golongan bawah— menggunakan kayu bakar dalam kegiatan rumah tangga. Perkenalannya dengan minyak tanah juga topangan kerja listrik, menjadi janji baru agar efektivitas kegiatan domestik terpenuhi. Keterjangkauan minyak tanah oleh masyarakat dilakukan dengan pola subsidi oleh negara. Namun, saat globalisme menyeruak di negeri ini, langkah efisiensi dan privatisasi makin memaksa negara mengurangi subsidi pada masyarakat.

Alasannya, selalu tumpuan APBN yang dianggap berat, dan konon dengan bahasa klise agar masyarakat tidak manja. Padahal kebijakan itu lahir tidak lebih sebagai ekspresi ideologis, dari bekerjanya neo-liberalisme. Subsidi bagi penganut paham itu dianggap haram. Pemerintah pun dengan latahnya melakukan penyesuaian struktural, di sana-sini dicabut subsidi. Itu pula menyangkut subsidi minyak tanah, lalu dikonversi ke dalam gas karena konon lebih murah dan efisien.

Dengan begitu, kebijakan negara melakukan konversi minyak tanah menjadi gas, diasumsikan secara ekonomi efisien. Kalkulasi ekonomi itu didekati dengan cara teknokratik dan administrasi. Sayangnya, kebijakan konversi itu tidak diikuti transformasi pengetahuan, kultural dan lingkungan yang memadai. Kita bisa mengetahui akibatnya. Dalam proses dan implementasinya, konversi ini menjadi sebetuk proyek Pemerintah, Pertamina dan pihak swasta. Tetapi masyarakat? Mereka hanyalah menjadi objek. Pemerintah dan Pertamina menggunakan ukuran angka administratif, di mana capaian distribusi kompor dan tabung gas gratis itu, lalu menciptakan keuntungan industri kompor dan tabung gas, serta makin larisnya gas terjual sampai pelosok desa dan kampung kumuh di kota.

Tetapi, apakah itu diikuti keseriusan mengantisipasi dampak dan risiko yang ditimbulkan? Kita tau semua, bahwa rentetan ledakan tabung gas di mana-mana adalah bukti konkrit bahwa Pemerintah, Pertamina dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek ini sedang

ramai-ramai mendistribusi risiko secara massa kepada masyarakat. Kesemua ini jelas bukan lagi soal teknis sebagaimana pernyataan Pejabat Pertamina yang begitu entengnya menanggapi masalah itu, tetapi lebih dari itu adalah soal kebijakan yang tidak beres.

REPUBLIKA, 6 Juli 2010

3. Korupsi Alquran



Beberapa waktu lalu, sejumlah petugas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dan memeriksa ruang kerja nomor 1324 anggota Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2012. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penetapan politisi dari Golkar itu sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan Alquran senilai Rp 35 miliar di Kementerian Agama.

Ini kisah tragis dan ironi, di antara beragam masalah korupsi yang membelit Indonesia yang kian akut. Korupsi tetaplah korupsi, apapun itu. Namun, kasus korupsi pengadaan Alquran oleh politisi DPR yang merekayasa agar pemenang tender jatuh pada keluarganya, tentu membuat 'berdiri bulu kuduk'. Suatu tindakan yang keterlaluan.

Moralitas politisi kian hilang, mereka cenderung mudah menginjak-injak etika sosial hanya demi mengeruk keuntungan. Padahal, para pejabat atau politisi di parlemen itu ketika dulu dilantik mengawali memegang tampuk kekuasaan jelas-jelas disumpah di bawah kitab suci yang diyakini sebagai sandaran utama tumpuan amanah.

Kasus itu juga menggugurkan nalar normatif seolah pejabat dan penguasa adalah pemegang amanah rakyat. Faktanya justru sebaliknya, mengorupsi sumpah, menanggalkan nilai-nilai dasar di mana dirinya sebagai makhluk beragama. Kementerian Agama kemungkinan menjadi bagian dari praktik konspirasi semacam ini, tentu tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya.

Track record buruk para politisi, khususnya mereka yang tergabung dalam Banggar DPR, pada akhirnya makin memperkuat keyakinan masyarakat betapa lembaga representasi politik itu menghadapi

masalah yang akut, begitu terbiasa dan memelihara perilaku kotor dengan penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Terbongkarnya rangkaian kasus korupsi tersebut, seharusnya terus ditelisik agar gunung es struktur korupsi yang sistemik bisa diberantas sampai akarnya. Kerja investigasi dan reaksi cepat KPK hendaknya ditopang oleh dukungan masyarakat sipil secara lebih luas, untuk menumbuhkan energi kolektif menjadi gerakan sosial. Tidak perlu terjebak pada 'gorengan' lawan politik atau pemanfaatan kelompok lain yang memanfaatkan kasus ini untuk membangun pencitraan baru untuk saling serang.

Justru kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat atau publik, dapat diolah sebagai bahan untuk gerakan 'sabotase', yakni kelak pada pemilu berikutnya. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, begitu banyak kasus terbongkarnya korupsi yang dilakukan politisi, tetapi sayangnya pada giliran Pemilu berikutnya toh sang koruptor terpilih kembali hanya gara-gara pragmatisme dan nalar pendek masyarakat pemilih. Dalam pemilu pemilih gampang lupa, entah karena dimanipulasi dengan politik pencitraan polesan moralitas palsu, maupun cara suap-menyuap dengan *money politic*.

Tantangan inilah yang harus dijawab oleh masyarakat. KPK hanya mampu membongkar dan menghukum para koruptor, sementara rakyatlah yang selanjutnya bertugas dan bertanggungjawab memperbaiki sistem, meminggirkan para koruptor itu dari struktur kekuasaan dalam sistem demokrasi. Tujuannya memastikan agar kekuasaan betul-betul amanah melalui kontrol rakyat yang kritis dan cerdas.

REPUBLIKA, 3 Juli 2012

4. Rekening Gendut PNS



Setelah digemparkan oleh kasus mafia pajak yang dilakoni Gayus Tambunan, kini tiba-tiba mencuat kembali kasus yang hampir mirip. Sinyalemen rekening gendut kini terbukti sudah dengan terbongkarnya praktik korupsi sistemik pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dhana Widyatmika. Kejaksaan Agung menahan Dhana dan menetapkannya sebagai tersangka selaku pemilik rekening. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) muda, kekayaan Dhana yang puluhan miliar dianggap tidak wajar, yang diduga diperoleh secara manipulatif pada wajib pajak yang diuntungkan oleh aksinya.

Di satu sisi temuan ini dapat dianggap sebagai langkah positif begitu kencangnya aparat hukum memberantas korupsi. Namun di sisi lain, kita makin risau betapa birokrasi masih dalam belitan korupsi yang kian parah, menggurita. Genderang perang yang ditabuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada aparat negara baik di legislatif, pemerintah, maupun aparat hukum agaknya belum mampu menyitukan nyali para koruptor.

Pembongkaran praktik mafia anggaran yang menjadi sorotan dan telah menyeret puluhan politisi di DPR, mungkin tidak seberapa besar dibandingkan belitan korupsi yang dijalani oleh para birokrat, dari elit sampai golongan bawah. Mengapa demikian? Karena para birokrat itu tentu lebih lihai memanipulasi dan merekayasa administrasi keuangan yang telah berlangsung dalam pola yang 'rapi dan sistematis'.

Kisah korupsi dengan jejak yang begitu tertutup telah berlangsung dalam waktu lama terutama pada zaman Orde Baru, dibalut dengan sistem politik otoriter. Sehingga koruptor dilindungi undang-undang dan kekuasaan. Sementara itu, korupsi di era reformasi ini justru makin

terbuka, berpola menyebar dan bukan saja dioperasikan semata di tingkat pusat (Jakarta) tetapi telah terdesentralisasi ke daerah-daerah. Karena itu tidak heran, mulai dari menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinas sampai kepala desa terseret ke pengadilan gara-gara korupsi.

Seruan reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden SBY dalam dua periode berkuasa, nampaknya masih menjadi gagasan kabur karena fakta penyelenggaraan pemerintahan di hampir semua lini belum tersentuh, tidak terjadi perubahan mendasar secara meyakinkan. Mafia pajak adalah praktik lama, karena di situlah lahan basah di mana para birokrat memegang kunci perputaran keuangan negara dalam naungan Kementerian Keuangan.

Langkah awal Kementerian Keuangan dengan membenahi remunerasi yakni meningkatkan PNS di lembaganya justru menjadi bumerang, karena bukan meningkat kinerja serta disiplin dalam tanggungjawabnya sebagai aparat negara. Tetapi sebaliknya, justru memanipulasi keuangan untuk memperkaya diri pribadi dan kelompoknya secara merajalela. Terungkapnya fakta rekening gendut PNS menjadi petunjuk betapa korupsi identik dengan birokrasi.

Berkaitan itu, tak mungkin gebrakan keras KPK dan aparat hukum bisa membuat efek jera para birokrat untuk menghentikan korupsi. Lebih dari itu diperlukan langkah besar untuk menerobosnya lingkaran korupsi yang telah berurat berakar dalam birokrasi, agar kasus Dhana tak terulang kembali. Tanpa terobosan penanganan, kemungkinan kasus Dhana akan disusul dengan kasus baru lainnya dalam lingkaran birokrasi yang busuk.

Jalan memang masih panjang yang harus ditempuh gerakan melawan koruptor. Karenanya membutuhkan keseriusan, keberanian dan ketepatan strategi agar langkah-langkah besar punya makna yang berharga untuk membenahi birokrasi.

REPUBLIKA, 6 Maret 2012

5. High Cost Politic



Keresahan menyangkut tingginya biaya politik (*high cost politic*) dalam beberapa tahun terakhir menjalani demokratisasi Indonesia menjadi bagian masalah krusial di negeri ini. Rentetan Pemilu, dari memilih Presiden, anggota Parlemen, Gubernur, Bupati, Walikota bahkan Kepala Desa, rata-rata terkait dengan urusan uang. Sedotan biaya dari puluhan juta sampai ratusan miliar menjadi gejala yang dianggap 'biasa' pada tiap episode pesta politik Pemilu.

Dalam aturan Pemilu, soal penggunaan uang sesungguhnya telah dibatasi dengan koridor sangat ketat. Dalilnya sangat jelas, agar kekuasaan didapat dengan cara jujur, bermoral, transparan, dan akuntabel. Norma hukum pembatasan dana kampanye misalnya, dipakai untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus menghindari manipulasi yang berakibat krisis legitimasi pemilu. Begitu pula soal penggunaan uang dalam praktik menyuap pemilih atau pada penyelenggara Pemilu, selama ini menjadi perhatian utama yang diatur dalam perundangan tersebut.

Tetapi faktanya, derajat toleransi atau pemakluman atas tindakan amoral segala rupa penggunaan uang demi meraih kekuasaan, toh begitu longgar. Bahkan, dapat dianggap sebagai kebiasaan buruk yang terpelihara dan terwaris. Semboyannya adalah 'tahu sama tahu'. Hampir semua politisi baik golongan pemain lama, atau pendaatang baru sekalipun, menyadari benar bahwa masuk dalam arena kontestasi perebutan kursi kekuasaan tak luput dari praktik *money politic*. Memang begitu parah.

Begitu seringnya kebiasaan penggunaan uang untuk transaksi suara atau aspirasi, sampai-sampai urusan suap menggunakan uang atau materi sejenis menjadi 'moralitas baru' dalam politik Pemilu. Jika

demikian dibiarkan terus, pola demoralisasi politik jelas menghasilkan Pemilu yang palsu, bahkan paling tragis demokrasi makin keropos tak bermakna.

Simaklah, betapa para politisi di parlemen dan eksekutif, baik tingkat nasional maupun lokal, pada tahun-tahun belakangan ini terus menjadi bahan berita karena dikejar-kejar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka, sekalipun sebenarnya secara pribadi tidak rusak, tetapi saat memasuki lintasan sistem manipulatif dalam arena Pemilu, membuat dirinya antri dalam perangkap korupsi.

Tindakan *abuse of power* untuk mengeruk keuntungan saat berkuasa, dilakukan secara terang-terangan. Pada hampir semua Parpol, kadernya tersangkut kasus korupsi dengan ragam ukuran. Jika ditelisik secara mendalam, tentu erat kaitannya dengan *high cost politic* saat Pemilu. Logikanya sederhana, karena mereka meraih kekuasaan dengan menggunakan uang, dan mentalitas manipulasi melekat dalam perilaku dan kebiasaannya, apalagi kontrol kolektif masyarakat makin kabur, maka jabatan yang diraihinya dijadikan alat untuk mengembalikan modal yang telah mereka tanamkan. Hal ini ibarat lingkaran setan.

Politik biaya tinggi telah menjerumuskan para politisi dalam sangkar korupsi. Jika pola semacam itu tidak segera dihentikan, sekalipun hanya sekadar disadari sebagai masalah, maka siklus rotasi kekuasaan lima tahunan tidak akan beranjak dari masalah yang sama, bahkan semakin parah. Di situlah ada konteks yang meyakinkan perlunya lompatan besar, memulai untuk menjalani politik biaya murah tetapi bernilai moralitas tinggi.

REPUBLIKA, 1 Mei 2012

6. Politisasi Olahraga



Peristiwa kemenangan demi kemenangan yang dipetik Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Garuda pada mulanya telah membangkitkan optimisme, memunculkan mental juara. Rentetan prestasi yang dikantonginya telah menyedot perhatian publik, berbagai kalangan dan lapis masyarakat. Semua tiba-tiba gila bola. Jika kita tarik dalam tafsir makro, dalam lingkungan yang serba gempita dan *euphoria* era sekarang ini, tiap peristiwa nasional apapun di negeri ini seringkali tak luput dari ragam kecenderungan politisasi.

Lolos dari babak semi final dan memasuki final, manuver kalangan elit kekuasaan begitu riuh. Lihat saja misalnya, tiba-tiba Aburizal Bakri sebagai ketua umum Golkar memanfaatkan momentum itu dengan mengundang makan malam, dan menghibahkan tanah buat PSSI. Para politisi parpol berbondong-bondong memobilisasi untuk nonton ke negeri jiran Malaysia, dengan seruan resmi. Para pengurus PSSI yang selama ini memiliki reputasi buruk, *toh* kemenangan Timnas juga diklaim sepenuhnya keberhasilannya.

Apapun bisa terjadi soal konstruksi dan klaim ini. Mereka berlomba-lomba memasang dada, bahwa tiap peristiwa positif sebagai hasil perannya. Padahal, apapun manuver elit semacam itu, jelas publik gampang menilai secara kritis, bahwa klaim seperti ini “terdelegitimasi” jika dikaitkan dengan reputasi dan perannya jauh-jauh sebelum kemenangan diraih. Tentu banyak sinisme, karena klaim condong *out of context*.

Coba bandingkan dengan peristiwa sebaliknya. Contohnya, bagaimana dengan munculnya rangkaian kasus kekacauan manajemen tiket yang melahirkan gejala penonton, sampai-sampai terjadi kerusuhan

di Gelora Bung Karno? Bagaimana dengan peristiwa kekalahan fase pertama babak final pertandingan Indonesia vs Malaysia Piala AFF dengan skor 0-3 itu pada minggu malam lalu di Stadion Bukit Jalil Malaysia? Siapa yang bertanggung jawab atas semua itu?

Gampang ditebak, jika ada keberhasilan yang disebut prestasi, kecenderungannya saling mengklaim. Akan tetapi, jika ada kasus dan fakta kekalahan tiba-tiba pada bungkam dan lepas tanggungjawab. Jangan-jangan kita terlalu terlena dengan pujian yang berlebihan. Atau, nafsu politisasi secara keliru dengan cara memanfaatkan peristiwa kemenangan Timnas Garuda telah merusak mental banyak pihak yang berpengaruh pada pemain.

Inilah tantangan serius dalam tiap kerja besar, termasuk dunia sepakbola yang rawan dari komodifikasi dan politisasi. Apapun bentuk politisasi bisa menarik. Ketika politisasi diformulasikan dalam bentuk perhatian dan antusiasme masyarakat kian memastikan popularitas olah raga sepak bola Indonesia. Dengan begitu, makna positif politisasi adalah mampu membangkitkan untuk terus berprestasi.

Namun, politisasi berlebihan pada tiap even atau prestasi nasional bisa juga justru terperosok dalam lubang kekacauan nalar. Profesionalisme dikacaukan oleh hasrat manipulatif, motifnya kepentingan membangun citra yang berorientasi kuasa. Inilah politisasi yang berujung pendangkalan.

Tidak perlu patah semangat atau terpaku pada ramainya umpatan, persis ramainya saling klaim. Saatnya merefleksikan rangkaian peristiwa perjalanan Timnas ini, untuk berbenah diri. Mulai dari urusan membangun dan membangkitkan mental pemain dan pelatihnya, menata ulang sistem kelola penyelenggaraan sampai dengan urusan tiket, serta memperkuat kematangan para penonton yang menjadi bagian sumber energi sosial.

Kemenangan Timnas Garuda tentu wujud kerja besar yang membutuhkan kesadaran kolektif antar pihak untuk saling menopang. Politisasi sepakbola, andaipun masih terus terjadi, hendaknya senantiasa dibangun dengan konstruksi kebersamaan sebagai upaya memperkuat identitas kolektif yang bisa dirasakan bagi bangsa secara jamak.

REPUBLIKA, 28 Desember 2010

7. Membela Desa



Isu desa kembali mencuat bersamaan dengan proses pembahasan rancangan undang-undang mengenai desa (RUU Desa) yang kini dikerjakan DPR dan Pemerintah. Rencana penataan dan pengaturan ulang soal desa ini sesungguhnya sudah berlangsung lama, tetapi mengalami kemandegan proses politik di Pemerintah.

Di sisi lain daya ungkit dan keseriusan Parlemen juga rendah agar memprioritaskan pembahasannya. Padahal sebagian besar, atau lebih dari 75 persen masyarakat Indonesia menghuni desa, yang dapat dijadikan alasan mendasar agar pembahasan regulasi tersebut diutamakan.

Masyarakat sipil yang umumnya tergabung pada koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli desa, masyarakat adat maupun agraria terus mendorong agar ada pembaharuan desa. Orientasinya adalah bagaimana ke depan terwujud penguatan kedaulatan desa agar mampu menjawab kebutuhan demokrasi dan kesejahteraan warganya.

Di zaman Orde Baru pengaturan desa tertuang dalam UU no. 5 tahun 1979. Regulasi itu berhasil membonsai desa, menghancurkan keragaman desa di Indonesia. Di situ pula berfungsi politik korporatik yakni mengontrol masyarakat desa. *Developmentalism* mendasarkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik menjadi narasi besar menjinakkan orang-orang desa. Masyarakat masuk perangkat depolitisasi, deideologisasi, serta *floating mass*. Risikonya desa kehilangan kedaulatan, dikuasi negara dan dijadikan objek berwujud kebijakan ragam sektor.

Semenjak reformasi, ide baru menata desa tertuang dalam UU nomor 22 tahun 1999 yang mengarah pada otonomi desa. UU tersebut memberi makna baru memompa ulang partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, sekaligus memberi pengakuan praktik demokrasi desa. Sayangnya kebangkitan desa pada awal reformasi tidak berlangsung lama. Terbitnya UU nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang didalamnya mengatur soal desa, yang berpola condong resentralisasi (pemusatan kembali) memerosotkan kembali posisi desa.

Artinya, kelangsungan babak reformasi ternyata belum mengubah secara signifikan nasib desa. Kondisi pemerintahan desa, sumberdaya alam, budaya atau *social capital*, maupun ekonomi warga masyarakat mengalami involusi. Ketegangan sosial dan politik kebijakan sekalipun era baru, rata-rata menempatkan posisi desa makin marginal.

Saat desentralisasi diluncurkan ke aras lokal, nyatanya kekuasaan politik dan anggaran mengendap di pemerintah daerah. Demokrasi berlangsung formalis, dibajak oleh persekutuan elit lokal di tingkat kabupaten, melalui cara pemanfaatan akses sumberdaya pembangunan dan anggaran daerah. Dampaknya, sekalipun kewenangan bergeser di lokal bertajuk otonomi daerah, desa tetap miskin tidak memiliki kesempatan *bargaining position* secara memadai.

Ada beberapa hal tantangan terkait pembaharuan desa dalam RUU ini. Pertama, perlunya pengakuan (*recognition*) keragaman desa, hak kedaulatan yang melekat di dalamnya sebagai pilar utama sistem lokal. Kedua, pembenahan ulang tata pemerintahan desa mempertimbangkan konteks lokalitas, bertujuan memberi makna otentisitas desa. Ketiga, menata praktik demokrasi desa dengan orientasi memperkuat partisipasi warga dan akuntabilitas kekuasaan. Kita perlu membela kewenangan desa melalui desentralisasi, sekaligus mendorong transformasi desa dengan demokratisasi.

Keempat, reformasi perencanaan dan anggaran pembangunan demi menjawab kebutuhan desa. Disitulah perlu menata ulang alokasi sumberdaya ekonomi dan pembangunan kedesa dengan arah konsolidasi rencana dan penganggaran yang efektif dan akuntabel.

Agenda pembahasan RUU desa ini tentu perlu dikawal serius agar substansi pembaharuan desa tidak dibelokkan atau didistorsi oleh elit politik maupun ekonomi. UU tersebut pada akhirnya akan menjadi salah satu penentu, apakah desa ke depan akan menjadi lebih baik ataukah terpuruk.

REPUBLIKA, 24 Januari 2012

8. Disorientasi Birokrasi



Tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Perdagangan mencantumkan soal untuk dijawab peserta tes tentang lagu SBY di album ketiga. Karuan saja hal tersebut menjadi kontroversi publik. Banyak yang menilai, pencantuman soal tersebut tidak pantas pada sebuah tes penyaringan pegawai negeri. Terlepas dari kesengajaan oleh birokrasi Kementerian, ataukah pesanan tim SBY, bahkan mungkin sebenarnya tidak disengaja, peristiwa ini jelas melahirkan kecaman bertubi-tubi.

Ini gejala apa? Saya menyebut birokrasi Indonesia tengah mengalami disorientasi yang akut. Bagi institusi negara yang berupaya merekrut tenaga baru mengisi posisi aparat pelayanan birokrasi, seharusnya soal-soal yang dijadikan alat uji berkisar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) birokrasi Kementerian Perdagangan. Misalnya, pengetahuan para calon mengenai tata perundangan (regulasi), posisi kelembagaan Kementerian dan cakupan kerja sektor perdagangan, atau pengetahuan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sistem birokrasi Indonesia. Dengan demikian, penyusunan soal harus relevan dengan orientasi birokrasi.

Jargon reformasi birokrasi, nampaknya masih mengawang-awang. Saat SBY dilantik menjabat presiden periode ke-2 dan menjalani masa awal pemerintahan, telah mencanangkan langkah besar membenahi tata birokrasi dengan arah *good governance*. Sebagaimana diketahui, bahwa selama era reformasi langkah-langkah untuk membenahi birokrasi tergolong lamban. Agenda perbaikan pelayanan publik dan hak-hak dasar, pemberantasan korupsi, peningkatan kompetensi aparat, efisiensi dan efektifitas sistem, serta transparansi dan akuntabilitas

birokrasi, masih menjadi tantangan besar pemerintah. Bukan saja di pemerintah pusat, tetapi juga di daerah.

Agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan SBY ibaratnya ‘manifesto politik’ yang relevan dan urgen sesuai spirit reformasi. Sayangnya, upaya reformasi birokrasi tidak diikuti oleh peta jalan (*road map*) yang berisi rincian pembenahan birokrasi. Di antaranya, tahapan dan fase perbaikan kelembagaan, ukuran keberhasilan, target capaian hasil dan waktu, serta komitmen para aparat pelayanan masyarakat itu. Pada sejumlah kasus, jika *top executive* pada masing-masing Kementerian mampu menterjemahkan ke dalam langkah konkrit dan relatif terukur, bisa dipastikan perbaikan mendasar birokrasi akan tercapai.

Sebaliknya, jika para pemegang kunci kebijakan itu tidak peka, apalagi tidak memiliki komitmen dan keberanian mengambil inisiatif pembenahan birokrasi, bisa dipastikan birokrasi tetap konservatif, senantiasa terjebak sebagai institusi mekanis yang bebal dan korup. Beberapa Kementerian yang didesak oleh publik untuk meningkatkan kinerjanya dan relatif memiliki kepekaan, secara bertahap membuat prestasi memadai.

Tetapi, sebaliknya Kementerian yang pongah, tidak mungkin membuat langkah besar pembenahan secara memadai. Contoh konkrit, beberapa waktu lalu saat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menilai kinerja Kementerian, ternyata ditemukan beberapa bukti Kementerian prestasinya jeblok. Sayangnya, penilaian semacam ini kadang direaksi dengan politisasi yang cukup kental. Akibatnya, birokrasi Indonesia terus tersandera dalam ketidakpastian perubahan.

Problem munculnya soal ‘aneh’ dalam tes CPNS di Kementerian Perdagangan ini hendaknya menjadi catatan serius dan pelajaran berharga. Meskipun kasus ini sepele, sesungguhnya hal itu erat kaitannya dengan *mind set* besar para aparat birokrasi yang bebal. Bukan mustahil kasus yang terjadi pada Kementerian Perdagangan itu juga hampir sama polanya dengan rentetan kasus rekrutmen CPNS di daerah-daerah.

Betapapun otonomi daerah menjadi kerangka besar dan pintu masuk pembaharuan birokrasi di aras lokal, tetapi umumnya, biro-

krasi dinas sektoral di daerah masih dibelit masalah yang sama. Terjadi disorientasi. Bahkan parahnya, di daerah saat ini makin marak transaksional posisi saat rekrutmen CPNS. Sudah menjadi rahasia umum, posisi CPNS kadang 'dijual' ibarat jualan jabatan saat proses rekrutmen. Inilah tantangan berat dan serius yang harus dijawab dalam tajuk reformasi birokrasi.

REPUBLIKA, 19 Oktober 2010

Bagian VI

Kekerasan dan Sabotase Demokrasi



I. Politik Perhatian Bom



Rentetan ancaman bom berbentuk kiriman paket buku di beberapa tempat di Ibu Kota Jakarta dan beberapa daerah dalam pekan terakhir, begitu menyedot perhatian banyak kalangan. Berbagai spekulasi muncul. Memang tidak mudah menebak, mengingat nama dan alamat pengirim juga palsu. Pihak yang menjadi sasaran juga beragam, dari politisi, artis, aktivis, polisi, juga masyarakat umum. Bom juga ditaruh di beberapa tempat strategis dan keramaian di Jakarta dan daerah.

Maraknya ancaman bom melahirkan reaksi saling curiga, makin was-was. Meskipun belum menimbulkan korban jiwa, tetapi korban luka-luka yang dialami polisi dan masyarakat pada peristiwa awal. Teror bom tidak perlu diperdebatkan motifnya, atau siapa pelakunya. Makin kencangnya spekulasi atas urusan motif dan pelaku, justru membuat spekulasi kian menjadi. Bagaimanapun, kita perlu dalam bagaimana konteksnya, dan cara merespons atau mengatasinya.

Pada era di mana bom menjadi alat teror, seringkali dikait-kaitkan dengan proses politik, hukum, ataupun urusan lain yang sulit ditebak secara pasti. Tetapi kita dapat analisis bahwa bom muncul untuk menciptakan 'politik perhatian dan kegaduhan baru.

Memperhatikan dinamika yang berkembang sejauh ini, di satu sisi begitu banyak kasus atau peristiwa berlomba diungkapkan. Akan tetapi di sisi lain, upaya-upaya begitu rupa menutupnya. Suasana riuh panggung politik dan hukum misalnya, mulai dari peradilan kasus mafia pajak, isu *reshuffle* kabinet, keretakan koalisi, kasus pengusutan korupsi anggota DPR, dan seterusnya dapat dikatakan cenderung tumpang tindih.

Ibarat bursa isu, begitu cepat berubah silih berganti. Media massa aktif, bahkan agresif menyebarkan informasi apapun dengan pola kontroversi. Perubahan cepat atas isu tak pelak melahirkan kebingungan, karena ketidakjelasan bagaimana makna atas semua itu. Teror bom ini jelas menjadi peristiwa 'interupsi' agar mendapatkan perhatian masyarakat. Toh masyarakat juga terlanjur dikondisikan dengan hal-hal yang heboh, terbawa larut suasana gaduh.

Di kalangan kelas menengah atau politisi misalnya, teror bom dibaca sebagai ekspresi konspirasi antar 'orang-orang besar' dengan cara intelegen hitam memanipulasi realitas dengan penuh ketegangan. Tetapi, di kalangan masyarakat dibaca secara berbeda. Ancaman bom yang secara sporadis pada situasi 'yang dikonstruksikan tegang' beresiko adanya tekanan dan beban masyarakat dengan suasana ketidakpastian. Kerentanan sosial direkayasa oleh teror bom, kemudian diolah berbentuk provokasi akhirnya menimbulkan reaksi, bisa berupa ketakutan, atau bahkan kecurigaan yang berlebihan.

Anehnya, pemerintah atau politisi di parlemen juga kadang terlibat menjadi bagian kegaduhan itu dengan cara 'dramatisasi'. Pernyataan yang muncul menebar ketakutan melalui polesan bahasa represif. Jika masyarakat takut, semestinya pemegang otoritas membuat tindakan konkrit penjamin ketenangan, berupa langkah-langkah terukur, pro-aktif, dan bukan spekulatif. Karena tugas pemerintah melindungi warganya dari ancaman teror apapun.

REPUBLIKA, 22 Maret 2011

2. Tragedi Mesuji



Menyaksikan pemberitaan dan tayangan video tentang pembantaian masyarakat di Mesuji sungguh ngeri dan memprihatinkan. Kisah kekerasan terkait klaim tanah dalam lingkaran industri atau korporasi selalu mengundang kontroversi, dan lagi-lagi begitu mudahnya nyawa manusia melayang sia-sia. Komnas HAM secara cepat mensinyalir adanya pelanggaran HAM berat, karena praktik kekerasan tersebut kemungkinan berlangsung sistematis, terencana dan bahkan dilakukan secara terbuka.

Kini pemerintah mulai menginvestigasi dan mengusut tragedi itu sebagai bagian tanggung jawab perlindungan pada warganya. Begitu-pun Komisi III DPR juga telah mengunjungi lokasi, serta membentuk panitia kerja (Panja) yang akan bergerak setelah masa reses. Sengketa di seputar lahan industri umumnya berakar pada soal klaim kepemilikan tanah, perizinan, eksistensi hak ulayat, serta janji perusahaan pada masyarakat yang didistorsi oleh permainan 'oknum' dengan segala cara.

Ujungnya ditandai perlakuan sewenang-wenang aparat dan preman perusahaan. Pola semacam ini terus berulang di negeri ini. Jika di zaman pemerintahan Orde Baru, kasus seperti ini seringkali terjadi. Tetapi selalu ditutup dan gagal dari pantauan publik karena begitu represif politik kala itu. Tetapi kini, apapun masalah sengketa di lingkungan industri tidak luput dari pantauan publik melalui penyebaran informasi oleh media massa. Meskipun kadang ekspos itu agak lambat sebagaimana kasus di Sumatera Selatan dan Lampung tersebut.

Sambil menunggu hasil tim investigasi Pemerintah, DPR, Komnas HAM serta pihak lainnya yang akan mengungkapkan, kita perlu jelajahi masalah ini agar mengetahui konteks masalah serta kemungkinan jalan

keluar. Secara umum, formula penyelesaian masalah sengketa agraria yang melibatkan pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat lokal (adat) misalnya, cenderung ditandai praktik ketidakadilan yang menimpa masyarakat.

Pola lama masih saja terjadi, di mana perusahaan seringkali mengklaim penguasaan atas tanah dengan pembuktian 'sertifikat.' Sementara pengakuan hak ulayat diabaikan begitu saja. Pertanyaannya adalah, apakah klaim administratif berupa sertifikat itu lahir melalui proses transparan, adil dan rekognisi (pengakuan) berdasarkan hak-hak sosial dan kultural yang bertumpu pada sejarah?

Bukan hal aneh jika terbitnya sertifikat yang dipegang perusahaan tersebut belum tentu memenuhi koridor hukum yang sensitif pada hak ulayat melekat dalam otorita sosial masyarakat adat. Sayangnya, permainan oknum memanipulasi melalui cara konspirasi begitu mudah lolos. Faktornya bisa saja memperalat kelemahan birokrasi dengan penyupaan. Atau model manipulatif pembodohan sistematis, yang menenggelamkan hak-hak warga melalui 'janji-janji palsu' perusahaan.

Tawaran bantuan penggarapan tanah, rekrutmen tenaga kerja, serta modus lainnya bertujuan meredam tuntutan hak warga. Di situlah kerentanan masyarakat lokal, rawan tindak sewenang-wenang oleh perusahaan. Tragisnya jikalau muncul sengketa perusahaan, begitu mudah melibatkan preman bayaran atau meminta bantuan 'oknum aparat keamanan' yang selalu dalam posisi tidak menguntungkan masyarakat.

Bagaimanapun juga negara harus bertanggung jawab menegakkan keadilan, bertumpu pada prinsip nilai-nilai perlindungan pada warga negara. Kasus pembantaian dan kekerasan di Mesuji yang menimpa masyarakat dengan dalih apapun harus diusut tuntas, pelakunya dihukum seadil-adilnya demi konstitusi dan kemanusiaan.

REPUBLIKA, 20 Desember 2011

3. Aparat Represif



Peristiwa bentrok antara aparat dan warga terus terjadi belakangan ini. Kasus terbaru adalah kejadian berdarah saat demonstrasi yang digelar warga Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Protes terhadap izin eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) dan berujung penembakan oleh aparat kepolisian secara membabi buta hingga menelan korban jiwa. Setidaknya dua orang demonstran meninggal dunia, sisanya ada yang dinyatakan luka-luka, dengan diikuti kerusakan berbagai fasilitas.

Rentetan kasus bentrokan dan kekerasan dalam penanganan aksi unjuk rasa, sejak tahun 2007 telah tercatat minimal 12 kasus berdarah yang dapat disimpulkan sebagai ekspresi aparat yang makin arogan. Misal, Januari 2007 bentrok TNI AU dengan warga Bogor; Mei 2007 sengketa lahan bentrokan antara mariner dengan warga; Januari 2011 eksekusi lahan di Polewali Mandar; 16 April 2011 bentrok di Kebumen; 11 Juni 2011 bentrok di Cileungsi; 22 Agustus 2011 bentrok di Luwuk Sulawesi Tengah; 10 Oktober bentrok di sekitar Freeport Timika; kemudian dari 6 November 2010 sampai dengan 14 Desember 2011 kira-kira ada empat kali kejadian bentrokan rangkaian kekerasan di Mesuji; sementara insiden Sape Bima ini menutup akhir tahun 2011 dengan cara tragis (*Republika*, 26/12/2011).

Upaya pengurangan pendekatan kekerasan atau model represif dalam penanganan sengketa di masyarakat dapat dinilai mengalami kegagalan. Perubahan paradigma dari keamanan dalam arti sempit, menjadi perlindungan sipil dalam kerangka kebijakan pembangunan serta demokratisasi masih dibayang-bayangi distorsi memburuk pada level implementasi.

Semenjak pemisahan TNI dengan Polri melalui Tap MPR no. VI dan VII/MPR/ 2000 dalam skema reformasi sektor pertahanan dan

keamanan, langkah-langkah bertahap Polri untuk membenahi diri mempraktikkan perlindungan masyarakat sipil terus diupayakan. Bahkan substansi penegakan HAM, *skill* diplomasi, negosiasi dan pendekatan keamanan bertumpu pada hukum terus dikembangkan.

Tetapi faktanya di lapangan perselisihan sosial selalu memicu 'nyalaknya' senjata api yang mengeluarkan peluru tajam begitu mudahnya menembus tubuh manusia. Tindakan itu berulang dilakukan yang senantiasa dibalut alasan membela diri atau menakut-nakuti. *Toh* dengan dalih apapun dari sejumlah kejadian nyawa para pengunjung rasa yang tak bersenjata itu harus melayang. Korban terus saja berjatuhan, sayangnya peristiwa tersebut tidak menjadi bagian pelajaran penting untuk mengevaluasi sistem penanganan pengunjung rasa agar lebih beradab.

Langkah demiliterisasi dan demiliterisme dalam kepolisian sebagaimana bagian agenda reformasi dan demokratisasi, masih jauh dari harapan. Watak aparat keamanan yang seharusnya menjadi bagian pelindung dan pelayan sipil malahan menjadi bumerang atau sebaliknya, yakni mengancam eksistensi gerakan sosial masyarakat.

Alih-alih, aparat keamanan selain tidak bergeser dari paradigma lamanya represif, juga makin memposisikan pemihakannya pada penguasa politik dan pemilik modal. Perseberangan posisi aparat keamanan, dalam hal ini polisi di hadapan masyarakat sipil, pada sejumlah kasus justru mengindikasikan tindakan inkonstitusional. Polisi dibentuk sebagai aparat keamanan sesuai mandatnya adalah melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban sesuai koridor hukum dengan prinsip keadilan, jangan sampai sebaliknya justru menyakiti rakyatnya.

REPUBLIKA, 27 Desember 2011

4. Sengketa Agraria



Rentetan konflik dan kekerasan terkait persoalan agraria di Indonesia masih terus terjadi. Tindakan represi penanganan sengketa perebutan lahan, pada beberapa kasus, cenderung menelan korban jiwa. Setelah kasus mutakhir seperti Bima NTB, Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan), kini kasus dengan pola yang sama terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Peristiwa ini secara tragis telah menelan korban seorang anak, Angga bin Darmawan berusia 12 tahun, tewas dengan luka tembak.

Secara umum perselisihan soal agraria yang rata-rata terkait klaim kepemilikan tanah sejauh ini melibatkan para aktor, di antaranya pemerintah, masyarakat adat, warga komunitas, perusahaan, aparat (tentara atau kepolisian), maupun kelompok kepentingan lainnya. Meradangnya masalah agraria pada era-era sekarang ini sebagian besar, termasuk di Ogan Ilir, merupakan warisan masa lalu. Sumber masalahnya adalah kebijakan Orde Baru yang saat itu seringkali mengambil paksa tanah rakyat secara represif diikuti tindakan manipulasi hukum, misalnya penerbitan sertifikat dan pola-pola klaim sejenisnya.

Tanah-tanah yang secara historis dan kultural bagian hak ulayat (adat), atau menjadi hak milik warga sebagai sumber penghidupan pertanian dan ekonomi komunitas, tiba-tiba disulap menjadi perkebunan, industri, atau lahan-lahan ekonomi baru. Perubahan fungsi lahan secara sepihak diikuti perubahan kuasa kepemilikan pada pengusaha, pemerintah, maupun pihak lainnya seperti aparat keamanan.

Kisah sedih penyusutan hak lahan dan tanah itu di zaman itu selalu ditutupi oleh karena bekerjanya politik otoriter Orde Baru, membungkam rakyat dengan cara-cara sadis seperti teror dan intimidasi, penculikan,

tindakan kekerasan, bahkan sampai pembunuhan. Sikap perlawanan rakyat atas penindasan semacam itu selalu diredam. Rakyat sering kali berhadapan dengan kepentingan pragmatis konspirasi antara pengusaha, pemerintah, dan aparat keamanan (kepolisian maupun tentara).

Pada era Reformasi sekarang ini, kasus agraria warisan masa lalu akan terus mencuat. Sejarah manipulatif klaim tanah menemukan momentumnya dipersoalkan ulang seiring keterbukaan dan demokratisasi. Masyarakat kian kritis dan berani melakukan gugatan hukum sesuai hak konstitusionalnya. Pengalaman militansi rakyat memperjuangkan hak atas lahannya kian radikal, dan tergolong konsisten.

Masyarakat menjadikan tanah bukan sekadar simbol hak penghidupan ekonomi, tetapi lebih dari itu sumber daya agraria memiliki ikatan kuat secara emosional dan kultural dengan sejarah di mana dirinya berasal dan berkembang. Itulah konteks, bagaimana masalah agraria menjadi masalah serius problem struktural yang dialami warga di aras bawah.

Di era demokrasi, penanganan sengketa agraria semestinya lebih menggunakan kombinasi antara pendekatan diplomasi dan negosiasi, musyawarah dan jalur legal (hukum). Jalur beradab itu tentu saja harus dilandasi nilai keadilan, pengakuan sejarah, redistribusi dan pemerataan, serta orientasi kemanusiaan. Pemerintah perlu melakukan pendekatan komprehensif dalam membuat kebijakan, terutama kerja sama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian untuk saling berpadu menuntaskan problem ini secara tepat dan adil.

REPUBLIKA, 31 Juli 2012

5. Politisasi Mental Komunal



Suasana batin masyarakat Indonesia, dalam beberapa waktu terakhir ini begitu resah. Kita nyaris disuguhi rangkaian peristiwa sengketa antar kelompok, baik itu berbalutkan agama maupun etnisitas. Bentrokan antara Forum Betawi Rempug (FBR) dan warga Rempoa, Ciputat, Tangerang yang berlangsung beberapa saat lalu, adalah salah satu dari sekian kejadian memilukan. Sebelumnya juga sering muncul kejadian penyerangan sekelompok masyarakat atas aliran agama tertentu.

Sejumlah milisi sipil dengan gaya anarkis juga terlibat pembubaran kegiatan diskusi, dengan macam tuduhan stigmatisasi. Rentetan kejadian itu menjadi tanda ancaman memburuknya hubungan horizontal antar kelompok di Indonesia. Dengan berbagai modus operandi, produksi sentimen semacam ini menjadi petunjuk bahwa relasi antar etnisitas, aliran agama, serta afiliasi politik begitu rentan. Pertanyaannya, bagaimana tanggungjawab negara dan para aparatnya, sampai-sampai masyarakat menjadi tidak nyaman?

Aparat sudah bergerak, dan berusaha mengatasinya. Tetapi, rata-rata tindakan aparat itu sifatnya mirip pemadam kebakaran, menyemprot bara dan kobaran konflik-kekerasan saat kejadian berlangsung, agar padam. Caranya, menangkap pelaku kekerasan dan menghukumnya. Itupun kadang terlambat setelah banyak kerusakan, jatuh korban, dan mengalami eskalasi yang menyebabkan trauma masyarakat.

Di tempat lain, bisa saja meledak kembali, lingkaran dendam para pelaku yang tak berkesudahan terus menghantui. Bangsa ini sedang sakit. Ternyata seruan perdamaian di alam demokrasi, kampanye agar

dialog, serta sumpah serapah hidup rukun untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan, hanyalah kabut tipis yang mudah lenyap oleh tindakan manipulatif kemunafikan.

Rintihan dan jeritan tangis para korban yang begitu keras sekalipun, hanyalah menjadi cerita dan sekadar dianggap statistik. Pola mengatasi masalah semestinya mengembangkan jiwa kebersamaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan anti kekerasan. Terjadi keanehan atas perubahan sosial di Indonesia. Kita dihadapkan pada situasi memalukan, kurang mampu mengatasi hambatan serius untuk menjadi masyarakat beradab.

Perilaku yang penuh santun, ketulusan, persahabatan dengan semangat kemanusiaan, seolah-olah hanyalah cerita-cerita historik masa lalu yang dikerjakan nenek moyang. Modernisasi, demokratisasi, dan arus deras perubahan ternyata belum mampu membawa transformasi besar, terutama soal mentalitas dan budaya. Nyaris perubahan itu hanya bergerak pada lintasan instrumental dan formalistik.

Sementara urusan nilai, kultur, dan mentalitas keadaban sebagai karakter bangsa Indonesia justru tidak dikembangkan. Gaya-gaya komunalisme yang masih bebal, penyempitan relasi yang hanya bertumpu 'pemenangan hasrat kelompok' justru mengemuka saat mereka berinteraksi dengan pihak-pihak lain.

Mentalitas komunal yang menyempitkan makna kepentingan, kian meregangkan hubungan kohesi sosial di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang berlangsung akhir-akhir ini misalnya, cenderung memanfaatkan mentalitas komunal itu dengan cara komodifikasi untuk tujuan yang sifatnya pragmatis. Bahkan menghalalkan segala cara. Karena masyarakat masih terkurung dalam kesadaran palsu komunalisme itu, tak pelak lagi jika rekayasa manipulatif sang elit ekonomi dan politik begitu mudah berproses.

Konflik dan kekerasan antara FBR dan masyarakat adalah salah satu akibat komodifikasi dan manipulasi mental komunal yang dipelihara untuk tujuan pragmatis. Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa membalutkan sentimen etnik dan agama merupakan modus paling mudah memobilisasi lingkaran komunalisme.

Jika mau menyelamatkan bangsa ini dari jurang disintegrasi sosial terutama dihadapkan masalah-masalah relasi konflikual, maka tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana melakukan transformasi besar bangsa ini secara kultural dan struktural menuju keadaban. Kita punya modal sosial dan budaya yang cukup besar di aras *society*. Sementara secara struktural, konstitusi UUD '45 dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dapat menjadi pandu arah jalan peradaban.

Transformasi besar bangsa ini perlu memadukan dua aras modal di *society* satu sisi, dan pada aras struktural di sisi lain. Agenda besar itu jika mampu dirumuskan secara utuh berwujud *road map*, maka, secara bertahap dapat dijadikan pandu arah menata bangsa agar tidak terkurung dalam sengketa berlarut-larut. Memang membutuh waktu dan kerja keras. Upaya transformasi besar itu semoga mampu membangkitkan kembali semangat peradaban, agar bangsa ini kian dewasa.

REPUBLIKA, 3 Agustus 2010

6. Identitas dan Problem Struktural



Dalam pekan terakhir ini, ketegangan beruntun terjadi di berbagai tempat, ibarat teror yang terus menyelimuti masyarakat. Sejak peristiwa kekerasan di Banten, Temanggung, Pasuruan, serta rentetan kejadian akibat reaksi-reaksi atas kasus itu memberi sinyal negatif yang segera harus ditangani. Begitupun bermacam manuver dan spekulasi khususnya di Ibukota, Jakarta, terus bermunculan mengitari soal-soal politik yang makin memperuncing pertarungan antar pihak terutama elit kekuasaan.

Gejala sosial semacam ini bisa dibaca sebagai bagian dari dinamika perubahan sosial yang lumrah terjadi. Namun, menjadi aneh sekaligus memprihatinkan jikalau pada masing-masing masalah itu tidak segera terpecahkan, dan nyaris secara sporadis terjadi di berbagai daerah. Tiap peristiwa yang terekspose oleh media massa mengenai peristiwa kekerasan antarkelompok, baik membalutkan isu agama, etnik, aliran politik, atau dengan modus sejenis jelas menggambarkan negeri ini terus terbayangi oleh masalah-masalah identitas yang tidak pernah usai. Bahkan membuat kefrustasian banyak pihak.

Semenjak era reformasi berlangsung, pola pendekatan dalam menanggapi masalah konflik atau kekerasan identitas, senantiasa menggunakan cara-cara dialogis dan upaya hukum. Peran simbolik para tokoh juga menjadi medium yang selalu hadir demi membantu memecah kebuntuan konflik kepentingan terutama pada pihak yang bertikai. Selama itu, langkah reaktif mengoperasikan instrumen aparat keamanan berpayung konstitusi telah menjadi *mainstream* pengupayaan resolusi konflik dan kekerasan. Hanya saja, mengapa mobilisasi sumberdaya simbolik-kultural dan pendekatan hukum tersebut kurang ampuh mengatasi konflik dan kekerasan terutama yang dibungkus melalui isu identitas?

Demokrasi memang tidak mudah dipraktikkan untuk segera memecahkan masalah konflik dan kekerasan identitas itu, jika hanya dipahami secara normatif dan sepotong. Sejak demokrasi diterapkan, terbukalah kran kebebasan bagi siapapun untuk menyampaikan suara, atau mengartikulasi kepentingan, tanpa diskriminasi. Garansi persamaan hak dijamin undang-undang sebagai konsensus politik.

Akan tetapi keyakinan normatif terbukti tidak cukup. Didalamnya juga memerlukan komitmen nilai yang harus diwujudkan secara konsisten meliputi spirit persamaan, egalitarian, dialog, kelola konflik dan *non-violence*, dan menghormati konsensus. Praktik nilai semacam itu masih kurang dalam demokratisasi Indonesia. Maka, wajarlah jika muncul penilaian, kebebasan berlangsung tanpa etika sosial yang memadai.

Sehebat apapun penegakan hukum disertai cara-cara represi dengan ukuran konstitusi, bahkan mobilisasi peran simbolik para tokoh politik, agama dan sosial kemasyarakatan, tapi, kenyataannya praktik sabotase atau pengingkaran nilai demokrasi masih saja berlangsung. Padahal demokrasi ini jelas menumpukan diri pada komitmen dan kejujuran memegang prinsip etika sosial agar kita mendapatkan makna substansi bernegara dan bermasyarakat.

Jika pemaduan antara normatif-prosedural dengan substansi nilai beretika dijalankan, diharapkan menumbuhkan kepercayaan baru perbaikan negeri ini. Hal yang tak kalah penting sebagai tantangan menjawab problem konflik dan kekerasan adalah, bagaimana demokrasi diisi dan diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada satu dasa warsa sejak otoriterisme berakhir, setting pembenahan kebijakan politik belum signifikan memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Masalah kemiskinan, kesenjangan, ketidakberdayaan sosial masih menghantui masyarakat kita, sebagai problem struktural yang belum terpecahkan secara tuntas. Jika beban dan tekanan semacam ini masih saja membesar, besar kemungkinan cepat merembet atau termanifestasikan pada sengketa identitas. Disitulah, poin kunci pembenahan demokrasi demi mengatasi konflik dan kekerasan, jikalau akar struktural juga diatasi yakni tercapainya kesejahteraan.

REPUBLIKA, 22 Februari 2011

7. RUU Intelijen



Terror yang merebak secara sporadis di negeri ini, nampaknya bersamaan momentumnya dengan pembahasan soal RUU Intelijen. Sejumlah analisis menyebutkan bahwa bermacam ketegangan dan tindak kekerasan bertubi-tubi yang menimpa masyarakat sipil dalam bulan-bulan terakhir ini semestinya bisa dicegah, tetapi konon ada intelijen hitam yang memanipulasinya, sehingga terjadi benturan.

Bermunculan spekulasi. Konon kasus kekerasan yang tak terkendali itu, dapat diolah sebagai dalih atau justifikasi agar kewenangan dan peran intelejen diperluas. Kontroversi paling mendasar adalah adanya pengaturan pada RUU Intelijen yang menyebutkan kewenangan bagi intelijen menyadap yang kemungkinan rawan terjadi penyimpangan.

RUU ini juga memberi otoritas intelijen menangkap dan memeriksa siapa saja yang dicurigai membahayakan keamanan negara. Dalam situasi kredibilitas lembaga negara (institusi hukum khususnya) tengah mengalami 'krisis kepercayaan', substansi RUU intelijen seperti ini jelas dipersoalkan. Karena bisa jadi, kewenangan baru itu bisa dipakai dalih hukum bagi pembenaran tindak penculikan warga negara, bahkan besar kemungkinan rawan penyelewengan dan melanggar HAM.

Kewenangan dapat ditafsir sebagai bentuk legalisasi penculikan, mengingat kerja intelijen sifatnya tertutup dan rahasia. Bukan mustahil jika kewenangan menangkap oleh intelijen bisa menggoyah *criminal justice system*. Sebagaimana diketahui, kewenangan melakukan penangkapan ada di tangan lembaga penegak hukum konvensional seperti polisi, jaksa, dan KPK.

Sementara, intelijen negara adalah lembaga *non-judicial* yang tidak termasuk bagian aparat hukum. Dengan begitu, kewenangan baru

tanpa kendali yang jelas berupa penyadapan dan penangkapan dapat berpotensi distortif, yakni tindak sewenang-wenang yang melampaui prinsip dasar HAM dan demokrasi.

Semestinya, makna RUU Intelijen ini adalah penataan posisi dan kewenangan intelijen negara supaya tepat dan proporsional. Tujuannya guna memastikan praktik intelijen tidak berlangsung liar dan bisa dipertanggungjawabkan.

Namun ironisnya, masyarakat umumnya juga tidak tahu kepada siapa harus mengadukan keberatan bila ada kesalahan (baik prosedural maupun etis), lalu masyarakat menjadi korban. Dalam sejumlah kasus, pada akhirnya masyarakat sipil lebih mengalah dan terbungkam tidak berdaya menghadapi represi atas nama intelijen negara.

Dalam konteks itu, perlu mekanisme serta aturan yang jelas didalam mengawasi kewenangan yang melekat. Misalnya saja soal penyadapan, seharusnya secara berkala ada monitoring seluruh kerja penyadapan oleh Intelijen, agar tidak disalahgunakan seenaknya yang mengarah manipulasi. Mempertimbangan kebutuhan pembenahan lembaga intelijen agar kredibel dan solid yang dikaitkan dengan perubahan sosial dan kebutuhan bangsa, paling tidak ada dua tantangan kunci yang harus dijawab dalam RUU Intelijen Negara.

Pertama adanya prinsip pertanggungjawaban melalui koridor hukum dan legitimasi secara politik. Mengisyaratkan bahwa mandat intelijen adalah mandat negara, sehingga melekat didalamnya rasa pengabdian untuk kepentingan negara, dan bukan kehendak sang pemegang kuasa.

Kedua, kemampuan profesionalitas yang terukur, utamanya berdasar norma demokratis dan landasan etika sosial. Atas pertimbangan kepentingan negara, masyarakat sipil, dan keutuhan bangsa, lembaga intelijen tidak boleh beroperasi karena kehendak subjektif sang intelijen yang melampaui kewenangannya.

REPUBLIKA, 5 April 2011

8. Bahasa Kekuasaan



Sebuah bahasa terkandung kepentingan. Demikian kira-kira para cerdik cendikia memberi istilah, bahwa pada tiap kata-kata yang terangkai membentuk kalimat, tentu memiliki maksud tertentu. Setiap hari di televisi, koran-koran, atau radio menyajikan berbagai pidato sang penguasa. Isinya bermacam-macam. Ada yang berupa kebijakan, yang memang benar-benar bijak dan penuh kewibawaan.

Namun banyak pula berisi sekadar pamer, klaim kemawahan diri. Sumpah serapah memuji dirinya bergaya narsistik. Sampai-sampai, dengan sombongnya bertindak kesalahan, tetapi justru membuat dirinya kian populer. Sementara di sisi lain, di media massa juga terekspose ragam bentuk penderitaan dan rintihan si miskin, atau mereka-mereka yang terhina oleh angkuhnya kekuasaan.

Perseberangan keadaan semacam ini sungguh mencengangkan. Tetapi anehnya, bahasa dan situasi senjang itu lama-lama dianggap hal biasa, bukan masalah lagi. Sejak Indonesia mencanangkan demokratisasi, kran kebebasan dan transparansi mampu memompa harapan baru bagi pembenahan nasib bangsa ini. Tetapi sayangnya, keadaan yang lebih baik belum kunjung tiba. Karena struktur politik dan ekonomi masih saja condong dikuasai segelintir orang. Yakni mereka yang berduit dan bermental serakahlah yang merebut dan memanfaatkan situasi.

Sebutlah, episode mengungkap bermacam skandal perbankan, membongkar kasus korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif, sampai dengan menjebol tembok mafia hukum atau peradilan, masih saja tertatih-tatih dan terhambat. Jejak langkah penuntasan kasus demi kasus, agaknya nyaris lenyap oleh tindakan manipulatif. Lagi-lagi, bahasa pemegang kuasa politik dan ekonomi bertubi-tubi diluncurkan.

Pidato demagog para elit menyergap perhatian publik, selanjutnya begitu cepat kepalsuan menggeser kejujuran. Masyarakat sering dibingungkan oleh pemberitaan kasus di media massa begitu cepat berubah. Sejak gempar 'kasus cicak dan buaya', lalu disusul terungkapnya skandal Century, muncul kemudian penyuaipan deputi gubernur Bank Indonesia. Gumpalan masalah itu kian diramaikan oleh pelaporan soal penggelapan pajak, atau 'nyanyian Susno Duadji'.

Namun tiba-tiba terinterupsi peristiwa penembakan terorisme, dan seterusnya. Jika dicermati secara seksama, rentetan langkah menguak kasus itu kadang terjadi tumpang tindih, tidak terkawal sampai tuntas. Bahkan, seolah sengaja dilupakan. Paling mutakhir, saat perhatian publik menunggu kepastian mengungkap skandal Bank Century dan perpajakan, tiba-tiba muncul manuver politik baru berupa pembentukan sekretariat gabungan (setgap) koalisi parpol berkuasa.

Pada tiap munculnya perdebatan, umumnya panggung itu dikuasai elit-elit kuasa politik dan ekonomi. Begitu ringannya mereka berkata-kata, menggunakan bahasa bergaya 'akrobatik' tanpa beban. Sang penguasa begitu gesitnya membelokkan masalah. Modusnya, saling bertukar kasus, atau memunculkan isu baru, agar mengaburkan substansi masalah. Tak ayal, jika bahasa itu dimaksudkan memblokir pembongkaran suatu kasus yang telah tersebar.

Harapan keadilan dengan mudah lenyap. Para penguasa lupa, saat kasus menyeruak di media massa, sesungguhnya masyarakat menyaksikan dan menaruh harapan agar keadilan diwujudkan, demi memperbaiki keadaan. Bahasa kekuasaan pada akhirnya cenderung mendominasi, menindas masyarakat. Ruang bernegosiasi, sebagaimana tersedia di media massa, agar relasi berimbang antara bahasa penguasa dan rakyat, tidak terjadi.

Itulah wujud ekspresi nyata betapa reformasi ini telah dibajak kaum kuasa politik dan ekonomi. Komunikasi politik tersumbat. Wajar saja, jika sumbatan itu kadangkala melahirkan ledakan-ledakan baru, sebagai bentuk kemarahan rakyat mengekspresikan aspirasinya melawan bahasa kekuasaan. Demonstrasi, pemboikotan, bahkan muncul kenekatan berbentuk bentrokan dan kekacauan, menjadi salah satu ekspresi melawan penyumbatan.

Pertanyaannya, mampukah gejala itu ditangkap dan dimaknai untuk mengingatkan sang penguasa? Demokrasi yang benar, sesungguhnya adalah arena negosiasi dan perimbangan bahasa kekuasaan dan bahasa rakyat.

REPUBLIKA, 1 Juni 2010

Bagian VII

Parade Teror



I. Diskusi Tanpa Represi



Peristiwa pembatalan acara diskusi yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu, kemudian disusul terjadinya peristiwa penyerangan dengan kekerasan pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), melahirkan kontroversi dan perdebatan di tingkat nasional juga sorotan internasional.

Kasus ini tentu menjadi masalah serius. Yogyakarta sebagai kota yang telanjur dilekati sebagai komunitas akademik dan kultur toleransi atau kerukunan dalam perbedaan, digemparkan peristiwa kekerasan berlabel politik identitas. Konon, Yogyakarta dianggap sebagai barometer Indonesia terkait ekspresi hubungan kewargaan dan situasi politik, di mana praktik kehidupan warganya dijadikan rujukan bagi daerah lain.

Dikhawatirkan, jika potensi dan aktualisasi perselisihan yang mengalami eskalasi menjadi kasus kekerasan menjadi modus yang menular, berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia. Pokok masalahnya menyangkut beberapa hal.

Pertama, bagaimana memperlakukan perbedaan. Kemajemukan dan kebhinekaan masyarakat Indonesia sesungguhnya telah terbangun dalam rentang sejarah panjang, sejak Indonesia merdeka. Terlebih, saat demokrasi dipakai untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di dalamnya memuat nilai-nilai dasar dan prinsip utama untuk mengembangkan sikap saling menjaga kebersamaan, toleransi, serta kerukunan di tengah perbedaan. Itulah kunci penting keindonesiaan, didasarkan pada Pancasila dan UUD '45. Sikap praksis kultur dan konstitusi kita begitu menghargai perbedaan itu demi persatuan, integrasi dan kohesi sosial.

Kedua, bagaimana menjaga hubungan sosial tanpa kekerasan. Perselisihan, perbedaan, dan pertikaian pemikiran atau sikap atas hal-hal tertentu dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang wajar. Sebagai hal lumrah, maka hal itu diselesaikan melalui cara dialog, bermusyawarah, bermufakat, berdebat, untuk membangun konsensus.

Seandainya tidak mampu diselesaikan, dapat menempuh jalur hukum. Substansi maupun rute penyelesaian selisih pada dasarnya menjadi indikator peradaban masyarakat itu sendiri. Jika perbedaan pemikiran begitu mudah ditarik atau tergelincir pada tindak kekerasan, maka, tidak lebih seperti 'hukum rimba'. Siapa kuat dia yang menang. Di situ terbentuk situasi masyarakat yang rentan, memberikan peluang ketidakadilan berlangsung.

Ketiga, bagaimana membangun komunikasi kewargaan yang kritis dan berdaya. Kasus di kampus UGM, sebenarnya tidak perlu terjadi jika dipahami makna penting kebebasan mimbar akademik. Substansinya pada bagaimana memperlakukan hak berkomunikasi atas pemikiran, teori, dan pengetahuan. Lepas dari soal kita tidak setuju isi gagasan yang dibawa seseorang, tetapi kesempatan berargumen dan berdiskusi tetap harus tersedia di lembaga publik sebagaimana UGM.

Pembiasaan adu argumen dan kontestasi pikiran rasional sangat diperlukan, agar praktik akademik di kampus memberi contoh berharga untuk masyarakat agar mengedepankan sikap ilmiah dan egaliter dibandingkan tindakan represi dan dominasi sepihak. Itulah kultur komunikasi kritis, memberi kesempatan yang adil bagi semua orang dalam menyampaikan pemikiran sebagai penanda masyarakat madani (*civil society*).

REPUBLIKA, 15 Mei 2012

2. Bom Bunuh Diri



Peristiwa berdarah Jumat 15 April 2011 begitu mengagetkan banyak pihak. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Ad Dzikra, Polresta Cirebon, mengguncang jamaah saat menunaikan shalat. Satu orang tewas, dan puluhan luka-luka sebagai korban bom *low explosive* itu. Kejadian tersebut menambah ketegangan sosial, di mana pada bulan sebelumnya rangkaian ancaman teror bom buku yang berlangsung di berbagai tempat, menjadi perhatian banyak khalayak.

Sasaran bom yang diarahkan ke pihak aparat keamanan, tepatnya di markas Polresta, tentu memiliki tujuan spesifik. Selama ini, polisi adalah bagian kekuatan utama menangani kasus teror bom, yang diperankan Densus 88. Upaya aktif mereka memburu pelaku teror di berbagai tempat telah membuahkan hasil, meskipun tindakan itu tidak luput dari serangan balik. Berbagai kejadian penyerangan pada kantor, dan pos polisi di berbagai tempat menjadi deretan kasus reaksi balik yang menimpa aparat keamanan ini.

Di satu sisi, bom di kantor polisi wujud dendam atas tindakan represi yang dialami kelompok tertentu yang diidentikkan sebagai teroris. Pada sisi lain, kejadian ini barangkali karena aparat kepolisian lalai dengan pola deteksi. Di kantor yang dianggap 'aman' malahan menjadi sasaran empuk teror. Ketidakterdugaan adalah kekeledoran, yang semestinya sadar betul bahwa aparat keamanan aktor terdepan penanganan teror bom dimungkinkan menjadi sasaran utama serangan balik teror.

Kenekadan sang pelaku menjadi petunjuk, betapa upaya perburuan melalui cara-cara kekerasan maupun hukum oleh kepolisian dan lembaga peradilan, ternyata tidak segera melumpuhkan kekuatan teroris. Sebagai sebuah jaringan, sel teror bekerja aktif pada saat intensitas tekanan terus dilangsungkan.

Negeri ini memang terus menghadapi situasi 'saling teror'. Tindakan anarkhia begitu menjadi-jadi dengan segala akibat banyaknya korban, pelaku cenderung merusak. Tidak saja melalui bom, namun disertai pola penyerangan bersenjata api, benda tajam, ataupun intimidasi bengis antar kelompok pada area sengketa.

Teror bisa dilakukan oleh siapapun, baik oleh warga sipil maupun oleh aparat bersenjata. Gejala perselisihan yang melibatkan paham atau keyakinan agama, sentimen etnik, kepentingan afiliasi politik, sengketa bisnis, maupun modus lainnya dapat menjadi teror sengit. Sayangnya, terapi resolusi teror cenderung ditangani melalui teror balik. Ibarat lingkaran kekerasan, kasus demi kasus saling berangkai, berproses tak berkesudahan.

Tindakan kekerasan meredam kekerasan, justru melahirkan kekerasan baru yang lebih berani. Pola teror pun kian canggih karena topangan peralatan teknologi dan fasilitas jaringan, yang akhirnya mempersulit penanganannya. Semestinya, memutus mata rantai teror tidak melulu bertumpu meredam akibat yang ditimbulkan, tetapi seharusnya melacak pula akar penyebabnya. Begitupun memahami isu, perlu analisis rangkaian isu lain secara proporsional dan komprehensif.

Sejauh ini, mobilisasi sumberdaya keamanan yang berorientasi kuratif (mengggunakan nalar efek jera) umumnya masih terpisah dengan pendekatan preventif (pencarian akar), bahkan kadang berbenturan. Diagnosa atas teror yang mendasarkan isu tertentu kadang menegasi isu lain, padahal kemungkinan berkaitan. Teror terbungkus isu agama atau sentimen etnik misalnya, tidak jarang justru berkait simpul dengan urusan kecemburuan sosial, maupun relasi yang sifatnya struktural.

REPUBLIKA, 19 April 2011

3. Cuci Otak Anak Muda



Masyarakat kini diresahkan adanya gejala dan isu radikalisasi agama dalam arus perubahan sosial, yang konon melibatkan anak-anak muda, para mahasiswa. Ada indikasi keterkaitan antara rangkaian peristiwa teror bom dalam bulan terakhir ini, dengan terlibatnya anak-anak muda kampus. Sejumlah sinyalemen menunjukkan, bahwa para mahasiswa direkrut menggunakan cara-cara cuci otak (*brain washing*).

Mereka didoktrin melalui masukan paham atau aliran berkategori haluan keras dalam menafsir agama. Kecenderungan pikiran ekstrim secara hegemonik telah memasuki keyakinan mereka. Para orang tua kian resah karena gelagat sikap anak-anaknya mulai 'bergeser', yang cenderung tertutup, bahkan mengunci atau membatasi diri berinteraksi. Para kaum muda ini disasar karena mereka dianggap tengah mengalami proses dan fase pencarian pikiran atau aliran baru, dengan kecenderungan ditanamkan sikap militansi.

Ketika rasionalitas, dan kesadaran kritis tidak bekerja di benak anak muda, maka doktrin yang menegasi realitas begitu mudah ditanamkan. Indoktrinasi sektarian begitu mudah merasuk, manakala kaum muda mengalami ketercerabutan atau kehilangan komunitas sosial kritis yang selama ini tempat proses belajar mereka. Hal ini juga persis dialami para mahasiswa pada 'lingkaran hedonis', suka huru-hura dan condong keluar dari habitat sebagai pembelajar produktif.

Kesuntukan beban mahasiswa, baik itu karena urusan kuliah yang kian berat, tekanan struktural berlapis akibat kekecewaan melihat perubahan lingkungan sosial ekonomi, ditambah pudarnya solidaritas sosial karena pola pergaulan eksklusif, membuat mahasiswa mengalami disorientasi. Golongan mahasiswa 'suntuk' akibat perubahan

sosial, perlu dialirkan oleh bekerjanya sistem pendidikan dan budaya di masyarakat yang mewadai pengembangan kesadaran kritis, agar mereka berkespresi sesuai minat, mendidik dan cerdas.

Mengatasi maraknya indoktrinasi pada mahasiswa tidak cukup sekadar mengejar atau menangkap para pencuci otak, atas nama hukum/perundangan. Dalam jangka pendek, daya tekanan (*stress*) yang dialami kaum muda sebagai 'korban' keyakinan paham keras atas agama perlu diurai dan dipulihkan secara psikologis. Sementara dalam jangka panjang, perlu menumbuhkan dan membangun ruang-ruang pembelajaran kritis dan rasional di kampus dan masyarakat, menyemai spirit solidaritas berkomunitas.

Apapun bentuknya, sejauh bermakna positif, perlu dilakukan. Bagaimana memfasilitasi penyediaan arena pengembangan pemikiran dan ekspresi kreatif, sehingga imajinasi kaum muda bermakna sebagai modal dan proses belajar dirinya agar kian matang dan humanis. Pemaduan kerja dan program yang menautkan antara lembaga pendidikan, masyarakat dan kebijakan negara harus saling menopang, baik dari sisi substansi maupun metode belajarnya. Agar berkurang kecenderungan jebakan jalan sempit saat dimana kaum muda tengah mencari jati dirinya.

Dengan demikian, antitesis atas indoktrinasi eksklusif yang kini menggoncang kaum muda mahasiswa justru terletak dan berasal dari kaum muda itu sendiri, bukan pada polisi atau pemburu teroris. Inilah tantangan yang perlu dijawab buat negeri ini, tidak melulu mengurai masalah secara reaksioner dengan segala ragam ketakutan yang menyelimuti.

REPUBLIKA, 26 April 2011

4. Negara dan Teror



Ketegangan bertajuk terorisme, tiba-tiba kini menyelimuti suasana masyarakat. Semenjak rentetan peristiwa perampokan Bank Cimb Niaga di Medan, lalu terjadi penangkapan pelaku peristiwa itu yang oleh kepolisian dikaitkan jaringan terorisme. Sejalur rentetan itu, tiba-tiba terjadi serangan pada kantor polsek di Deli Serdang yang menewaskan 3 polisi.

Kini, polisi juga tengah melacak kaitan perampokan ATM di Padang. Mabes Polri memberi sinyal 'darurat' melalui siaran persnya, dimana lembaga kepolisian mendapat ancaman bertubi-tubi. Bahkan SBY juga menyatakan, negara tidak boleh kalah dengan teroris. Konon, menurut informasi resmi dari polisi, para teroris itu akan melakukan perang kota. Hal ini jelas memicu meluapnya ketegangan soal teror ini ditengah-tengah masyarakat.

Tindakan teror, sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Baik bersifat individu, maupun kelompok, bahkan oleh institusi resmi. Sejarah rezim otoriter Orde Baru berkuasa, selalu menciptakan teror kepada masyarakat, sebagai proses dominasi. Dalih pembangunan dan ketaatan pada negara selalu jadi titik tolak lahirnya tudingan pada masyarakat dengan stigma subversif, anti kemapanan.

Di zaman reformasi, teror secara langsung oleh negara agak menurun, meskipun masih disaksikan aparat pemerintah yang begitu sarkastik memproduksi kekerasan pada kelompok marginal, seperti pada petani, buruh, maupun kaum miskin kota. Negara di tingkat lokal menerapkan model 'premanisme' dalam mengimplementasikan kebijakan saat terjadi resistensi sosial. Bahkan, ada pula teror di level global yang dimotori oleh rezim kapitalisme dan kekuatan pasar.

Trend saat ini di Indonesia secara spesifik adalah, pengambilalihan peran teror oleh kelompok milisi sipil baik berkedok etnik, agama,

atau haluan politik. Mereka menggunakan klaim-klaim subjektif lalu melayangkan teror pada sasaran. Pola teror beragam bentuk. Dari soal ancaman bergaya 'legal-formal' (begitu mudahnya sengketa diseret ke wilayah hukum tanpa dimusyawarahkan secara dialogis), sampai cara-cara picik yakni mobilisasi instrumen kekerasan untuk mencapai tujuan pragmatis.

Tindakan teror ini, sesungguhnya bukan semata mematikan daya kreasi dan kebebasan masyarakat. Bahkan teror bisa menghancurkan peradaban. Dilema yang dihadapi oleh negara cukup rumit. Sebagaimana digariskan konstitusi, negara dituntut bertanggung jawab melindungi warganya dari kejahatan dan kekerasan sebagaimana tindakan teror.

Namun, tidak mudah cara-cara *counter teror* diterapkan negara dalam kadar kebijakan yang dituntut demokratis seperti saat ini. Selain urusan prosedur dan akuntabilitas, tindakan negara berdasar koridor hukum, norma HAM selalu memberi sinyal, agar hati-hati dan tidak sekadar membabi buta.

Disinilah pertaruhanannya, negara harus lebih cerdas bersikap dan responsif. Merebaknya teror tidak mungkin bisa dibungkam dan dibendung hanya bermodel 'pemadam kebakaran'. Reaksi cepat hanya terjadi jika ada kasus. Kita sadari sepenuhnya, bahwa tindakan sesegera mungkin menghentikan masalah teror sangat diperlukan, paling tidak jangka pendek. Agar masyarakat mendapat kepastian bisa hidup aman dan nyaman. Tugas polisi, bahkan jika mungkin dibantu TNI.

Namun, ada baiknya selalu mengingatkan agar pendekatan preventif dan kombinitif ditempuh. Preventif dalam arti pencegahan akar kemunculan terorisme, tentu untuk keperluan jangka panjang; mulai dari kebijakan struktural sampai soal pola kultural. Kombinitif, dikonstruksi sebagai perlunya negara mengajak masyarakat dan berbagai pihak berpadu menjadi kekuatan bersama mengatasi ragam teror.

Dengan begitu, negara tak perlu menantang para teroris secara terbuka, tetapi yang lebih penting harus mampu meyakinkan masyarakat dengan skema dan tindakan nyata agar rentetan peristiwa tidak menciptakan goncangan berlarut-larut. Itulah salah satu ukuran eksistensi dan tanggung jawab negara pada warganya.

REPUBLIKA, 28 September 2010

5. Teror Politik



Kegundahan atas praktik intimidasi, teror, dan ragam kekerasan banyak kita dengar dan rasakan di zaman Orde Baru. Masa dimana politik berwatak otoriter dan berwajah bengis. Tetapi, jikalau dalam suasana demokrasi atau aroma reformasi menghiasi sudut perubahan di negeri ini, munculnya peristiwa teror terkait urusan politik, atau reaksi atas sikap kritis pada sang kuasa, tentu sungguh ironis dan memprihatinkan.

Kejadian mutakhir berupa pengeroyokan yang menimpa salah seorang aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun, dan penyerangan berupa pelemparan bom molotov pada kantor Majalah Tempo, tentu layak dipersoalkan. Asal muasalnya, terkait sikap kritis ICW yang sering mengungkap kasus korupsi di pusat-pusat kekuasaan, yang selama ini jauh dari sentuhan hukum.

Demikian pula, majalah tempo yang membeberkan rangkaian korupsi di Institusi Kepolisian. Kedua peristiwa inipun berjalan beriringan. Jika didiagnosis masalah ini, penyerangan ini dimaksudkan sebagai ancaman agar para aktivis pro demokrasi yang berdiri di garis depan bersuara untuk penegakan hukum itu berhenti dan tidak melanjutkan perjuangannya.

Meskipun tidak bisa disimpulkan secara sepihak bahwa pelaku itu terkait langsung dengan urusan yang diangkat ke permukaan, namun, hal ini tentu bagian dari rentetan upaya sistematis memblokir laju gerakan anti korupsi. Polisi, melalui Kapolri, mengatakan peristiwa itu bukan dilakukan oleh anak buahnya. Demikian pula SBY juga mengutuk peristiwa itu, dan menyerukan aparatnya agar mengusut tuntas masalah tersebut. Sejumlah pihak di masyarakat juga mengancam keras tindakan biadab itu. Kasus semacam ini jelas tidak bisa dianggap sepele.

Di negeri ini, perjuangan untuk menuju kebaikan, apapun bentuknya, bisa direaksi dengan gumpalan kekerasan. Ada ancaman fisik, tetapi juga sampai nyawa dipertaruhkan. Hukum sebagai perangkat normatif, semestinya dapat dijadikan sebagai landasan utama mengatasi tiap sengketa kepentingan antar pihak, apapun modus dan motifnya. Anehnya, gembar-gembor penegakan hukum dan segala pembentukan dan bekerjanya lembaga ekstra-state (Komnas HAM, komisi-komisi perlidungan masyarakat lainnya) tetapi peristiwa teror masih saja menghantui para mereka yang bersuara kritis.

Seolah hukum ini dibuat hanya sebatas 'etalase' struktur politik berlabel demokrasi. Karena kenyataannya, begitu banyak pola dan modus mensiasati agar bisa melanggar hukum, bahkan merekayasa aturan begitu mudahnya. Konon, kita ini hidup bukan di negara hukum, tetapi negara peraturan. Semakin banyak aturan bukan lahir ketertiban dan keadilan, tetapi justru pelanggaran makin menumpuk.

Apalagi, hukum juga masih dipermainkan para mafia berduit melalui cara jual beli kasus (tindakan markus), peradilan juga sering disuap. Semestinya, sudah menjadi tugas negara untuk melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk ancaman, sebagaimana dimandatkan konstitusi UUD'45.

Diucapkan secara khitmat, dan selalu diulang-ulang di tiap sumpah jabatan oleh penguasa di semua level, serta menjadi pegangan warga negara Indonesia. Tetapi mengapa teror terus saja terjadi? Kita perlu mengingatkan dan memetik pelajaran berharga dari kasus teror politik ini. Sudah seharusnya publik bersikap kritis, menuntut hak perlindungan dari negara secara konsisten.

Jangan sampai menganggapnya sebagai masalah remeh, apalagi dirasa sudah biasa. Jikalau rangkaian kasus semacam ini dianggap urusan kecil dan tidak ditangani secara tuntas dengan prinsip keadilan, jelas menjadi pretensi buruk untuk saat ini dan dimasa mendatang. Pembiaran atas tindakan kekerasan politik dan hukum, berarti pertanda penghancuran demokrasi, sekaligus wujud gagalnya negara menjamin hak-hak warganya untuk hidup aman dan nyaman di negeri ini.

REPUBLIKA, 13 Juli 2010

6. Premanisme



Sejumlah kasus kekerasan, perampokan dan kriminalitas sejenis, intimidasi dan penganiayaan, pembunuhan karena persoalan sengketa hutang piutang, atau bentrokan antarkelompok terkait masalah penguasaan lahan kota, peredaran obat-obat terlarang, serta perselisihan di tempat-tempat hiburan atau diskotik adalah peristiwa buruk yang memberikan sinyal betapa masalah premanisme telah menjadi bagian persoalan sosial ekonomi yang kompleks.

Bahkan Presiden SBY dalam suatu kesempatan menyerukan, dengan nada keras, agar negara beserta aparatnya segera bertindak tegas memberantas segala bentuk premanisme yang sudah meresahkan masyarakat. Kasus premanisme sangat terasa khususnya di kota-kota besar, umumnya menggerogoti sistem sosial dan kegiatan ekonomi, merusak tatanan. Premanisme begitu nampak dalam aktivitas sehari-hari, dengan berbagai tingkatan. Mulai dari premanisme berukuran kecil, sampai dengan model kejahatan berstruktur jaringan mafia yang besar, melibatkan aktor yang banyak dan kelas kakap.

Bahkan premanisme juga menular dalam kegiatan politik, di lembaga-lembaga birokrasi dan parlemen, serta parpol. Untuk urusan perebutan tender proyek di berbagai instansi, banyak juga pola premanisme berlangsung. Demikian pula saat Pemilu, ada bentuk-bentuk intimidasi dan keculasan yang terjadi untuk tujuan pragmatisme meraih kemenangan dengan berbagai cara.

Dari pola-polanya, premanisme terjadi karena paling tidak dua sisi penting. Pertama, memanfaatkan kelemahan penegakan hukum atau peraturan. Kedua, memanipulasi ketidakberdayaan dan kerentanan masyarakat. Pemanfaatan keroposnya hukum ditandai cara menyuap,

memotong prosedur, dan melakukan penipuan secara sistematis. Seringkali dibumbui kekerasan dan intimidatif pada korban. Hukum disepelekan, diabaikannya etika sosial. Ironisnya, sejumlah tindakan membongkar premanisme pada peristiwa tertentu kadang terkait dengan aparat penegak hukum, sekalipun hanya terbatas 'oknum'. Bahkan terkesan ada pembiaran karena pertukaran kepentingan satu sama lainnya.

Sisi pemanfaatan kerentanan masyarakat, premanisme begitu eksis pada sistem sosial yang tidak memiliki kemampuan kuat menjaga integritasnya, di mana antarkelompok cenderung terkoyak dan *fragmented*, tidak membangun mekanisme penyelesaian secara beradab. Keroposnya struktur sosial akhirnya dimanfaatkan premanisme untuk mengais keuntungan pragmatis.

Tidak heran jika premanisme menjadi profesi mengitari kegiatan ekonomi. Dalam sejumlah kasus dimanfaatkan oleh lembaga ekonomi. Kasus penyewaan jasa *debt collector* oleh perbankan, lembaga kredit atau perusahaan untuk menagih hutang seseorang dengan cara kekerasan tentu menggambarkan perilaku destruktif premanisme tersebut.

Pemberantasan premanisme tidak mungkin efektif jika sekadar menggunakan perspektif mengatasi akibat, ibarat 'pemadam kebakaran'. Sebagai pola berwatak destruktif, premanisme perlu dilacak akar dan modusnya. Jika fenomena premanisme dilihat sebagai problem hukum, maka benahi sistem penegakan hukum agar efektif menjamin keadilan dan ketertiban, tidak membuka celah manipulasi dan tumbuhnya premanisme.

Sementara, problem masyarakat harus diatasi melalui upaya perbaikan kebijakan pembangunan jangan sampai membiarkan kesenjangan sosial. Perlu memperkuat integrasi dan rasa solidaritas kewargaan dengan semangat kesadaran anti kekerasan sebagai pilar kokoh menghalau watak destruktif premanisme.

REPUBLIKA, 28 Februari 2012

7. Geng Motor Brutal



ksi kekerasan yang melibatkan kelompok geng motor, memang bukan kisah baru. Pada beberapa kota besar, ulah komunalitas dengan mereproduksi sentimen grup ini telah meresahkan masyarakat. Maraknya peristiwa penyerangan, pengeroyokan, persaingan, bahkan perampokan yang melibatkan geng motor di Jakarta dan kota besar lain pada beberapa pekan ini menjadi indikasi nyata praktik brutal.

Akibat kenekatan ulah geng motor, sebagaimana dicatat Indonesia Police Watch, telah menelan korban 60 orang tewas setiap tahunnya di Jakarta. Tentu belum menyangkut kerusakan barang, fasilitas umum, maupun trauma masyarakat atas rangkaian ketegangan yang dilakukan geng motor ini di jalanan. Pembengkakan perilaku kekerasan oleh orang-orang yang membentuk identitas diri berupa ‘geng’ merupakan pendangkalan ekspresi solidaritas kelompok.

Tujuan awal diciptanya komunitas pergaulan, pertemanan, atau kebersamaan dilabeli ‘geng’ cenderung dikonstruksi untuk mempertebal sentimen antaranggota. Upaya menjaga rekatan kelompok itu dibuatlah seragam, simbol, jargon, ‘tradisi’, atau *style* khusus yang kadang justru terperangkap ke dalam pola berlebihan, yakni mengembangkan sikap-sikap negatif.

Pada sejumlah kasus, rekrutmen geng motor sering menggunakan cara-cara kekerasan yang dilatari alasan kerdil, bahwa masuk identitas grup harus menyesuaikan aturan main kelompok, sekalipun condong negatif dan destruktif. Makin dominan orientasi mempertebal sentimen kelompok, maka kemungkinannya geng kian eksklusif. Mereka melihat dirinya ‘harus berbeda’, bahkan berkeinginan menjadi ‘superordinat’ dibanding kelompok lain.

Solidaritas sosial kelompok dimanipulasi menjadi sikap dan perilaku negatif, karena abai atas nilai-nilai sosial kreatif yang menjadi pilar bagi orientasi positif bagaimana kelompok berproses. Pola dan sikap geng semacam ini makin subur manakala di tengah-tengah masyarakat sendiri berkembang reproduksi persaingan tidak sehat antarkelompok. Bahkan ada kecenderungan pembiaran sikap pragmatis, yakni membenarkan segala cara tindakan untuk mencapai tujuan.

Akhirnya, aktivitas geng makin liar tak beraturan padahal jelas meresahkan masyarakat dan melanggar hukum. Konon aparat keamanan dinilai kurang tegas menindak kasus-kasus yang dilakukan oleh geng motor ini yang telah mengganggu ketertiban umum, kriminal, dan meretakkan kohesi sosial.

Pada akhirnya kita perlu sadari, bahwa perilaku brutal geng motor ini hendaknya diperangi dengan model preventif yakni mengampanyekan kultur solidaritas positif untuk kemanusiaan dan kebersamaan di masyarakat. Konstruksi serta arahkan geng pada spirit yang positif. Ciptakan ragam 'arena ekspresi' yang memungkinkan para anggota geng berkreasi di berbagai bentuk yang bertujuan bermanfaat kebaikan, berupa sentuhan seni, olah raga, hobi, bahkan pengembangan pengetahuan dan rangkaian bakat apapun. Sementara secara kuratif perlu mendorong penegakan hukum lebih efektif dan tegas demi meminimalisasi perilaku destruktif geng motor. Inilah tantangan yang harus dijawab.

REPUBLIKA, 17 April 2012

8. Anarkisme Hukum Rimba



Menarik mencermati pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), bahwa munculnya sejumlah peristiwa kekerasan, baik itu dilakukan secara individual maupun kelompok, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadi indikasi praktik hukum rimba. Menurutnya, akhir-akhir ini anarkisme banyak ditemui.

Jika ada kelompok tidak puas atas sesuatu hal, maka tidak segan melakukan kekerasan kepada kelompok lainnya, bahkan ditujukan kepada pemerintah. Ekspresi itu diwujudkan dengan membakar, menyerang, dan menghancurkan apapun tanpa disertai aturan. Rentetan kasus penyerangan oleh simpatisan Parpol saat Pemilu(kada), perusakan oleh milisi sipil pada kelompok tertentu, sengketa berbasis etnis maupun balutan agama, perkelahian antar kampung, penyerangan antargenak motor, serta kisah-kisah pilu tindakan aparat yang brutal pada warga adalah deretan masalah sebagai sinyal merah, bahwa tindakan sewenang-wenang makin ganas dan membahayakan keamanan warga negara.

Perilaku kekerasan dengan cara memanipulasi aturan karena didorong watak otoriter di zaman Orde Baru lebih sering dilakukan oleh aparat negara (polisi, tentara, dan birokrat) pada warga negara dengan dalih apapun. Sementara era reformasi ini, watak anarkis negara malah menular kepada sejumlah kelompok masyarakat. Kecenderungannya, siapa merasa kuat menindas pada yang dinilai lemah.

Pola brutal itu ujung-ujungnya menimbulkan kerugian material, tekanan psikologi sosial, bahkan sampai merenggut nyawa. Fenomena ini sungguh ironis, saat di mana di berbagai forum selalu digembargemborkan penegakan aturan hukum, sikap toleran dan musyawarah, seruan dialog damai ternyata yang berkembang justru anarki.

Di sinilah perlu meyakinkan dua hal penting. Pertama, bagaimanapun juga tugas negara sebagaimana amanat konstitusi UUD '45 adalah melindungi segenap warga negara dari segala macam ancaman. Apapun bentuknya dan dari manapun sumbernya, maka negara harus bertanggung jawab.

Fungsi negara terepresentasi dari sikap aparat penegak hukum yang konsisten memegang aturan main, menjalankannya berpegang prinsip dan demi keadilan. Aparat hukum tidak boleh ragu menegakkan disiplin untuk menemukan kebenaran dan keadilan, dalam situasi apapun, untuk memastikan jaminan perlindungan warga negara.

Kejujuran dan integritas aparat hukum menjadi pertarungan utama. Jika aparat hukum koruptif, berlaku brutal dalam menjalankan kewenangan, bahkan tidak bisa dipercaya maka semua itu berdampak dan memancing perluasan tindakan kekerasan oleh masyarakat, sebagaimana terindikasi hukum rimba.

Kedua, sebagai warga negara hendaknya bersikap dan berperilaku beradab (*civilized*) sebagaimana konstruksi masyarakat madani. Hal itu ditandai menyelesaikan masalah menggunakan nalar rasional, berlandaskan nilai kemanusiaan, tata-krama bertumpu pada etika sosial. Demokratisasi Indonesia semestinya dimanfaatkan sekaligus dipilari oleh karakter orang-orang beradab, yang mengedepankan diplomasi dan negosiasi, persuasi, dialog, dan toleransi atas perbedaan, serta menjunjung tinggi semangat solidaritas sosial.

Menjauhi pola anarkis dan destruktif yang menggerus nilai kemanusiaan. Itulah tantangan kita, bagaimana menjawab demokrasi dan kultur keindonesiaan mampu bertransformasi ke arah keadaban, agar perubahan benar-benar bermakna untuk kebaikan.

REPUBLIKA, 7 Agustus 2012

Bagian VIII

Mempertanyakan Peran Intelektual



I. Tanggung Jawab Intelektual



Sejarah perubahan sosial di Indonesia sebagian besar melibatkan peran kaum intelektual. Mereka ini adalah para mahasiswa, akademisi, aktivis lembaga swadaya masyarakat, para jurnalis, maupun golongan profesional yang memiliki perhatian atas dinamika yang berkembang di masyarakat.

Kaum intelektual tidak dikonstruksikan sebagai golongan menengah dan elit yang berkuat dalam lingkup terbatas atau eksklusif. Akan tetapi, intelektual dimaknai sebagai peran sosial yang bertumpu pada nilai-nilai integritas, idealisme dan moralitas untuk membangun gagasan alternatif.

Cara pandang ini menunjukkan, bahwa intelektual bukan hanya bersarang di kampus-kampus, atau berkuat buku, atau teori-teori 'padat' yang tidak bisa diurai dalam arena sosial praksis. Sebaliknya, intelektual merupakan bagian utama motor penggerak perubahan sosial secara praksis.

Peran tersebut ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari karya akademik, inovasi teknologi *high level* sampai tepat guna, pengorganisasian masyarakat, serta kreasi aktif untuk menghidupkan denyut partisipasi yang terekspresikan pada kegiatan-kegiatan ekonomi, budaya, gerakan politik, maupun dinamika sosial. Dalam perkembangannya, tidak semua golongan intelektual sebagaimana dimaksud itu mampu menunjukkan perannya secara baik. Bahkan, tidak sedikit intelektual cenderung berkuat pada nalar-nalar eksklusif, jauh dari jangkauan masyarakat luas apalagi *grass roots*.

Intelektual kadang terjebak pada pragmatisme seiring makin me-nebalnya pola hedonis yang didorong oleh hasrat kuasa ekonomi dan

politik. Banyak kasus dapat dijadikan indikasi, sejumlah intelektual hanya dijadikan sebagai agen dan grup pembenar dalam operasi kekuasaan dan pencarian keuntungan proyek. Meminjam istilah Heru Nugroho, intelektual semacam ini sering ‘mengasong’ dalam sirkuit kekuasaan di berbagai sektor, dengan risiko terjadi abrasi nilai dan integritas moral dalam misi pencerahan.

Makin massifnya pola itu, akhirnya ekspresi itu menggambarkan apa yang disebut oleh Ignas Kleden sebagai ‘intelektualisme bazaar’ yang mencerminkan keasyikan para intelektual bergerak ke sana kemari dalam berdagang pengetahuan dengan logikanya masing-masing. Jika kembali memahami konsep dan konstruksi intelektual di tengah tantangan perubahan sosial di Indonesia, sudah selayaknya kita perlu mengingatkan ulang tanggung jawab mulia intelektual.

Problem kesenjangan sosial, kemiskinan dan keterbelakangan, serta sengkarutnya tata kelola kuasa ekonomi dan politik, sudah selayaknya menjadi pertimbangan penting bagi pembuktian tanggung jawab intelektual untuk terlibat aktif membenahi. Problem struktural secara kasat mata tersaji dalam konteks keindonesiaan, merujuk gagasan Gramsci tentang intelektual organik, diharapkan tergerak untuk menjalani fungsi pembebasan dari segala ketidakadilan yang dialami masyarakat. Komitmen dan ketegasan sikap kaum intelektual, yang mampu melebur dirinya dari konstruksi elitis dan eksklusif ke dalam populisme inklusif, sangat relevan dan dibutuhkan untuk memecah kebuntuan jalan perubahan ke arah perbaikan.

REPUBLIKA, 24 April 2012

2. Hardiknas



Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia merayakan hari pendidikan Nasional (Hardiknas). Kali ini alangkah baiknya momentum penting Hardiknas diisi dengan merefleksikan, bagaimana situasi pendidikan sejauh ini. Apakah dunia pendidikan telah memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kesadaran kritis warga negara dengan kecukupan kebijakan yang telah dilakukan oleh negara? Apakah kebijakan dan praktik pendidikan juga telah memperkuat karakter bangsa dalam arus perubahan di level lokal, nasional, dan global?

Pertanyaan ini penting disajikan, di tengah kegalauan situasi bangsa yang telah 66 tahun merdeka nampaknya tujuan mencerdaskan bangsa belum tercapai sepenuhnya. Pendidikan merupakan sektor strategis yang memengaruhi kehidupan suatu bangsa. Melalui pendidikan kualitas sumber daya ditentukan, menjadi patokan untuk keperluan mobilitas sosial. Karena itu, pendidikan dianggap kebutuhan dasar selain sektor kesehatan dan ekonomi.

Perubahan sosial telah berlangsung demikian pesat, tak terkecuali menimpa pendidikan. Sektor pendidikan mengalami liberalisasi begitu radikal, persis dialami pada arus tata politik pemerintahan. Kini, perguruan tinggi negeri maupun swasta, makin diorientasikan serta dikelola ibarat industri. Paket pendidikan lebih mengarah pada *output* mencetak tenaga terampil, yang ahli mengelola, dan memanfaatkan pengetahuan untuk keuntungan ekonomi. Pendidikan didesain untuk memenuhi selera pasar.

Konsekuensinya, mulai dari isi kurikulum, metode pengajaran, kebutuhan fasilitas, sampai manajemen pendidikan ditetapkan secara terukur. Konsekuensi sekolah sebagai industri, kebutuhan biaya pen-

didikan makin mahal. Di situlah komersialisasi makin menjadi-jadi, dengan target mengkomodifikasikan pengetahuan untuk meraih keuntungan. Di sanalah terjadi kontradiksi, dan kondisi ironis.

Di satu sisi, pendidikan dinilai sebagai hak dasar warga negara yang harus dipenguhi negara, tetapi di sisi lain kapasitas ekonomi masyarakat berbeda. Kondisi struktur masyarakat kita masih senjang. Tidak heran jika terjadi penumpukan sumberdaya pada kelompok tertentu (elit dan menengah) sementara begitu banyak kaum miskin yang tidak memiliki kemampuan sumber daya ekonomi sehingga mereka termarginalisasi.

Golongan miskin tidak mampu menjangkau pendidikan tinggi, karena biaya terlalu mahal sebagaimana dipatok. Pendidikan tinggi negeri misalnya, sejauh ini makin mahal karena kebutuhan biaya bagi penyelenggaraan dengan 'paket modern dan mewah'.

Sebagaimana kita ketahui, penerapan skema ekonomi neo-liberal berprinsip peran negara condong diminimalisasi, dengan arah pengurangan subsidi kepada masyarakat, termasuk pada sektor pendidikan. Bagaimanapun, jika pola-pola 'privatisasi' diterapkan pada sektor dasar, seperti pendidikan, maka pendidikan menjadi representasi ketidakadilan. Mandat konstitusi UUD 1945 sudah jelas, yang menggariskan hak warga negara mengenyam pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Hal itu berarti, negara harus berperan besar melindungi warganya agar mendapatkan kelayakan akses pendidikan dengan prinsip keadilan. Karena itu, seyogyanya Hardiknas dapat dijadikan titik tolak mengevaluasi kebijakan pendidikan sebagaimana tujuan bernegara dan berbangsa. Itulah bagian bukti otentik tanggung jawab negara pada rakyatnya.

REPUBLIKA, 3 Mei 2011

3. Pergunjungan



Orang bebas bicara, kehendak apapun bisa diekspresikan. Demokrasi memang menjamin tiap individu atau kelompok menyampaikan pikiran, aspirasi, dan kemauannya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Yang perlu dicatat juga, dalam demokrasi tiap kita mengekspresikan kebebasan itu perlu mempertimbangkan etika untuk saling menghargai. Tujuannya agar kebebasan itu benar-benar bermakna sebagai bagian proses membangun peradaban.

Kita sering menyaksikan tayangan di media elektronik dan cetak. Banyak perayaan kebebasan, berbentuk *talk show*, panelis diskusi, atau beragam pemberitaan peristiwa dan kasus, di situ berlangsung luapan silang pendapat yang terfasilitasi dalam beragam sajian acara. Anehnya, kecenderungan sajian acara dan segala kontroversi yang melekat di dalamnya secara umum menampilkan ‘pergunjungan’ antar pihak, yang saling menegasi. Baik berupa umpatan kemarahan, melodramatik dan pencitraan, saling ejek dan ledekan, serta cara-cara sepola sebagai tuangan ekspresi diri.

Ada kecenderungan, kita tidak mendapatkan sajian acara yang ‘waras dan cerdas’, sebagai bagian dari cara berkomunikasi masyarakat yang bermartabat. Bahkan, mereka para aktor pengisi acara dan peristiwa itu condong mengonstruksikan seolah acara itu ‘miliknya sendiri’, tanpa pertimbangan etik dan tata krama di hadapan publik menebar dan memamerkan hasrat dan ekspresinya.

Siapa mereka? Rata-rata adalah golongan elit dan menengah yang secara formal terdidik, atau menyebutnya sebagai kaum profesional. Klaimnya sebagai golongan terpelajar ternyata tidak berkorelasi positif dengan karakter dan watak yang semestinya menjadi sang pencerah di

lembaga-lembaga media publik. Padahal acara dan sajian peristiwa itu disaksikan atau dibaca seluruh spektrum dan lapis masyarakat, tanpa kecuali. Mulai dari golongan elit, kelas menengah, dan kaum *grass roots*.

Dalam berbagai kasus menunjukkan betapa komodifikasi informasi dan peristiwa yang dikemas dalam pergunjungan, justru menciptakan kebingungan, gaduh, pamer resah, dan menstimulasi ketidakpastian atau kepanikan. Di situlah, terjadi distorsi sistemik dalam memanfaatkan kebebasan.

Pergunjungan semacam itu jelas berbeda maknanya dengan 'berdebat' dan berwacana (*discourse*) dalam arti sesungguhnya. Berdebat dan berwacana tentu dibangun dengan kerangka konsep bertarung dan mendialogkan ide, pemikiran, informasi, dan kepentingan secara elegan karena landasan nilai-nilai dasar etika serta kultur, untuk mencari pemahaman bersama. Di situ, tiap diskursus diwarnai semangat mencari kebenaran dengan cara adil dalam berkesempatan, serta dari ragam sudut pandang.

Begitupun, dalam hal pemanfaatan kebebasan oleh seseorang dituntut untuk memperhatikan bagaimana dampaknya bagi khalayak umum yang juga mengakses informasi dan acara itu. Kematangan pemikiran, sikap, serta tindakan seseorang ketika memanfaatkan ruang ekspresi atas nama kebebasan menjadi faktor berpengaruh.

Namun, kunci penting yang perlu dipikirkan adalah kesadaran kritis publik dalam menyikapi realitas yang berlangsung di sekelilingnya atau yang tengah tersaji. Semakin cerdas masyarakatnya, maka upaya manipulasi dan komodifikasi dapat dibendung. Itulah bagian dari rangkaian membangun kematangan saat memanfaatkan kebebasan bertajuk demokrasi.

REPUBLIKA, 10 April 2012

4. Revolusi PSSI



Seruan anak-anak muda pecinta sepakbola agar PSSI melakukan perombakan bertajuk ‘revolusi’ makin menggema. Demonstrasi dimana-mana, berlangsung di seluruh kota besar di Indonesia. Isu yang diusung: turunkan Nurdin Halid (NH). Babak ketegangan dan kontroversi kepemimpinan NH ini mencuat ke permukaan semenjak praktik politisasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia, ‘Garuda’, saat mengikuti liga AFF, yang berakhir tragis pada babak final ditundukkan Malaysia. Di bawah kekuasaan NH, banyak pihak menilai, PSSI gagal mereformasi dirinya. PSSI dituding konservatif didalamnya bersemayam *vested interest* dan keculasan. NH dianggap biang masalah.

Menjelang dilakukan kongres yang berarti pergantian kepengurusan, momentum itu dianggap sebagai pintu masuk merombak PSSI. Tujuannya membenahi lembaga representasi, agar tatakelola persepakbolaan mampu meningkatkan prestasi olah raga massal ini dalam lingkup nasional. Apalagi, secara obyektif dorongan itu kian menguat menyaksikan daya ungkit dukungan masyarakat penggemar sepakbola yang terus membesar.

Babak awal penjaringan calon ternyata melahirkan peristiwa dramatik. NH berduet dengan Nirwan Bakrie dibayang-bayangi oleh George Toisuta dan Arifin Panigoro. Saat verifikasi administratif, ternyata NH dan Nirwan yang lolos, sementara George dan Arifin dinyatakan gagal. Karuan saja penilaian tim ini memunculkan resistensi dimana-mana. Apapun alasan dan ukuran tim (bagian PSSI) itu jelas mendapatkan kecaman para pecinta bola. Konstruksi publik telanjur tidak percaya (*distrust*) pada NH. Akhirnya Goerge dan Arifin melayangkan gugatan.

Alhasil, gugatan ini kemudian direspons oleh Tim Banding PSSI, dengan hasil menggugurkan secara keseluruhan konstruksi persaingan di antara mereka. Isinya, gugatan George dan Arifin dianggap salah alamat, sementara NH dan Nirwan juga dinilai tidak sah pencalonannya. Ketegangan urusan sepakbola dan PSSI inipun tak luput diseret ke wilayah politik, dengan mengaitkan seolah terjadi pertarungan antar kekuatan yang berkuasa. Apapun tafsirnya, semua orang bisa berspekulasi.

Hal penting yang perlu dicatat dan dipahami atas sengketa di PSSI ini adalah, ada kecenderungan melunturnya sensitifitas pada etika yang kian menggejala dimana-mana. Hasrat berkuasa yang didorong oleh kepentingan pragmatis dengan sekadar memperoleh jabatan membuat gelap mata. Biasanya, pola yang dipakai adalah menyasiasi peluang berkuasa itu dengan dalih prosedur, namun secara terang-terangan menanggalkan nilai-nilai dasar yang diyakini publik.

Seseorang menganggap dirinya sebagai 'tokoh' merasa paling berhak, padahal tidak mendapatkan legitimasi dimata publik. Karena nafsu berkuasa berlebihan tetapi tidak menyertakan sikap peka pada realitas yang terjadi dimasyarakat, akhirnya mengabaikan prinsip bahwa kekuasaan itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di mata publik.

Penolakan beruntun dari masyarakat diwujudkan berupa demonstrasi, sindiran di media massa, munculnya lagu-lagu kritik pedas. Bahkan pemerintahpun harus 'turun tangan' yang diinterpretasikan sebagai intervensi karena melihat ketegangan yang tidak punya makna solutif. Resistensi publik semacam ini seharusnya menjadi dasar kuat bagi seseorang untuk merefleksikan diri, apakah secara etis layak tetap *ngotot* memegang jabatan. Kekuasaan memang membuat gelap.

Ketegangan di PSSI adalah bagian dari roman sosial, sebagai petunjuk sekaligus pelajaran berharga betapa wilayah lingkungan sosial politik yang berlangsung di negeri ini masih miskin etika berkompetisi memperebutkan jabatan publik. Sejarahpun akan mencatat betapa nafsu berkuasa yang tak terkendali condong membenarkan segala cara. Semoga peristiwa ini makin menyadarkan bagi siapapun, dan segera berbenah.

5. Pemimpin Bangsa



Dalam sebuah pertemuan para tokoh yang digelar PP Muhammadiyah di Jakarta, beberapa waktu lalu, muncul sebuah refleksi soal nasib bangsa Indonesia. Beragam problematika akhir-akhir ini, mulai dari soal kesenjangan sosial, toleransi yang kian terkikis, penegakan hukum yang lemah, demokrasi yang belum membawa kesejahteraan rakyat, hingga krisis kepercayaan dari rakyat, dinilai kian mengkhawatirkan nasib negeri ini.

Untuk itu, diperlukan pemerintahan berkepemimpinan kuat demi meraih kembali kepercayaan rakyat menjawab beragam problematika itu. Cara bangsa membangun dirinya, salah satunya dipengaruhi oleh watak dan ideologi sang pemimpin. Kalau pemimpinnya memiliki integritas kuat berpihak rakyat, berani ambil resiko secara tegas dengan kalkulasi matang, serta didukung rakyatnya, maka pembenahan pasti terjadi.

Baik cara gradual-bertahap, maupun revolusi sekalipun. Demikian halnya, komponen bangsa betapapun mengambil pilihan posisi yang berbeda, atau berperan pengimbang kekuasaan tentu dituntut pula memiliki dedikasi tinggi memperbaiki negeri, bukan sekadar mengejar posisi. Beban masyarakat sejauh ini begitu berat, kendatipun sejumlah perubahan positif telah berlangsung negeri ini.

Menyimak tayangan media massa, pada rentang waktu akhir-akhir ini, sebagian besar masyarakat Indonesia makin prihatin. Rangkaian konflik dan kekerasan dimana-mana, masalah sosial ekonomi serta carut-marut politik, berdampak menyusutkan energi pembangkit harapan. Wajar saja jika mulai nampak bibit frustrasi sosial.

Terlalu sayang jika dinamika sosial hanya menyediakan panggung pementasan sumpah serapah saling umpat, intrik, marah dan mengumbar nafsu jahat oleh siapapun. Karena hanya memamerkan ha-

srat saling mendominasi, untuk sekadar mencari eksistensi diri secara pragmatis. Para elit politik dan ekonomi tidak boleh dibiarkan memanfaatkan panggung itu untuk menebar kepalsuan.

Kita membutuhkan sikap keteladanan dan tanggung jawab para pemimpin. Perubahan pengelolaan negeri perlu ketegasan sikap dan tindakan, tentu dalam koridor tata krama berdemokrasi dan konstitusi, agar tak terjebak dalam otoriterisme. Sementara sikap moderat dan akomodatif, tak berarti harus menjadi lemah, *lebay*, cengeng atau lembek.

Agar pemimpin mampu menjadi ‘panutan’ dan pelindung di antara gegap gempita arus perubahan sosial politik. Begitupun juga para tokoh yang mantan pemimpin itu. Rasa mencintai bangsa ini membutuhkan daya integritas yang kuat dari berbagai komponen. Para tokoh yang pernah berkesempatan menikmati kekuasaan di masa lalu, dan meskipun kini akhirnya di garis luar, selalu terpanggil untuk mensikapi negeri.

Sikap positif para tokoh jelas sangat diperlukan, paling tidak untuk memberi perimbangan kekuasaan. Mengingkritik, mengingatkan, sekaligus memberi masukan buat kebaikan bangsa. Tentu harus menghindari motif dan tendensi *like and dislike*, jangan sampai kritik hanya sekadar menjadi batu pijak meraih kuasa. Bangsa ini memang tengah menghadapi ujian. Bagaimanapun, proses berdemokrasi Indonesia jauh lebih baik dibanding negara tetangga yang juga berdemokratisasi. Seperti Philipina, Thailand, Malaysia, Brunei, maupun negeri lain yang berdekatan. Sayangnya, kualitas demokrasi kita belum memperkuat capaian negeri ini sejahtera.

Untuk urusan sejahtera, Indonesia masih kalah dibanding negeri Jiran itu. Faktor struktur sosial yang majemuk, beban masalah yang kompleks serta rumitnya konsolidasi menjadi faktor mempersulit capaian cita-cita besar sesuai amanat konstitusi UUD’45. Semoga para komponen bangsa menyadari itu semua.

Lagi-lagi kita harus senantiasa diingatkan untuk bersatu padu, mengkonsolidasikan energi kolektif membenahi negeri ini yang sedang penuh beban. Karenanya, pemimpin bangsa harus berani mengambil inisiatif lebih dulu, peka pada aspirasi dan arus harapan rakyat kebanyakan. Tidak perlu ragu untuk bertindak demi menyelamatkan bangsa.

REPUBLIKA, 12 Oktober 2010

6. Lembaga Ekstra Negara



Reformasi politik di Indonesia, salah satunya ditandai oleh terbentuknya lembaga-lembaga ekstra negara, dalam bentuk komisi-komisi yang menangani berbagai sektor terkait dengan peran strategis menjawab agenda-agenda negara sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Kita bisa lihat misalnya komisi pemberantasan korupsi, komisi yudisial, komisi kepolisian, komisi nasional HAM, komisi perlindungan anak, komisi nasional perempuan, komisi penyiaran Indonesia, dan seterusnya.

Lembaga-lembaga tersebut pada mulanya dimaksudkan sebagai bentuk injeksi energi, membuat terobosan baru didalam menangani masalah-masalah strategis, ketika lembaga-lembaga konvensional tidak mampu memenuhi tugasnya secara cepat dan konsisten. Lembaga konvensional tersebut meliputi kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan seterusnya yang seharusnya bertugas menangani masalah hukum di Indonesia atau agenda publik. Dengan begitu, lembaga ekstra negara itu sifatnya *ad hoc* memiliki daya cepat dalam mengatasi agenda strategis.

Jikalau kita saksikan dalam perkembangan terakhir ini, muncul catatan masalah dari dua penjurur. Sepak terjang lembaga ekstra negara ini pada mulanya begitu hebat, dan membuat lompatan kerja yang mencengangkan dan dianggap positif. Sebagaimana prestasi komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang berhasil membongkar korupsi di lembaga-lembaga strategis yang merugikan uang negara.

Banyak pejabat (eksekutif, legislatif dan yudikatif) harus diseret ke pengadilan karena selama menjabat telah menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*) untuk menguntungkan diri dan kelompoknya dengan menyedot uang negara. Semangat KPK itu pula menumbuhkan

partisipasi masyarakat anti korupsi yang tersebar di tingkat nasional dan daerah. Bahkan, komite-komite atau gerakan sosial yang mendesak terwujudnya pemerintahan bersih (*good governance*) marak terjadi dimana-mana mendinamisasi reformasi.

Demikian pula komisi yudisial yang menciptakan letupan-letupan pemberantasan mafia peradilan yang diistilahkan ibarat gunung es, cukup membanggakan. Sebagaimana kita tahu, mafia yang melibatkan pejabat berkonspirasi dengan pengusaha ditopang aparat penegak hukum membuat kredibilitas lembaga hukum hancur.

Kerja yang berharga dan patut diapresiasi ditunjukkan Komnas HAM yang senantiasa melakukan investigasi atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dimana-mana. Padahal sebelum-sebelumnya tidak tersentuh aparat hukum maupun lembaga politik. Termasuk Komnas Perempuan yang relatif aktif memengaruhi kebijakan dengan tujuan agar negara kian giat melindungi nasib perempuan dari bentuk penindasan dan kekerasan.

Namun, menyimak perkembangan yang terjadi, ada beberapa hal yang perlu direfleksikan sebagai catatan. Seiring dengan kerja lembaga-lembaga ekstra negara itu di satu sisi, semestinya harus mampu menstimulasi meningkatnya kerja-kerja lembaga konvensional negara dalam tata pemerintahan dan peradilan disisi yang lain. Faktanya, makin meningkat kerja lembaga ekstra negara dengan langkah nyata dan berhasil, *toh* masih banyak pula kasus yang justru menimpa lembaga konvensional itu. Ini sungguh ironis.

Dengan demikian, hal itu menandakan belum adanya daya dobrak perubahan mendasar dengan kehadiran lembaga ekstra negara. Pencanangan reformasi birokrasi oleh presiden SBY yang dimaksudkan agar terjadi perubahan paradigma pengelolaan tata pemerintahan, jalannya masih lamban.

Jargon itu belum diterjemahkan dalam bentuk agenda konkrit melalui *road map* yang berfungsi sebagai pandu arah reformasi birokrasi di berbagai lini. Padahal sebagaimana diketahui, sumberdaya material yang dialokasikan untuk membiayai lembaga ekstra negara ini juga banyak, karena saat ini senantiasa terbentuk lembaga baru.

Paling mutakhir saat SBY tergoyang kasus century dan maraknya mafia peradilan, lalu dibentuk "satgas anti mafia hukum" yang di-

anggap sebagai kekuatan baru membantu akselerasi pemberantasan ragam mafia hukum di Indonesia. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah, memperkuat kembali lembaga ekstra negara ini, dengan target yang lebih jelas dan konsisten.

Untuk urusan ini, kehadiran dan kerja lembaga ini jelas membutuhkan daya dukung masyarakat sipil yang peduli reformasi secara fundamental. Baik itu dukungan dan kontrol dari LSM, media massa, ormas, dan para cendekiawan maupun tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terciptanya negara yang bersih, demokratis dan kredibel dihadapan masyarakat. Demikian pula, lembaga-lembaga konvensional perlu dipaksa menjalankan reformasi dirinya secara terukur, untuk memastikan agar langkah perubahan yang dilakukan di Indonesia benar-benar nyata dan memiliki makna bagi masyarakat secara luas.

REPUBLIKA, 27 Juli 2010

7. Muktamar Muhammadiyah



Pada 3-8 Juli 2010, di Yogyakarta bakal digelar perhelatan akbar yakni Muktamar seabad Muhammadiyah. Kali ini mengangkat tema, Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, Gerak Melintas Zaman Dakwah dan Tajdid Menuju Peradaban Utama. Mengutip dari penjelasan Haedar Nashir, “gerak melintas zaman” mengandung dua makna. *Pertama* melewati masa sejak kelahirannya hingga usia ke-100; *kedua*, menyeberangi yakni memasuki fase baru setelah usianya satu abad ke peralihan abad selanjutnya (www.muhammadiyah.or.id).

Dalam melintasi zaman tersebut, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan Islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid sebagaimana spirit awal kelahirannya yang tercantum dalam *Statuten* Muhammadiyah 1912: “menyebarkan” [dakwah] dan “memajukan” [tajdid] hal ihwal ajaran Islam di seluruh tanah air. Usia yang cukup mapan, mengarungi tiga zaman yaitu, era perjuangan kemerdekaan di masa kolonial, era setelah kemerdekaan di masa orde lama dan Orde Baru, dan babak reformasi yang hingga kini penuh pertaruhan.

Momentum Muktamar penuh harapan, mampu melahirkan pikiran reflektif, terbangunnya *road map* masa depan Persyarikatan untuk Indonesia. Menyaksikan jalannya perubahan Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan lompatan besar membangun demokrasi, sudah semestinya kita berbangga. Terlepas dari segala hambatan dan goncangan yang senantiasa mendera, jejak langkah bangsa ini tercatat sebagai pengalaman berharga pengukir sejarah yang layak diapresiasi.

Salah satu kekuatan penopang sejarah bangsa ini adalah diperankan Muhammadiyah, yang memberi andil membebaskan umatnya dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dakwah

Muhammadiyah sangat berarti bukan semata karena bertumpu pada layanan rohaniah, membangun mentalitas keberagaman masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim.

Tetapi lebih dari itu, pola intervensi sosial yang diwujudkan juga menyentuh strategi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan budaya. Fakta tersebut memperkuat eksistensi organisasi ini di tengah-tengah masyarakat.

Kisah perjuangan Muhammadiyah selain dipengaruhi oleh luasnya jangkauan organisasi dengan kader-kader yang mumpuni, juga dipengaruhi model kepemimpinan yang relatif visioner, sebagaimana dirintis sang pendirinya, KH. Ahmad Dahlan. Begitupun spirit ini tertransformasi pada generasi berikutnya. Kesederhanaan AR. Fakhruddin selalu dikenang sebagai teladan masyarakat, keberanian Amien Rais merupakan simbol perubahan era reformasi, serta kesahajaan Syafii Maarif menjadi bagian kekuatan yang menginspirasi bangsa ini.

Nah, pada usianya yang sudah seabad, rekam jejak positif hendaknya menjadi modal berharga bagi masa depan persyarikatan. Karena faktanya, bangsa Indonesia masih membutuhkan peran Muhammadiyah untuk mengawal agar jalannya roda reformasi bisa lurus, sesuai cita-cita amanat konstitusi.

Di balik *succes story* yang melekat dalam rekam jejaknya, posisi Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil, kadang juga tidak luput dari godaan pragmatis, dengan akibat menggeros nilai-nilai persyarikatan. Dorongan untuk terlibat mengubah keadaan melalui cara berkuasa, sebagai format baru 'berdakwah' memunculkan reaksi kontroversi karena dianggap keluar dari jalurnya. Cobaan semacam ini hal yang biasa, bagian proses pendewasaan dan organisasi yang matang.

Dinamika demokrasi dan kekuasaan yang akhir-akhir ini makin meningkat misalnya, perlu menjadi catatan penting bagi persyarikatan. Terseretnya para kader dan pimpinan Muhammadiyah untuk terlibat aktif dukung-mendukung pada posisi tertentu dalam struktur kekuasaan membutuhkan formula yang tepat. Urusan komitmen, integritas, dan konsensus harus lebih diperjelas, dengan senantiasa mengembalikannya pada nilai dasar sebagaimana mandat

persyarikatan. Jangan sampai terjebak pada pola oligarkis manipulatif yang kian mengurangi makna dakwah itu sendiri.

Semoga pada episode ujian dan perjuangannya, para pemimpin dan kader Muhammadiyah mampu menjalaninya penuh hikmat, menjadi kekuatan strategis memajukan peradaban bangsa, sebagaimana dibangun dalam tema Muktamar.

REPUBLIKA, 29 Juni 2010

Negara Sibuk Rakyat Terpuruk

Himpitan ekonomi dan sulitnya rakyat memperoleh akses keadilan adalah cerita lama, namun kenyataannya masih saja berlangsung layaknya kisah bersambung. Sekalipun episode baru selalu lahir dari setiap pergantian struktur kekuasaan baik di level nasional maupun daerah, namun kondisi tersebut tidak berubah. Kontras dengan kemewahan kaum elit yang didemonstrasikan secara massif melalui berbagai media.

Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, rakyat seperti disihir oleh tingginya advertensi politik sehingga citra politik menjadi keutamaan ketimbang praktik nyata mewujudkan kehidupan sosial yang berkeadilan. Belum lagi kesibukan para elit penguasa dengan pertarungan siasat merebut dan mempertahankan kekuasaan, sehingga lalai pada kewajiban mengurus hajat hidup rakyat.

Peristiwa demi peristiwa yang menggambarkan kondisi di atas terekam dalam buku ini yang merupakan kumpulan tulisan Sosiolog UGM, Arie Sujito. Tulisan tersebut dihimpun dari kolom Analisis yang terbit di Harian *Republika* setiap hari Selasa selama tahun 2010-2012. Telaah kritis penulis atas realitas-realitas sosial dalam tulisan tersebut menjadikan buku ini bukanlah dokumentasi berita.

Buku ini menghadirkan refleksi ketika negara larut dalam riuh politik yang telah tereduksi menjadi sekadar urusan pembagian kekuasaan. Imbasnya terhadap kondisi sosial yang dirasakan masyarakat, menjadi kritik bagi elit negara agar lebih peduli dan bertanggungjawab, tidak membiarkan rakyat bertarung sendirian mempertahankan hidupnya.



IRE Yogyakarta

Dusun Tegalrejo RT.01 RW.09 Desa Sariharjo, Ngaglik
Jalan Palagan Tentara Pelajar km 9,5 Sleman Yogyakarta 55581
Telp/Fax +62-74-867686 E-mail : office@ireyogya.org
<http://www.ireyogya.org>

ISBN 978-979-8198-84-7



9 789798 119884 7